

# BUKU

## INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMERINTAH DAERAH KOTA MOJOKERTO TAHUN 2025

DIREKTORAT KERJASAMA DAN PENGELOLAAN USAHA (DKPU)

DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA MOJOKERTO



## Kata Pengantar

Pengukuran kinerja publik membantu Pemerintah Daerah untuk merencanakan pelayanan yang lebih baik, memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat, memperbaiki pelayanan secara terus menerus dan meningkatkan dukungan dari publik dalam rangka efisiensi pelayanan publik dibiayai dari pajak. Karenanya, menjadi penting untuk mengetahui bagaimana pelayanan publik menawarkan nilai dari anggaran yang dibelanjakan dan pelayanan yang diberikan memenuhi standar yang ditetapkan.

Dalam Buku Indikator Kinerja Utama Pemerintah Daerah Kota Mojokerto Tahun 2025 ini membahas tentang perkembangan realisasi dan hasil evaluasi indikator kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah pada tahun 2020 hingga tahun 2024, serta prediksi capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Kota Mojokerto tahun 2025. Evaluasi dan prediksi IKU Pemerintah Daerah Kota Mojokerto dimaksudkan sebagai bentuk mitigasi terhadap Pemerintah Daerah untuk terus meningkatkan kinerja dan pelayanan di masa mendatang.

Kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan langsung maupun tidak langsung dalam publikasi ini, disampaikan terima kasih. Saran perbaikan selalu diharapkan untuk penyempurnaan publikasi ini di masa mendatang.

Mojokerto, Mei 2025

Plt. Kepala Dinas

Komunikasi dan Informatika

Kota Mojokerto









**RATNANING TIAS. ST. MM**

Pembina Utama Muda

NIP. 19791111 200212 2 005

## Ringkasan

Performa kinerja Pemerintah Kota Mojokerto pada tahun 2024 tergolong cukup baik. Terdapat tiga Indikator Kinerja Utama (IKU) dari enam indikator tujuan yang sudah melampaui target, sedangkan tiga indikator yang belum mencapai target. IKU yang belum mencapai target adalah Indeks Gini memiliki ketercapaian 98,88 persen, Indeks Reformasi Birokrasi memiliki ketercapaian 99,37 persen, dan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup dengan ketercapaian 94,62 persen.















Tujuan		Indikator Tujuan	Target P-RKPD	Realisasi	Evaluasi	
			2024	2024	%	Keterangan
1	Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Menuju Taraf Hidup Yang Lebih Baik	Angka Kemiskinan	5,57	5,57	100,00	
		Indeks Gini	0,353 - 0,343	0,357	98,88	
2	Mewujudkan Sumber Daya Manusia Unggul, Bermartabat Dan Berdaya Saing	Indeks Pembangunan Manusia	80,93	81,76	101,03	
3	Meningkatkan Penguatan Ekonomi Berbasis Potensi Daerah dan Investasi	Pertumbuhan Ekonomi	4,50 - 4,70	5,32	113,19	
4	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang Dinamis dan Akuntabel	Indeks Reformasi Birokrasi	87,50	86,95	99,37	
5	Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup yang Layak	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	60,58	57,32	94,62	

**Keterangan :**

-  : Melampaui
-  : Tercapai
-  : Belum Tercapai

Pada Indikator Kinerja Sasaran (IKS) berdasarkan hasil performa kinerja pada tahun 2024 terdapat sebelas indikator yang sudah melampaui target, tiga indikator yang tercapai dan sebelas indikator yang belum tercapai. Indikator yang belum tercapai antara lain Indeks Pemberdayaan Gender; Indeks Kesehatan; Indeks Kesalehan Sosial; Pertumbuhan PDRB Sektor Industri Pengolahan; Pertumbuhan PDRB Sektor Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi; Pertumbuhan PDRB Sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum; Nilai Realisasi Investasi; Indeks Kualitas Air; dan Indeks Kualitas Udara. Sementara itu, untuk indikator Sistem Merit dan Indeks Pembangunan Pemuda belum terdapat realisasi data di tahun 2024, sehingga belum bisa dievaluasi.

Tujuan		Sasaran	Indikator Sasaran	Target P-RKPD	Realisasi	Evaluasi	
				2024	2024	%	Keterangan
1	Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Menuju Taraf Hidup Yang Lebih Baik	Menurunnya Tingkat Pengangguran Masyarakat	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	4,60	3,76	122,34	<div></div>
		Terhidarnya Masyarakat dari Kerentanan Ekonomi	Indeks Kedalaman Kemiskinan	0,74	0,74	100,00	<div></div>
		Tercukupinya Kebutuhan Pokok	Pendapatan Perkapita/ PDRB Perkapita (Juta Rp)	59,50	62,68	105,35	<div></div>
		Meningkatnya Kesetaraan Gender Dalam Pembangunan	Indeks Pemberdayaan Gender	76,50	72,91	95,31	<div></div>
2	Mewujudkan Sumber Daya Manusia Unggul, Bermartabat Dan Berdaya Saing	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	Indeks Kesehatan	0,865	0,861	99,54	<div></div>
		Meningkatnya Kualitas Pendidikan Masyarakat	Indeks Pendidikan	0,763	0,772	101,18	<div></div>
		Meningkatnya Peran Pemuda Dalam Pembangunan	Indeks Pembangunan Pemuda	54,2	n.a	n.a	-
		Mewujudkan Masyarakat Bermartabat dan Berbudaya	Indeks Kesalehan Sosial	95,10	91,67	96,39	<div></div>
3	Meningkatkan Penguatan Ekonomi Berbasis Potensi Daerah dan Investasi	Meningkatnya Produktivitas Sektor Potensial	Pertumbuhan PDRB Sektor Industri Pengolahan	6,08	3,44	56,58	<div></div>
			Pertumbuhan PDRB Sektor Perdagangan Besar dan	6,44	3,54	54,97	<div></div>

Tujuan		Sasaran	Indikator Sasaran	Target P-RKPD	Realisasi	Evaluasi	
				2024	2024	%	Keterangan
			Eceran, Reparasi				
		Meningkatnya Daya Saing UMKM	Persentase Pertumbuhan Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil	3,50	3,52	100,57	
		Meningkatnya Daya Saing Pariwisata	Pertumbuhan PDRB Sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	9,00	5,51	61,22	
		Meningkatnya Daya Tarik Investasi Daerah	Nilai Realisasi Investasi	426.000.000.000	360.969.890.005,00	84,73	
4	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang Dinamis dan Akuntabel	Meningkatnya Pelayanan Publik yang Inovatif dan Integratif	Indeks Kepuasan Masyarakat	90,30	91,95	101,83	
			Kepatuhan Standard Pelayanan Publik	88,40	92,12	104,21	
			Indeks Inovasi Daerah	84,75	92,25	108,85	
			Nilai SPBE	4,28	4,32	100,93	
		Meningkatnya Akuntabilitas Dalam Manajemen Pemerintahan	Nilai SAKIP	72,00	75,13	104,35	
				BB	BB		
			Opini BPK	WTP	WTP	100,00	
			Maturitas SPIP	level 3	level 3	100,00	
		Meningkatnya Manajemen dan Kapasitas Kepegawaian	Sistem Merit	315,00	n.a	n.a	-
5	Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup yang Layak	Menurunnya Tingkat Pencemaran Lingkungan	Indeks Kualitas Air	58,96	51,58	87,48	
			Indeks Kualitas Udara	82,75	79,22	95,73	
		Tersedianya Kawasan Permukiman Dengan Layak	Indeks Infrastruktur Permukiman	98,35	98,45	100,10	
		Meningkatnya Kesiapsiagaan Menghadapi Bencana	Indeks Risiko Bencana	134,9	98,69	136,69	

Keterangan:



: Melampaui















: Tercapai





: Belum Tercapai


Pada tahun 2025 enam Indikator Kinerja Utama (yakni: Angka Kemiskinan, Indeks Gini, Indeks Pembangunan Manusia, Pertumbuhan Ekonomi, Indeks Reformasi Birokrasi, dan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup) diprediksi akan mampu mencapai target, baik dalam skenario *moderate* maupun *optimis*. Selain itu, diperlukan upaya yang lebih terfokus dan strategis guna memastikan pencapaian target secara optimal di masa mendatang.

Indikator Tujuan	Keterangan	Prediksi 2025			Target 2025	Prediksi tahun 2025	Upaya yang dilakukan
		Pesimis	Moderate	Optimis			
Angka Kemiskinan	<i>Lower Better</i>	5,37	5,30	5,16	5,42		
Indeks Gini	<i>Lower Better</i>	0,34	0,33	0,31	0,35		
Indeks Pembangunan Manusia	<i>Higher Better</i>	82,15	82,46	82,61	81,38		
Pertumbuhan Ekonomi	<i>Lower Better</i>	4,11	3,41	2,55	2,79		
Indeks Reformasi Birokrasi	<i>Higher Better</i>	87,71	89,62	91,96	87,75		
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	<i>Higher Better</i>	57,68	58,75	59,81	57,56		

**Keterangan:**

 : Melampaui

 : Tercapai

 : Belum Tercapai

 : Dipertahankan

 : Perlu Perhatian Lebih



Hasil prediksi IKS pada tahun 2025 dari total 25 indikator, sebanyak 23 indikator telah melampaui target, baik dalam skenario pesimis, *moderate*, maupun optimis. Capaian ini mencerminkan bahwa kinerja Pemerintah Kota Mojokerto menunjukkan tren positif dan konsisten dalam mewujudkan target pembangunan daerah. Namun demikian, terdapat 2 indikator sasaran yang belum memiliki data realisasi di tahun 2024, yaitu Sistem Merit dan Indeks Pembangunan Pemuda.

Indikator Sasaran	Keterangan	Prediksi 2025			Target 2025	Prediksi tahun 2025	Upaya yang dilakukan
		Pesimis	Moderate	Optimis			
Tingkat Pengangguran Terbuka	<i>Lower Better</i>	3,44	2,79	2,26	3,76		
Indeks Kedalaman Kemiskinan	<i>Lower Better</i>	0,72	0,70	0,65	0,82		
Pendapatan Perkapita/ PDRB Perkapita (Juta Rp)	<i>Higher Better</i>	64,88	65,89	67,48	55,35		
Indeks Pemberdayaan Gender	<i>Higher Better</i>	76,85	78,16	80,10	70,75		
Indeks Kesehatan	<i>Higher Better</i>	0,87	0,88	0,89	0,87		
Indeks Pendidikan	<i>Higher Better</i>	0,78	0,79	0,80	0,78		
Indeks Pembangunan Pemuda	<i>Higher Better</i>	n.a	n.a	n.a	54,90	-	-
Indeks Kesalehan Sosial	<i>Higher Better</i>	91,73	94,79	98,37	97,75		
Pertumbuhan PDRB Sektor Industri Pengolahan (%)	<i>Higher Better</i>	5,19	6,52	8,97	6,10		
Pertumbuhan PDRB Sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi (%)	<i>Higher Better</i>	3,66	5,63	7,74	6,46		
Persentase Pertumbuhan Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil (%)	<i>Higher Better</i>	3,89	4,40	5,62	4,00		
Pertumbuhan PDRB Sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum (%)	<i>Higher Better</i>	6,75	8,93	11,81	11,69		
Nilai Realisasi Investasi (Juta Rp)	<i>Higher Better</i>	425.904.411.032,00	124.230.871.365,68	632.881.701.037,00	601.827.815.252,67		
Indeks Kepuasan Masyarakat	<i>Higher Better</i>	92,43	92,66	94,40	90,30		
Kepatuhan Standard Pelayanan Publik	<i>Higher Better</i>	95,98	97,09	97,42	68,00		
Indeks Inovasi Daerah	<i>Higher Better</i>	92,27	92,32	93,35	92,55		
Nilai SPBE	<i>Higher Better</i>	4,38	4,56	5,26	4,84		
Nilai SAKIP	<i>Higher Better</i>	75,35	77,06	79,30	78,62		
Opini BPK	<i>Higher Better</i>	WTP	WTP	WTP	WTP		
Maturitas SPIP	<i>Higher Better</i>	level 3	level 3	level 4	level 3		

Indikator Sasaran	Keterangan	Prediksi 2025			Target 2025	Prediksi tahun 2025	Upaya yang dilakukan
		Pesimis	Moderate	Optimis			
Sistem Merit	Higher Better	n.a	n.a	n.a	296,00	-	-
Indeks Kualitas Air	Higher Better	51,98	54,98	59,53	58,97	<div></div>	<div></div>
Indeks Kualitas Udara	Higher Better	79,51	80,65	82,52	81,11	<div></div>	<div></div>
Indeks Infrastruktur Permukiman	Higher Better	98,59	99,07	99,95	99,63	<div></div>	<div></div>
Indeks Resiko Bencana	Lower Better	95,73	93,59	90,13	134,15	<div></div>	<div></div>

Keterangan :

n.a : not available (Indikator Sasaran terdapat realisasast tahun 2024)



: Melampaui



: Tercapai



: Belum Tercapai



: Dipertahankan



: Perlu Perhatian Lebih



# Daftar Isi

<b>Kata Pengantar .....</b>	<b>i</b>
<b>Ringkasan .....</b>	<b>ii</b>
<b>Daftar Isi .....</b>	<b>viii</b>
<b>Daftar Tabel .....</b>	<b>x</b>
<b>Daftar Gambar .....</b>	<b>x</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Maksud dan Tujuan .....	3
1.3 Metodologi .....	3
1.4 Ruang Lingkup Pekerjaan .....	8
1.5 Sistematika Pelaporan .....	9
<b>BAB II KAJIAN PUSTAKA .....</b>	<b>10</b>
2.1 Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah .....	10
2.2 Tingkatan Kinerja Pemerintah Daerah .....	11
2.3 Tujuan dan Manfaat Pengukuran Kinerja .....	12
2.4 Indikator Kinerja Utama dan Indikator Kinerja Sasaran .....	13
<b>BAB III P-RKPD KOTA MOJOKERTO TAHUN 2024 .....</b>	<b>14</b>
3.1 Prioritas dan Sasaran Pembangunan Tahun 2024 .....	14
3.2 Keterkaitan Prioritas Pembangunan Kota Mojokerto dengan Nasional dan Provinsi Jawa Timur .....	18
<b>BAB IV HASIL ANALISIS .....</b>	<b>24</b>
4.1 Evaluasi Kinerja Pemerintah Daerah Kota Mojokerto Tahun 2024 .....	24
4.1.1 Tujuan 1 .....	24
4.1.2 Tujuan 2 .....	29
4.1.3 Tujuan 3 .....	32
4.1.4 Tujuan 4 .....	36
4.1.5 Tujuan 5 .....	39
4.2 Evaluasi Kinerja dan Serapan Anggaran Program .....	43
4.3 Faktor Penghambat dan Pendorong Kinerja Pemerintah Daerah Kota Mojokerto Tahun 2024 .....	58
4.4 Prediksi Capaian Indikator Kota Mojokerto .....	79

<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>82</b>
5.1 Kesimpulan .....	82
5.2 Rekomendasi .....	83
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>87</b>
<b>LAMPIRAN .....</b>	<b>89</b>

## Daftar Tabel

Tabel 1. 1 Inventarisasi Data Capaian Kerja .....	4
Tabel 1. 2 Evaluasi Capaian Kinerja Program-Penyerapan Anggaran .....	5
Tabel 3. 1 Arah Kebijakan RPD dan Prioritas Pembangunan Kota Mojokerto Tahun 2024 .....	18
Tabel 3. 2 Linieritas Tema Dan Prioritas Pembangunan Tahun 2024.....	21
Tabel 3. 3 Keselarasan Sasaran Pembangunan Kota Mojokerto dengan Sasaran Pembangunan Nasional dan Provinsi Jawa Timur Tahun 2024.....	20
Tabel 3. 4 Target Capaian Indikator Kinerja Daerah Tahun 2024.....	22
Tabel 4. 1 Performa Indikator Kinerja Utama (IKU) terhadap Tujuan 1 Pemerintah Daerah Kota Mojokerto .....	25
Tabel 4. 2 Performa IKS terhadap Indikator Tujuan Angka Kemiskinan Kota Mojokerto .....	26
Tabel 4. 3 Performa IKS terhadap Indikator Tujuan Indeks Gini Kota Mojokerto .....	28
Tabel 4. 4 Performa IKU terhadap Tujuan 2 Pemerintah Daerah Kota Mojokerto .....	29
Tabel 4. 5 Performa IKS terhadap IPM Kota Mojokerto.....	30
Tabel 4. 6 Performa Indikator Kinerja Utama (IKU) terhadap Tujuan 3 Pemerintah Daerah Kota Mojokerto .....	33
Tabel 4. 7 Performa IKS terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kota Mojokerto .....	34
Tabel 4. 8 Performa IKU terhadap Tujuan 4 Pemerintah Daerah Kota Mojokerto .....	36
Tabel 4. 9 Performa IKS terhadap Tujuan 4 Pemerintah Daerah Kota Mojokerto.....	37
Tabel 4. 10 Performa IKU terhadap Tujuan 5 Pemerintah Daerah Kota Mojokerto.....	40
Tabel 4. 11 IKS terhadap Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kota Mojokerto.....	41
Tabel 4. 12 Tabel Kategorisasi Evaluasi Capaian Kinerja Program-Penyerapan Anggaran.....	43
Tabel 4. 13 Evaluasi Kinerja Program dan Serapan Anggaran Daerah Tahun 2024.....	51
Tabel 4. 14 Faktor Penghambat dan Pendukung IKU Kota Mojokerto.....	59
Tabel 4. 15 Faktor Penghambat dan Pendukung IKS Kota Mojokerto .....	64
Tabel 4. 16 Prediksi Capaian IKU Kota Mojokerto Tahun 2025.....	79
Tabel 4. 17 Prediksi Capaian IKS Kota Mojokerto Tahun 2025 .....	80
Tabel 5. 1 Rekomendasi untuk Perangkat Daerah.....	83

## Daftar Gambar

Gambar 1. 1 Metode dan Lingkup Analisis Indeks Kinerja Daerah (IKD) Level Tujuan, Sasaran dan Program Kota Mojokerto. ....	6
Gambar 1. 2 Ilustrasi Penentuan Prediksi Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2025 untuk Indikator Higher Better. ....	7
Gambar 1. 3 Ilustrasi Penentuan Prediksi Capaian IKU Tahun 2025 untuk Indikator Lower Better.	7
Gambar 3. 1 Arah Kebijakan Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024 .....	19
Gambar 3. 2 Keselarasan Tema Pembangunan Kota Mojokerto, Jawa Timur dan Nasional Tahun 2024 .....	20
Gambar 4. 1 Performa Evaluasi Angka Kemiskinan Pemerintah Daerah Kota Mojokerto. ....	25
Gambar 4. 2 Performa Evaluasi Indeks Gini Pemerintah Daerah Kota Mojokerto. ....	26
Gambar 4. 3 Performa Evaluasi Indeks Pembangunan Manusia Kota Mojokerto. ....	30
Gambar 4. 4 Performa Evaluasi Pertumbuhan Ekonomi Kota Mojokerto.....	33
Gambar 4. 5 Performa Evaluasi Indeks Reformasi Birokrasi Kota Mojokerto. ....	37
Gambar 4. 6 Performa Evaluasi Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kota Mojokerto. ....	40
Gambar 4. 7 Program dengan Kategori Sangat Baik.....	46
Gambar 4. 8 Program dengan Kategori Baik.....	47
Gambar 4. 9 Program dengan Kategori Cukup .....	48
Gambar 4. 10 Program dengan Kategori Kurang Baik.....	50

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Pengukuran indikator dan pengukuran kinerja untuk pelayanan publik telah lama dilakukan, seperti penggunaan tabel dalam pengenalan penggunaan pengukuran kinerja dalam bidang kesehatan pada tahun 1732 (Jowett & Rothwell, 1988). Osborne & Gaebler (1992) berperan penting dalam mengenalkan pengukuran kinerja pada organisasi publik dengan beberapa poin penting, diantaranya:

1. Jika Anda tidak bisa mengukur hasil, maka Anda tidak bisa dikatakan berhasil dari kegagalan;
2. Jika Anda tidak bisa melihat keberhasilan, Anda tidak bisa mendapat penghargaan;
3. Jika Anda tidak berhasil, Anda mungkin mendapatkan kegagalan;
4. Jika Anda tidak bisa melihat keberhasilan, Anda tidak mendapat pelajaran;
5. Jika Anda tidak mengenali kegagalan, Anda tidak bisa memperbaikinya; dan
6. Jika Anda dapat mendemonstrasikan hasil, Anda dapat memenangkan dukungan publik.

Dengan demikian, pengukuran membantu Pemerintah Daerah untuk merencanakan pelayanan dan memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat, memperbaiki pelayanan secara terus menerus, dan meningkatkan dukungan dari publik.

Apakah pengukuran kinerja diperlukan? Pelayanan publik dibiayai dari pajak, meningkatkan anggaran belum tentu meningkatkan pelayanan publik. Oleh karena itu, menjadi penting untuk mengetahui bagaimana pelayanan publik menawarkan nilai dari anggaran yang dibelanjakan dan pelayanan yang diberikan memenuhi standar yang ditetapkan (Pidd, 2012). Input atau sumberdaya yang digunakan untuk menyediakan pelayanan publik harus diukur. Pengukuran lain juga tersedia untuk mengukur *output* dan *outcome*.

Alasan untuk mengukur kinerja pemerintah daerah ada tiga, yaitu:

1. Untuk melihat program yang bekerja. Masyarakat menginginkan pelayanan berkualitas dan pemerintah menginginkan pelayanan tersebut tersedia secara efisien, sehingga pengukuran kinerja dapat melihat pendekatan mana yang paling efisien dan efektif.
2. Untuk mengidentifikasi kompetensi fungsional. Banyak pelayanan publik disediakan oleh pemerintah daerah diseluruh wilayah sebuah negara. Beberapa pelayanan tersebut disediakan oleh pihak ketiga yang bekerja sama dengan pemerintah daerah,

sehingga penting untuk mengukur kinerja untuk mengetahui pihak ketiga mana yang menghasilkan kinerja tertinggi dan memahami bagaimana pihak ketiga tersebut dapat memberikan pelayanan yang baik sebagai *best practice*.

3. Untuk mendukung akuntabilitas publik. Pelayanan publik dibiayai utamanya melalui pajak dan dalam demokrasi, publik selayaknya mengetahui seberapa baik pelayanan publik tersebut disediakan (Bird, Cox, Goldstein, Holt, & Smith, 2003).

Program pemerintah yang diukur kadang berhasil dan kadang pula tidak atau bahkan tidak mencapai tujuan dasar. Sebuah program berjalan tidak efektif karena tidak dijalankan dengan baik sehingga perlu diorientasi ulang tetapi kesalahan bisa pula terletak pada implementasi yang tidak memadai, termasuk kurangnya sumber daya yang mencukupi, karyawan yang tidak sesuai atau manajemen yang lemah. Salah satu opsi adalah menghentikan program yang tidak berhasil dan memulai dari awal. Manajemen kinerja merupakan alat esensial dalam usaha para administrator dapat mempertanggungjawabkan program dan meningkatkan efektivitas program (Peters, 2016). Kunci efektivitas manajemen kinerja adalah indikator kinerja pembuat kebijakan yang bisa menggunakan penilaian program yang sedang berjalan dilengkapi informasi apakah program tersebut dapat berjalan atau tidak, apakah hasil pengukuran target kegiatan dan program tersebut dapat mencerminkan capaian sasaran dan apakah capaian sasaran tersebut dapat mencerminkan capaian tujuan, seperti yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah sebagai visi misi lima tahunan.

Pengertian kinerja dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 adalah capaian keluaran/ hasil/ dampak dari kegiatan/ program/sasaran sehubungan dengan penggunaan sumber daya pembangunan dan indikator kinerja adalah tanda yang berfungsi sebagai alat ukur pencapaian kinerja suatu kegiatan, program atau sasaran dan tujuan dalam bentuk keluaran (*output*), hasil (*outcome*), dampak (*impact*). Keluaran (*output*) adalah suatu produk akhir berupa barang atau jasa dari serangkaian proses atas sumber daya pembangunan agar hasil (*outcome*) dapat terwujud. Hasil (*outcome*) adalah keadaan yang ingin dicapai atau dipertahankan pada penerima manfaat dalam periode waktu tertentu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari beberapa kegiatan dalam satu program dan dampak (*impact*) adalah kondisi yang ingin diubah berupa hasil pembangunan/ layanan yang diperoleh dari pencapaian hasil (*outcome*) beberapa program.

Indikator Kinerja yang digunakan untuk mengukur kinerja pemerintah daerah adalah Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Kunci (IKK). Penetapan indikator kinerja daerah bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi

dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) daerah dan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Kunci (IKK) pada akhir periode masa jabatan.

Pengukuran Kinerja Pemerintah Daerah diukur dari pencapaian Indikator Kinerja Utama yang ditetapkan dengan memperhatikan pencapaian target kegiatan dan program serta pencapaian indikator tujuan dan sasaran. Hasil kesimpulan pengukuran tersebut mencerminkan pencapaian Pemerintah Daerah. Pengukuran yang digunakan dalam Indikator Kinerja Utama Pemerintah Daerah adalah target capaian indikator tahun 2024 untuk dianalisis mengetahui permasalahan yang mempengaruhi dalam capaian realisasi dan mendapatkan solusi program/kegiatan yang dapat mengatasi permasalahan tersebut.

## 1.2 Maksud dan Tujuan

Penyusunan Buku Indikator Kinerja Utama Pemerintah Daerah dimaksudkan sebagai alat ukur pencapaian kinerja suatu kegiatan, program atau sasaran dan tujuan dalam bentuk keluaran (*output*), hasil (*outcome*), dan dampak (*impact*). Tujuan penyusunan dokumen ini adalah sebagai berikut.

1. Meningkatkan komitmen Pemerintah Daerah untuk membangun pola kerja berbasis data dan informasi yang transparan, efektif dan efisien;
2. Memberikan gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah;
3. Mengetahui pencapaian target program dan kegiatan serta pencapaian indikator tujuan dan sasaran; dan
4. Pembangunan Daerah yang dilaksanakan merupakan hasil dari program dan kegiatan sesuai dengan visi misi kepala daerah.

## 1.3 Metodologi

Terdapat 4 (empat) tahapan dalam proses evaluasi Indikator Kinerja Daerah (IKD) level tujuan, yaitu:

1. Melakukan studi pustaka dengan sumber jurnal, produk kebijakan terkait evaluasi kinerja dan penentuan IKU dan IKS dalam P-RKPD pada level kabupaten/kota, dan dokumen kajian dari OPD terkait untuk membentuk pola pikir dan teknik analisis kajian, mencari studi kasus serupa sebagai *benchmark*, dan mengidentifikasi target Perubahan RKPD Kota Mojokerto Tahun 2024.



2. Menginventarisasi data capaian kinerja Pemerintah Kota Mojokerto meliputi nilai realisasi IKU dan IKS hingga program Perubahan RKPD Kota Mojokerto Tahun 2024. Data yang digunakan selengkapnya disajikan pada **Tabel 1.1**.

**Tabel 1. 1** Inventarisasi Data Capaian Kerja

No	Data atau Dokumen	Substansi yang diperlukan	Sumber Data
1	Perubahan RKPD Kota Mojokerto Tahun 2024 dan RPD Kota Mojokerto Tahun 2024-2026	Target IKU dan IKD Kota Mojokerto tahun 2024 & 2025	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kota Mojokerto
2	LKPJ/LKjiP Kota Mojokerto tahun 2020-2024	Realisasi IKU, IKS, dan program Kota Mojokerto tahun 2020-2024	Sekretariat Daerah Kota Mojokerto
		Faktor pendorong dan penghambat realisasi program RPD tahun 2024	
3	LPPD Kota Mojokerto tahun 2024	Realisasi serapan anggaran kegiatan dan program P-RKPD Kota Mojokerto tahun 2024	Sekretariat Daerah Kota Mojokerto
4	Dashboard online	Realisasi program P-RKPD Kota Mojokerto tahun 2024	Seluruh OPD Kota Mojokerto
		Faktor pendorong dan penghambat realisasi program P-RKPD Kota Mojokerto tahun 2024	
		Realisasi/serapan anggaran kegiatan dan program P-RKPD Kota Mojokerto tahun 2024	

Sumber : Tim Penyusun, 2025

3. Mengolah data yang telah didapatkan melalui beberapa metode diantaranya:
- 1) **Statistika deskriptif**, eksplorasi data dan penyajian data bentuk numerik dan gambar. Penyajian numerik berupa ukuran penyebaran dan ukuran pemusatan yang serta angka indeks. Ukuran pemusatan berupa nilai rata-rata, sedangkan ukuran penyebaran berupa nilai ragam dalam bentuk persentase (%) capaian kerja. Sementara penyajian dalam gambar berupa tabel, dan grafik. Dalam tahap ini pula pada penilaian IKU dan IKS dihasilkan tiga kategori tingkat capaian kinerja, yakni:
    - **Belum tercapai**, apabila nilai evaluasi yang dihasilkan <100%;
    - **Tercapai**, apabila nilai evaluasi yang dihasilkan =100%; dan
    - **Melampaui**, apabila nilai evaluasi yang dihasilkan >100%.

Kategori penilaian indikator kinerja program dan tingkat serapan anggaran dalam program P-RKPD yang sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (lihat pada Tabel 1.2)

**Tabel 1. 2** Evaluasi Bersama Capaian Kinerja Program dan Penyerapan Anggaran

		Penyerapan Anggaran				
		Sangat Tinggi ≥ 91%	Tinggi 76%-90%	Sedang 66%-75%	Rendah 51%-65%	Sangat Rendah ≤ 50%
Capaian Kinerja	Sangat Tinggi ≥ 91%	SB	B	C	C	KB
	Tinggi 76%-90%	B	B	C	C	KB
	Sedang 66%-75%	C	C	C	KB	KB
	Rendah 51%-65%	C	C	KB	KB	SKB
	Sangat Rendah ≤ 50%	KB	KB	KB	SKB	SKB

Sumber : Diadopsi dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017

Dimana untuk keterangan pada tiap evaluasi antara lain:

**SB** : Sangat Baik

**B** : Baik

**C** : Cukup

**KB** : Kurang Baik

**SKB** : Sangat Kurang Baik

Dalam penilaian kinerja tersebut, gradasi nilai (skala intensitas) kinerja suatu indikator dapat dimaknai sebagai berikut:

○ **Hasil Sangat Tinggi dan Tinggi**

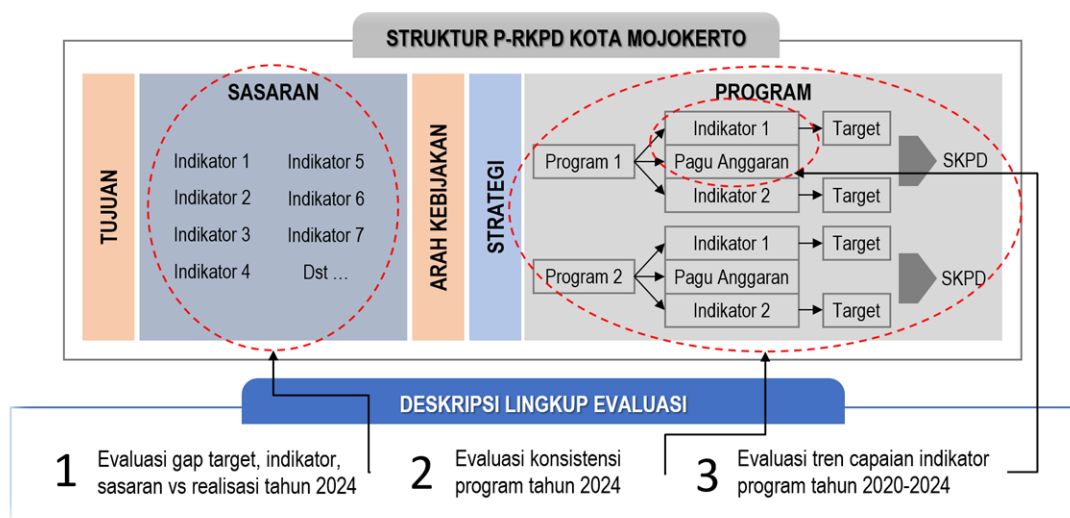
Gradasi ini menunjukkan pencapaian/realisasi kinerja capaian telah memenuhi target dan berada diatas persyaratan minimal kelulusan penilaian kinerja.

- **Hasil Sedang**

Gradasi cukup menunjukkan pencapaian/realisasi kinerja capaian telah memenuhi persyaratan minimal.

- **Hasil Rendah dan Sangat Rendah**

Gradasi ini menunjukkan pencapaian/realisasi kinerja capaian belum memenuhi/masih dibawah persyaratan minimal pencapaian kinerja yang diharapkan.



**Gambar 1. 1 Metode dan Lingkup Analisis Indeks Kinerja Daerah (IKD) Level Tujuan, Sasaran dan Program Kota Mojokerto.**

Sumber : Tim Penyusun, 2025

2) **Analisis tren dan skenario** untuk mendapatkan data proyeksi tahun mendatang. Penentuan analisis ini didasarkan pada jumlah peningkatan maupun penurunan ( $\Delta = \text{delta}$ ) capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) selama tahun 2020-2023. Dalam tahap ini, dihasilkan tiga jenis skenario berdasarkan tingkat peningkatan dan penurunan kinerja (pesimis, *moderate* dan optimis) serta tiga kelompok rekomendasi, yaitu:

- **Dipertahankan**, realisasi tahun 2023 dan hasil prediksi telah melampaui target 2024;
- **Perlu ditingkatkan**, realisasi tahun 2023 dan hasil prediksi mendekati atau sama dengan target 2024;
- **Perlu perhatian khusus**, realisasi tahun 2023 dan hasil prediksi jauh dibawah target 2024 sehingga diperlukan upaya sangat besar untuk mencapai target yang ditentukan.

Perhitungan prediksi untuk skenario (pesimis, *moderate*, dan optimis) untuk nilai realisasi dari indikator-indikator yang nilainya semakin tinggi semakin baik (*higher better*) dapat disajikan pada **Gambar 1.2**, sedangkan perhitungan prediksi untuk skenario (pesimis, *moderate*, dan optimis) untuk nilai realisasi dari indikator-indikator yang nilainya semakin rendah semakin baik (*lower better*) dapat disajikan pada **Gambar 1.3**.

Indikator Kinerja Utama	Kondisi Tahun	Realisasi				Peningkatan atau Penurunan			
	2020	2021	2022	2023	2024	$\Delta 1$	$\Delta 2$	$\Delta 3$	$\Delta 4$
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g = c - b)	(h = d - c)	(i = e - d)	(j = f - e)
Indeks Pembangunan Manusia	78,95	79,34	80,19	80,90	81,76	0,39	0,85	0,71	0,86

Indikator Kinerja Utama	Realisasi			Target 2025	Prediksi
	Pesimis	Moderate	Optimis		
	(f) + minimum (g,h,i,j)	(f) + rata-rata (g,h,i,j)	(f) + maksimum (g,h,i,j)		
Indeks Pembangunan Manusia	82,15	82,46	82,62	81,38	Melampaui

**Gambar 1. 2** Ilustrasi Penentuan Prediksi Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2025 untuk Indikator *Higher Better*.

Sumber : Tim Penyusun, 2025

Indikator Kinerja Utama	Kondisi Tahun	Realisasi					Peningkatan atau Penurunan			
	2020	2021	2022	2023	2024	$\Delta 1$	$\Delta 2$	$\Delta 3$	$\Delta 4$	
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g = c - b)	(h = d - c)	(i = e - d)	(j = f - e)	
Indeks Gini	0,355	0,334	0,381	0,353	0,357	-0,021	0,047	-0,028	0,004	

Indikator Kinerja Utama	Realisasi			Target 2025	Prediksi
	Pesimis	Moderate	Optimis		
	(f) + maksimum (g,h,i,j)	(f) + rata-rata (g,h,i,j)	(f) + minimum (g,h,i,j)		
Indeks Gini	0,336	0,329	0,31	0,352	Melampaui

**Gambar 1. 3** Ilustrasi Penentuan Prediksi Capaian IKU Tahun 2025 untuk Indikator *Lower Better*.

Sumber : Tim Penyusun, 2025

4. Menyusun dokumen laporan hasil analisis dilakukan secara sistematis berdasarkan struktur isi dokumen P-RKPD Kota Mojokerto tahun 2024, mulai dari capaian tujuan, sasaran dan program. Dokumen yang dihasilkan meliputi Laporan Pendahuluan dan Laporan Akhir. Laporan Pendahuluan berisi tentang metodologi dan rencana kerja yang akan dilakukan selama kajian berlangsung, sedangkan Laporan Akhir memuat tentang hasil analisis, kesimpulan dan rekomendasi dari hasil kajian yang telah dilaksanakan.

## 1.4 Ruang Lingkup Pekerjaan

Dalam Kegiatan Pendampingan Jasa Konsultansi Penyusunan Buku Indikator Kinerja Utama Pemerintah Daerah Kota Mojokerto Tahun 2025, ruang lingkup pekerjaan sebagai berikut.

1. Melakukan pengumpulan data Indikator Kinerja Utama (IKU) pada level tujuan dan sasaran Pemerintah Kota Mojokerto 2024 sesuai yang tertuang dalam P-RKPD Kota Mojokerto Tahun 2024;
2. Data IKU yang dikumpulkan merupakan data target dan capaian tahun 2024. Disamping itu juga dikumpulkan data program/kegiatan yang bersesuaian dengan IKU tujuan dan sasaran beserta indikator kinerjanya. Dikumpulkan juga data-data pendukung lainnya untuk memperjelas capaian IKU melalui data sekunder Perangkat Daerah di Kota Mojokerto;
3. Melakukan analisis evaluasi capaian IKU pada level tujuan dan sasaran untuk mendapatkan akar masalah atau faktor-faktor yang mempengaruhi capaian IKU Pemerintah Kota Mojokerto tahun 2024. Analisis yang tajam yang akan dipergunakan sebagai masukan bagi kebijakan Pemerintah Kota Mojokerto;
4. Melakukan diskusi terfokus (*Focus Group Discussion: FGD*) bersama Diskominfo dan Perangkat Daerah atau instansi terkait dalam pengumpulan data dan membahas hasil analisis evaluasi capaian IKU pada level tujuan dan sasaran Pemerintah Kota Mojokerto Tahun 2024;
5. Menyusun Laporan Penyusunan IKU Pemerintah Kota Mojokerto dan diunggah ke website: [satikomo.mojokertokota.go.id](http://satikomo.mojokertokota.go.id);
6. Mempertanggungjawabkan dan melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan dan/atau tugas kepada Walikota Mojokerto; dan
7. Melakukan pelaporan hasil pelaksanaan kegiatan melalui Sosialisasi Buku Indikator Kinerja Utama Pemerintah Daerah Kota Mojokerto Tahun 2025.

## 1.5 Sistematika Pelaporan

Sistematika penulisan dalam kegiatan Penyusunan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Daerah (IKUPD) Kota Mojokerto 2025 meliputi:

- **Bab I Pendahuluan:** berisi tentang latar belakang, manfaat, tujuan, sasaran, luaran, metodologi, dan ruang lingkup kegiatan Penyusunan IKUPD Kota Mojokerto tahun 2025.
- **Bab II Tinjauan Pustaka:** berisi tentang tinjauan konsep kinerja penyelenggaraan Pemerintah Daerah, tingkat kinerja Pemerintah Daerah, tujuan dan manfaat pengukuran kinerja serta *review* IKU Pemerintah Daerah.
- **Bab III P-RKPD Kota Mojokerto Tahun 2024:** meliputi tujuan, sasaran, serta IKU dan IKS sesuai P-RKPD Kota Mojokerto Tahun 2024.
- **Bab IV Hasil Analisis:** berisi tentang perkembangan realisasi IKU dan IKS Pemerintah Daerah Kota Mojokerto selama tahun 2020 hingga 2024, hasil evaluasi capaian target selama tiga tahun terakhir, evaluasi program dan serapan anggaran program tahun 2024 serta prediksi capaian IKU pada tahun 2025.
- **Bab V Penutup:** memuat informasi mengenai kesimpulan dan rekomendasi untuk penentuan kebijakan tahun berikutnya.

## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### 2.1 Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008, menyebutkan bahwa Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah adalah capaian atas penyelenggaraan urusan pemerintah daerah yang diukur dari masukan, proses, keluaran, hasil, manfaat, dan/atau dampak. Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah selanjutnya disingkat EKPPD adalah suatu proses pengumpulan dan analisis data secara sistematis terhadap kinerja penyelenggaraan Pemerintah Daerah dengan menggunakan sistem pengukuran kinerja.

Karakteristik kinerja pemerintah daerah, dapat dikelompokkan menjadi enam (Mahsun, 2012).

1. Indikator masukan (*input*)  
Merupakan masukan atau segala yang dibutuhkan agar dapat melaksanakan kegiatan seperti anggaran, sumber daya manusia, peralatan, dan material.
2. Indikator proses (*process*)  
Merupakan ukuran kegiatan, baik dari segi kecepatan, ketepatan, maupun tingkat akurasi pelaksanaan kegiatan tersebut. Misalnya: ketaatan pada peraturan perundangan dan rata-rata yang diperlukan untuk memproduksi atau menghasilkan layanan jasa.
3. Indikator keluaran (*output*)  
Indikator ini merupakan hasil baik fisik maupun non-fisik, berupa perbandingan apakah kegiatan telah terlaksana sesuai dengan rencana awal atau belum sesuai dengan rencana pada pelaksanaannya.
4. Indikator hasil (*outcomes*)  
Merupakan timbal balik dari keluaran, menunjukkan bagaimana tingkat pencapaian yang lebih tinggi mencakup kepentingan banyak pihak. Karena jika *output* tercapai, belum tentu memberi *outcome* yang diinginkan. Organisasi dapat mengetahui seberapa besar hasil *output* dapat berdampak pada orang banyak.
5. Indikator manfaat



Menggambarkan manfaat yang didapatkan dari pelaksanaan kegiatan. Indikator ini akan terlihat beberapa waktu kemudian, diharapkan menunjukkan hal yang diselesaikan dan berfungsi dengan optimal (tepat lokasi dan waktu).

#### 6. Dampak (*impact*)

Menggambarkan dampak positif maupun negatif yang diberikan dari pelaksanaan kegiatan baik secara langsung maupun tidak langsung. Contohnya: peningkatan pendapatan masyarakat, peningkatan nilai taraf kesejahteraan masyarakat, dan peningkatan peluang investasi terhadap pembangunan daerah.

## 2.2 Tingkatan Kinerja Pemerintah Daerah

Tingkatan kinerja pemerintah daerah menurut Soleh dan Suropto (Lorenza, 2019) dapat dibagi menjadi tiga, yaitu:

#### 1. Kinerja Kebijakan

Kinerja Kebijakan ini menjadi tanggung jawab Kepala Daerah dan DPRD, karena kedua institusi tersebut yang menentukan dan mengambil kebijakan daerah. Umumnya, kepala daerah mengajukan Rancangan Kebijakan (Peraturan Daerah) dan DPRD yang membahas dan menyetujuinya, atau sebaliknya Rancangan Peraturan Daerah lahir atas inisiatif DPRD dan kepala daerah yang membahas dan menyetujuinya.

#### 2. Kinerja Program

Apabila Kinerja Kebijakan menjadi tanggungjawab Kepala Daerah dan DPRD, maka kinerja program menjadi tanggung jawab dari para kepala satuan kerja perangkat Daerah (SKPD). Sebagaimana diketahui bahwa program pada dasarnya merupakan instrumen dari kebijakan, dan oleh karenanya program yang disusun untuk melaksanakan suatu kebijakan, haruslah program yang sudah diperhitungkan secara matang, sehingga dengan dilaksanakan program tersebut tujuan/sasaran kebijakan akan dapat dicapai secara efektif dan efisien.

#### 3. Kinerja Kegiatan

Kegiatan adalah bagian dari program, dengan demikian satu program dapat terdiri atas satu atau lebih kegiatan. Apabila Kepala Daerah dan DPRD bertanggungjawab atas benar/salahnya suatu kebijakan dan kepala SKPD bertanggung jawab atas tepat atau tidaknya program dan implementasinya, maka para kepala sub bagian, kepala bidang dan atau para kepala urusan bertanggungjawab atas terlaksana tidaknya suatu kegiatan.

## 2.3 Tujuan dan Manfaat Pengukuran Kinerja

Menurut Mardiasmo (2016) tujuan pengukuran kinerja adalah sebagai berikut:

- a. Mengkomunikasikan strategi dengan baik melalui mekanisme *top down* dan *bottom up*;
- b. Mengukur kinerja dari aspek finansial dan non-finansial, sehingga dapat memantau perkembangan pembangunan;
- c. Mengakomodasi pemahaman manajer bawah dan menengah serta motivasi untuk mencapai kesesuaian tujuan; dan
- d. Mencapai kepuasan individu dan kolektif (kelompok) secara rasional karena tercapainya tujuan organisasi.

Mardiasmo (2016) mengungkapkan manfaat dari pengukuran kinerja secara umum sebagai berikut:

- a. Memahami ukuran kinerja yang akan digunakan manajer;
- b. Memberi arah pencapaian kinerja dari kegiatan yang telah ditetapkan;
- c. Memonitor, dan mengevaluasi, serta membandingkan capaian kinerja dengan target kinerja, sehingga dapat langsung melakukan perbaikan kinerja untuk kemudian hari;
- d. Sebagai dasar pemberian *reward and punishment* secara objektif sesuai kesepakatan kinerja;
- e. Sarana komunikasi antara bawahan dan pimpinan untuk memperbaiki kinerja;
- f. Mengidentifikasi apakah masyarakat merasa puas dengan kinerja pemerintah;
- g. Memahami proses kegiatan instansi pemerintah; dan
- h. Memastikan pengambilan keputusan dilakukan secara objektif.

Menurut Soleh dan Suropto (Ferlia, 2017) manfaat pengukuran kinerja pemerintah daerah di bagi menjadi enam bagian yaitu sebagai berikut:

- a. Sebagai umpan balik bagi Kepala Daerah untuk memperbaiki kinerja Pemerintah Daerah dimasa yang akan datang;
- b. Untuk menemukan kembali SKPD mana yang memberikan kontribusi terbesar dan SKPD mana yang kurang dalam memberikan kontribusi terhadap proses pencapaian visi Kepala Daerah serta mengidentifikasi berbagai faktor penyebab keberhasilan dan kurang berhasil dari setiap SKPD;
- c. Untuk membangkitkan motivasi kerja Kepala SKPD dan jajarannya agar bekerja lebih produktif;

- d. Untuk merumuskan kembali kebijakan, program dan kegiatan yang dinilai lebih efektif berikut penganggarnya serta metode/teknik pelaksanaan yang lebih efisien dalam proses pencapaian visi;
- e. Melalui laporan kinerja, pemerintah daerah menginformasikan tingkat keberhasilan/kegagalannya secara jujur serta menjelaskan berbagai faktor kegagalannya baik kepada masyarakat, kepada para pemberi donasi, kepada DPRD dan kepada pemerintah tingkat di atasnya; dan
- f. Meningkatkan derajat kepercayaan kepada masyarakat, bahwa dana publik yang dipercayakan kepadanya, telah dipergunakan sesuai amanat yang diberikan.

## 2.4 Indikator Kinerja Utama dan Indikator Kinerja Sasaran

Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah indikator kinerja dari misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih yang digunakan sebagai alat ukur kuantitatif untuk mengetahui dampak dari pembangunan daerah yang telah dilaksanakan. IKU berfungsi untuk memberikan gambaran atas pencapaian visi dan misi Kepala Daerah selama masa jabatannya. Oleh karena itu, IKU merupakan bagian dari Indikator Kinerja Daerah yang menunjukkan kondisi ideal yang ingin dicapai pada akhir periode perencanaan, seperti P-RKPD atau dokumen perencanaan lainnya. Keberhasilan IKU tercermin melalui capaian kinerja pada aspek kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum, dan daya saing daerah.

Indikator Kinerja Sasaran (IKS) adalah indikator turunan dari misi Kepala Daerah yang berasal dari indikator sasaran pembangunan daerah. IKS mengukur pencapaian kinerja berdasarkan sasaran-sasaran yang telah dirumuskan dalam dokumen perencanaan strategis. Indikator ini merupakan *outcome* dari proses pembangunan yang lebih teknis dan operasional dibandingkan IKU, serta menjadi bagian dari akumulasi capaian yang menunjukkan keberhasilan misi Kepala Daerah. Dengan demikian, pencapaian IKS setiap tahunnya memberikan kontribusi langsung terhadap pencapaian IKU secara keseluruhan.

## BAB III

### P-RKPD KOTA MOJOKERTO TAHUN 2024

Dalam bab ini dijabarkan mengenai tujuan, sasaran dan program target capaian indikator kinerja daerah pada dokumen P-RKPD Kota Mojokerto Tahun 2024 yang tertuang dalam Peraturan Walikota Mojokerto Nomor 16 Tahun 2024 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Mojokerto Tahun 2024.

#### 3.1 Prioritas dan Sasaran Pembangunan Tahun 2024

Penetapan prioritas dan sasaran pembangunan tidak terlepas dari analisis *top down* dari level pusat, provinsi sampai dengan daerah. Hal ini dilakukan sebagai jaminan bahwa amanat mandatori dari pusat maupun provinsi telah diakomodir oleh masing-masing daerah untuk mewujudkan pembangunan yang simultan dan integratif di segala level pemerintahan. Oleh karena itu, pada penentuan prioritas dan sasaran pembangunan Kota Mojokerto di tahun 2024 ini pun perlu untuk mempertimbangkan prioritas dan sasaran nasional serta provinsi.

Sebagaimana yang telah ditetapkan Presiden sebagai 5 (lima) arahan utama strategi dalam pelaksanaan misi Nawacita dan pencapaian Visi Indonesia 2045 yakni mencakup Pembangunan Sumber Daya Manusia, Pembangunan Infrastruktur, Penyederhanaan Regulasi, Penyederhanaan Birokrasi dan Transformasi Ekonomi. Yang selanjutnya diterjemahkan kedalam 7 agenda pembangunan yang menjadi prioritas dengan sasaran sebagai berikut :

##### 1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan

Pembangunan ekonomi akan dipacu untuk tumbuh lebih tinggi, inklusif dan berdaya saing melalui:

- Pengelolaan sumber daya ekonomi yang mencakup pemenuhan pangan dan pertanian serta pengelolaan kemaritiman, kelautan dan perikanan, sumber daya air, sumber daya energi serta kehutanan; dan
- Akselerasi peningkatan nilai tambah pertanian dan perikanan, kemaritiman, energi, industri, pariwisata, serta ekonomi kreatif dan digital.

##### 2. Pengembangan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan

Pengembangan wilayah yang mampu menciptakan berkelanjutan dan inklusif melalui:

- Pengembangan sektor/ komoditas/ kegiatan unggulan daerah;

- Penyebaran pusat-pusat pertumbuhan ke wilayah yang belum berkembang;
- Penguatan kemampuan SDM dan IPTEK berbasis keunggulan wilayah;
- Peningkatan infrastruktur dan pelayanan dasar secara merata; dan
- Peningkatan daya dukung lingkungan serta ketahanan bencana dan perubahan iklim.

### **3. Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing**

Peningkatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia yaitu manusia yang sehat dan cerdas, adaptif, inovatif, terampil dan berkarakter, melalui :

- Pengendalian penduduk dan penguatan tata kelola kependudukan;
- Penguatan pelaksanaan perlindungan sosial;
- Peningkatan pelayanan kesehatan menuju cakupan kesehatan semesta;
- Peningkatan pemerataan layanan pendidikan berkualitas;
- Peningkatan kualitas anak, perempuan dan pemuda;
- Pengentasan kemiskinan; dan
- Peningkatan produktivitas dan daya saing.

### **4. Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan**

Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan dilaksanakan secara terpadu, melalui :

- Revolusi mental dan pembinaan ideologi Pancasila;
- Pemajuan dan pelestarian kebudayaan;
- Moderasi beragama, dan;
- Penguatan budaya literasi, inovasi dan kreativitas.

### **5. Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar**

Perkuatan infrastruktur ditujukan untuk mendukung aktivitas perekonomian serta mendorong pemerataan pembangunan nasional, melalui :

- Pembangunan infrastuktur pelayanan dasar;
- Pembangunan konektivitas multimoda untuk mendukung pertumbuhan ekonomi;
- Pembangunan infrastruktur perkotaan;
- Pembangunan energi dan ketenagalistrikan; dan
- Pembangunan dan pemanfaatan infrastuktur TIK untuk transformasi digital.

### **6. Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim**

Pembangunan lingkungan hidup, serta peningkatan ketahanan bencana dan perubahan iklim diarahkan melalui:

- Peningkatan kualitas lingkungan hidup;

- Peningkatan ketahanan bencana dan perubahan iklim;
- Pembangunan rendah karbon.

#### 7. Memperkuat stabilitas POLHUKHANKAM dan transformasi pelayanan publik.

Negara wajib hadir dalam melayani dan melindungi segenap bangsa, serta menegakkan kedaulatan negara, melalui:

- Reformasi kelembagaan birokrasi untuk pelayanan publik berkualitas;
- Penataan kapasitas lembaga demokrasi, penguatan kesetaraan dan kebebasan;
- Perbaikan sistem peradilan, penataan regulasi dan tata kelola keamanan siber;
- Peningkatan akses terhadap keadilan dan sistem anti korupsi;
- Peningkatan pelayanan dan perlindungan WNI di luar negeri; dan
- Peningkatan rasa aman, penguatan kemampuan pertahanan dan Industri Pertahanan

Pada level provinsi, sebagaimana yang telah ditetapkan Gubernur Jawa Timur dalam pelaksanaan 9 Program Kerja Nawa Bhakti Satya yang mencakup :

1. Bhakti-1, Jatim Sejahtera : Mengentaskan kemiskinan menuju keadilan dan kesejahteraan sosial;
2. Bhakti-2, Jatim Kerja : Memperluas lapangan pekerjaan dan membangun keunggulan ekonomi;
3. Bhakti-3, Jatim Cerdas dan Sehat : Pendidikan dan kesehatan gratis berkualitas;
4. Bhakti-4, Jatim Akses : membangun infrastruktur dalam rangka pembangunan wilayah terpadu dan keadilan akses bagi masyarakat pesisir dan desa terluar
5. Bhakti-5, Jatim Berkah : Membangun karakter masyarakat yang berbasis nilai-nilai kesalehan sosial, budi pekerti luhur dan berintegritas;
6. Bhakti-6, Jatim Agro : Memajukan sektor pertanian, peternakan, perikanan, kehutanan, perkebunan untuk mewujudkan kesejahteraan petani dan nelayan;
7. Bhakti-7, Jatim Berdaya : Memperkuat ekonomi kerakyatan dengan basis UMKM, koperasi, BUMDesa dan mendorong terciptanya desa mandiri;
8. Bhakti-8, Jatim Amanah : Menyelenggarakan pemerintahan yang bersih, efektif, transparan dan anti korupsi;
9. Bhakti-9, Jatim Harmoni : Mewujudkan harmoni sosial, alam dan lingkungan hidup serta melestarikan kebudayaan dan mengembangkan budaya olah raga.

Untuk tahun 2024, tema pembangunan di Provinsi Jawa Timur adalah Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Percepatan Pemulihan Ekonomi melalui Transformasi Ekonomi Inklusif menuju Masyarakat Jawa Timur yang Adil, Sejahtera, Unggul dan Berakhlak. Tema

pembangunan tersebut selanjutnya diterjemahkan kedalam 7 (tujuh) prioritas pembangunan Provinsi Jawa Timur Tahun 2023 sebagai berikut :

1. Pemulihan ekonomi kerakyatan melalui peningkatan nilai tambah sektor sekunder dan pariwisata;
2. Penguatan konektivitas antar wilayah dalam upaya pemerataan hasil pembangunan serta peningkatan layanan infrastruktur;
3. Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, produktivitas dan daya saing ketenagakerjaan serta pengentasan kemiskinan;
4. Peningkatan kepedulian sosial dan pelestarian nilai-nilai budaya lokal;
5. Peningkatan kemandirian pangan dan pengelolaan sumber daya energi;
6. Peningkatan ketahanan bencana dan kualitas lingkungan hidup;
7. Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur.

Berpedoman dan selaras dengan RKP Tahun 2024 dan RKPD Provinsi Jawa Timur Tahun 2024, maka dirumuskan prioritas pembangunan Kota Mojokerto tahun 2024, sebagai berikut:

1. Peningkatan ketahanan keluarga melalui pendampingan untuk mencapai zero stunting dan penurunan kemiskinan ekstrim;
2. Optimalisasi program pemberdayaan masyarakat rentan berbasis potensi untuk kelompok rentan;
3. Menurunkan tingkat ketergantungan ekonomi;
4. Pemerataan perlindungan sosial untuk masyarakat rentan (PPKS);
5. Pengembangan destinasi wisata yang terintegrasi berbasis kearifan lokal;
6. Kolaborasi stakeholder dalam pengembangan BUMD;
7. Peningkatan kualitas dan profesionalitas ASN melalui penerapan sistem merit;
8. Peningkatan PAD melalui intensifikasi Pajak Daerah, Pemanfaatan Aset dan penggunaan teknologi;
9. Transformasi tata kelola pemerintahan berbasis 8 area perubahan reformasi birokrasi;
10. Memunculkan nilai ekonomi dalam pengelolaan sampah yang berbasis pemberdayaan masyarakat;
11. Stabilitas sosial politik dalam penyelenggaraan pemilu.



3.2 Keterkaitan Prioritas Pembangunan Kota Mojokerto dengan Nasional dan Provinsi Jawa Timur

Dalam penetapan prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2024, telah diselaraskan dengan kebijakan pembangunan jangka menengah daerah (Perubahan RPJMD Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024), mendukung prioritas pembangunan Nasional Tahun 2024, serta diharapkan mampu menjawab permasalahan dan isu strategis daerah. Penyusunan prioritas pembangunan daerah tahun 2024 juga dilakukan dengan memperhatikan korelasi terhadap tema pembangunan tahun 2024. Keselarasan arah kebijakan RPD dan prioritas pembangunan tahun 2024 dapat dijabarkan pada tabel berikut :

Tabel 3. 1 Arah Kebijakan RPD dan Prioritas Pembangunan Kota Mojokerto Tahun 2024

Arah Kebijakan RPD Tahun 2024	Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2024
Menguatkan ketahanan ekonomi Kota melalui optimalisasi potensi sektor pariwisata dan ekonomi kreatif yang didukung dengan pembangunan infrastruktur berkelanjutan serta transformasi tata kelola pemerintahan	<div>1. Peningkatan ketahanan keluarga melalui pendampingan untuk mencapai zero stunting dan penurunan kemiskinan ekstrim</div> <div>2. Optimalisasi program pemberdayaan berbasis potensi untuk kelompok rentan</div> <div>3. Menurunkan tingkat ketergantungan ekonomi</div> <div>4. Pemerataan perlindungan sosial untuk masyarakat rentan (PPKS)</div> <div>5. Pengembangan destinasi wisata yang terintegrasi berbasis kearifan lokal</div> <div>6. Kolaborasi stakeholder dalam pengembangan BUMD</div> <div>7. Peningkatan kualitas dan profesionalitas ASN melalui penerapan sistem merit</div> <div>8. Peningkatan PAD melalui intensifikasi Pajak Daerah, Pemanfaatan Aset dan penggunaan teknologi</div> <div>9. Transformasi tata kelola pemerintahan berbasis 8 area perubahan reformasi birokrasi</div> <div>10. Memunculkan nilai ekonomi dalam pengelolaan sampah yang berbasis pemberdayaan masyarakat</div> <div>11. Stabilitas sosial politik dalam penyelenggaraan pemilu</div>

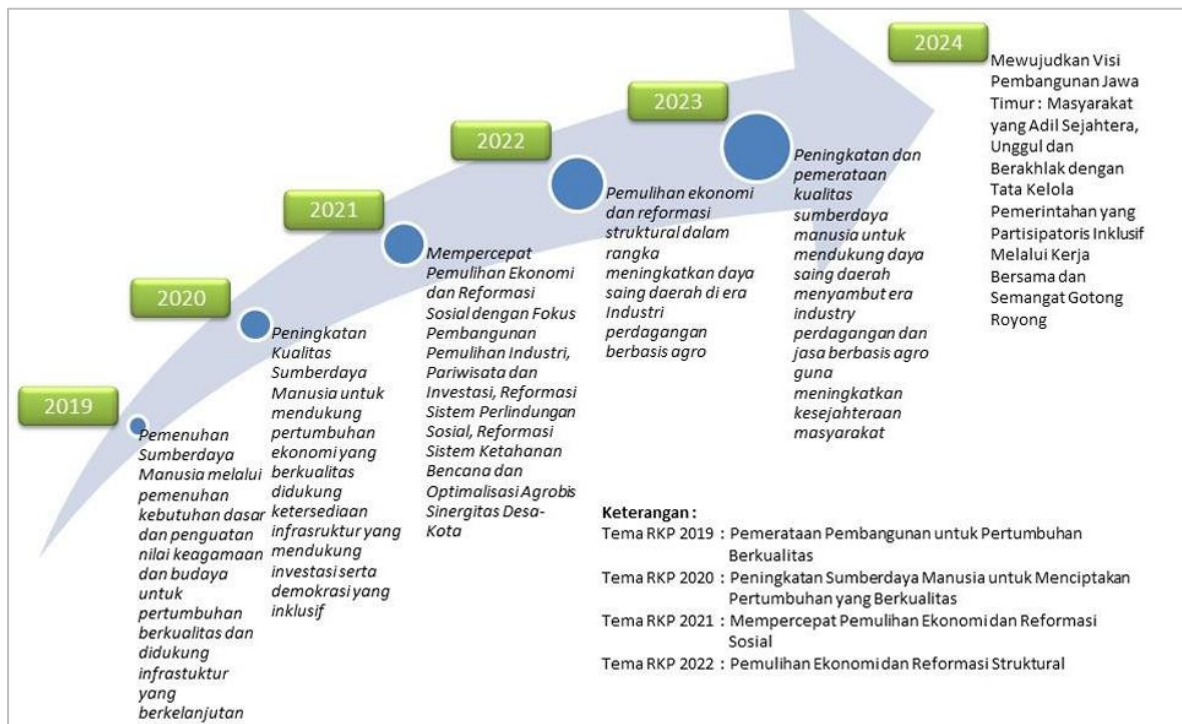
Sumber: P-RKPD Kota Mojokerto Tahun 2024

Pemerintah pusat pada Rencana Kerja Pemerintah tahun 2024 mengusung tema pembangunan “Mempercepat Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan”. Tema tersebut selaras dengan delapan arah kebijakan nasional yang meliputi:

1. Pengurangan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem;
2. Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dan pendidikan;
3. Revitalisasi industri dan penguatan riset terapan;
4. Penguatan daya saing usaha;
5. Pembangunan rendah karbon dan transisi energi;

6. Percepatan pembangunan infrastruktur dasar dan konektivitas;
7. Percepatan pembangunan Ibu Kota Nusantara; dan
8. Pelaksanaan Pemilu 2024.

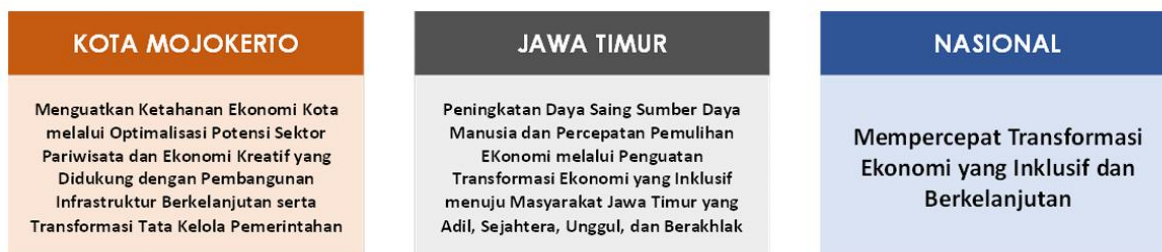
Sebagaimana tertuang dalam Perubahan RPJMD Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 2024, arah kebijakan provinsi Jawa Timur tahun 2024 telah selaras dengan arah pembangunan nasional tahun 2024. Arah kebijakan provinsi Jawa Timur tahun 2024 adalah "Masyarakat yang Adil Sejahtera, Unggul dan Berakhlak dengan Tata Kelola Pemerintahan yang Partisipatoris Inklusif Melalui Kerja Bersama dan Semangat Gotong Royong". Mengacu pada arah kebijakan Jawa Timur tersebut, tema pembangunan tahun 2024 yang diusung oleh provinsi adalah *"Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Percepatan Pemulihan Ekonomi melalui Transformasi Ekonomi Inklusif menuju Masyarakat Jawa Timur yang Adil, Sejahtera, Unggul dan Berakhlak"*



**Gambar 3. 1** Arah Kebijakan Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024

Sumber: RPJMD Jawa Timur Tahun 2019-2024

Adapun Kota Mojokerto pada tahun 2024 mengusung tema pembangunan “Menguatkan Ketahanan Ekonomi Kota melalui Optimalisasi Potensi Sektor Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang Didukung dengan Pembangunan Infrastruktur Berkelanjutan serta Transformasi Tata Kelola Pemerintahan”. Tema tersebut selaras dengan tema nasional dan provinsi yang berpijak pada produktivitas, kualitas SDM dan daya saing.



**Gambar 3. 2** Keselarasan Tema Pembangunan Kota Mojokerto, Jawa Timur dan Nasional Tahun 2024

Sumber: P-RKPD Kota Mojokerto Tahun 2024

Keselaran pembangunan antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota menjadi salah satu kunci dari kesuksesan pembangunan. Setiap tingkat memiliki wewenang yang berbeda namun berada dalam satu kesatuan agenda pembangunan. Untuk itulah linieritas prioritas pembangunan nasional, provinsi, dan kabupaten/kota ini sangat penting untuk dilihat dalam perencanaan pembangunan. **Tabel 3.2** berikut mengilustrasikan linieritas tema dan prioritas pembangunan tersebut.

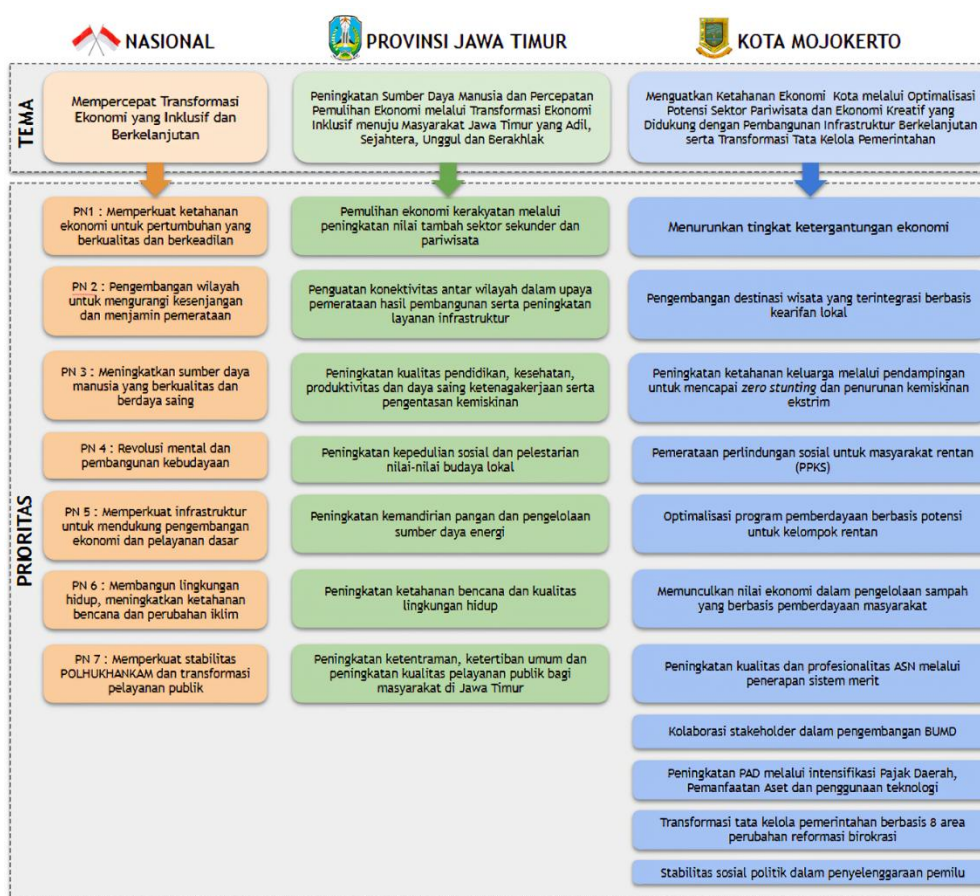
Adanya linieritas tema dan prioritas pembangunan membuat indikator sasaran pembangunan Kota Mojokerto, Provinsi Jawa Timur, dan Nasional juga selaras. Keselarasan tersebut terdapat pada lima indikator makro pembangunan yang meliputi pertumbuhan ekonomi, Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), Persentase Penduduk Miskin, dan Gini Rasio, seperti disajikan pada **Tabel 3.3**. **Tabel 3.4** menunjukkan keselarasan tersebut dan target untuk tahun 2024 pada setiap tingkatan.

**Tabel 3. 2** Keselarasan Sasaran Pembangunan Kota Mojokerto dengan Sasaran Pembangunan Nasional dan Provinsi Jawa Timur Tahun 2024

No	Indikator Makro	Satuan	Nasional	Jawa Timur	Kota Mojokerto	
					(Sebelum)	(Sesudah)
1.	Pertumbuhan Ekonomi	%	5,8 - 5,7	4,71 – 6,34	5,6	4,50-4,70
2.	Angka kemiskinan	%	6.5 – 7.5	9,90 – 8.80	5,74	5,57
3.	Indeks Gini	indeks	0.374 – 0,377	0,2943 – 0.3678	0,377	0,353-0,343
4.	IPM	indeks	73.99 – 74,02	72,85 – 74,07	80,17	80,93
5.	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	%	5.0 – 5.7	5,40 – 3,81	4,60	4,60

Sumber: P-RKPD Kota Mojokerto Tahun 2024

Tabel 3. 3 Linieritas Tema Dan Prioritas Pembangunan Tahun 2024



Sumber: P-RKPD Kota Mojokerto Tahun 2024

Tabel 3. 4 Target Capaian Indikator Kinerja Daerah Tahun 2024

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Target 2024		Ket	Sasaran	Indikator Sasaran	Target 2024		Ket
			RKPD	P-RKPD				RKPD	P-RKPD	
1	Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Menuju Taraf Hidup Yang Lebih Baik	Angka Kemiskinan (%)	5,74	5,57	--	Menurunnya Tingkat Pengangguran Masyarakat	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	4,6	4,6	Capaian 2024 sudah melampaui target
						Terhidamnya Masyarakat Dari Kerentanan Ekonomi	Indeks Kedalaman Kemiskinan	0,85	0,74	Capaian 2023 sudah melampaui target 2024
		Indeks Gini	0,377	0,353-0,343	Capaian 2023 sudah melampaui target 2024	Tercukupinya Kebutuhan Pokok	Pendapatan Perkapita/ PDRB Perkapita (Juta Rp)	53,83	59,5	Capaian 2023 sudah melampaui target 2024
						Meningkatnya Kesenjangan Gender Dalam Pembangunan	Indeks Pemberdayaan Gender	70,69	76,5	Capaian 2023 sudah melampaui target 2024
2	Mewujudkan Sumber Daya Manusia Unggul, Bermartabat Dan Berdaya Saing	Indeks Pembangunan Manusia	80,17	80,93	Capaian 2023 sudah melampaui target 2024	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	Indeks Kesehatan	0,828	0,865	Capaian 2023 sudah melampaui target 2024
						Meningkatnya Kualitas Pendidikan Masyarakat	Indeks Pendidikan	0,752	0,763	Capaian 2023 sudah melampaui target 2024
						Meningkatnya Peran Pemuda Dalam Pembangunan	Indeks Pembangunan Pemuda	54,2	54,2	--
						Mewujudkan Masyarakat Bermartabat dan Berbudaya	Indeks Kesalehan Sosial	91,99	95,1	Capaian 2023 sudah melampaui target 2024
3	Meningkatkan Penguatan Ekonomi Berbasis Potensi Daerah dan Investasi	Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,6	4,50-4,70	Capaian 2023 dibawah target 2024	Meningkatnya Produktivitas Sektor Potensial	Pertumbuhan PDRB Sektor Industri Pengolahan (%)	6,08	6,08	--
							Pertumbuhan PDRB Sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi (%)	6,44	6,44	--
						Meningkatnya Daya Saing UMKM	Persentase Pertumbuhan Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil (%)	3,15	3,5	Capaian 2023 sudah melampaui target 2024
						Meningkatnya Daya Saing Pariwisata	Pertumbuhan PDRB Sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum (%)	7,77	9	Capaian 2023 sudah melampaui target 2024
						Meningkatnya Daya Tarik Investasi Daerah	Nilai Realisasi Investasi (Rp)	156.000.000.000	426.000.000.000	Capaian 2023 sudah melampaui target 2024



No	Tujuan	Indikator Tujuan	Target 2024		Ket	Sasaran	Indikator Sasaran	Target 2024		Ket
			RKPD	P-RKPD				RKPD	P-RKPD	
4	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang Dinamis dan Akuntabel	Indeks Reformasi Birokrasi	70,01	87,5	Capaian 2023 sudah melampaui target 2024	Meningkatnya Pelayanan Publik yang Inovatif dan Integratif	Indeks Kepuasan Masyarakat	89,5	90,3	Capaian 2023 sudah melampaui target 2024
							Kepatuhan Standard Pelayanan Publik	65	88,4	Capaian 2023 sudah melampaui target 2024
							Indeks Inovasi Daerah	70,8	84,75	Capaian 2023 sudah melampaui target 2024
							Nilai SPBE	3,4	4,28	Capaian 2023 sudah melampaui target 2024
						Meningkatnya Akuntabilitas Dalam Manajemen Pemerintahan	Nilai SAKIP	70,01	72	Capaian 2023 sudah melampaui target 2024
							Opini BPK	WTP	WTP	--
							Maturitas SPIP	3	3	--
						Meningkatnya Manajemen dan Kapasitas Kepegawaian	Sistem Merit	290	315	Capaian 2023 sudah melampaui target 2024
5	Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup yang Layak	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	60,58	60,58	--	Menurunnya Tingkat Pencemaran Lingkungan	Indeks Kualitas Air	58,96	58,96	--
							Indeks Kualitas Udara	81,1	82,75	Capaian 2023 sudah melampaui target 2024
						Tersedianya Kawasan Permukiman Dengan Layak	Indeks Infrastruktur Permukiman	96,7	98,35	Capaian 2023 sudah melampaui target 2024
						Meningkatnya Kesiapsiagaan Menghadapi Bencana	Indeks Resiko Bencana	134,9	134,9	--

Sumber: P-RKPD Kota Mojokerto Tahun 2024

## BAB IV

### HASIL ANALISIS

#### 4.1 Evaluasi Kinerja Pemerintah Daerah Kota Mojokerto Tahun 2024

Performa kinerja Pemerintah Kota Mojokerto pada tahun 2024 menunjukkan status cukup baik. Hal ini ditunjukkan melalui tiga Indikator Kinerja Utama (IKU) dari enam indikator tujuan yang sudah melampaui target. Sedangkan tiga indikator yang mendekati target, diantaranya: pada tujuan satu dengan indikator tujuan Indeks Gini memiliki ketercapaian 98,88 persen, dan tujuan empat dengan indikator tujuan Indeks Reformasi Birokrasi memiliki ketercapaian 99,37 persen, serta tujuan lima dengan indikator tujuan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup memiliki ketercapaian 94,62 persen. Indikator tujuan yang memiliki performa tertinggi adalah Pertumbuhan Ekonomi dengan ketercapaian sebesar 113,19 persen.

##### 4.1.1 Tujuan 1

Mengacu pada Peraturan Wali Kota Mojokerto Nomor 16 Tahun 2024 mengenai Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Mojokerto Tahun 2024, pencapaian Tujuan 1 dapat dievaluasi melalui indikator tujuan berupa Angka Kemiskinan dan Indeks Gini. Tingkat kemiskinan ini menunjukkan persentase penduduk yang memiliki pengeluaran atau pendapatan dibawah batas garis kemiskinan, yaitu: standar minimum yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan dasar, seperti makanan, pakaian, tempat tinggal, pendidikan, dan layanan kesehatan. Sedangkan Indeks Gini atau Rasio Gini merupakan indikator yang digunakan untuk menilai tingkat ketimpangan distribusi pendapatan atau pengeluaran diantara penduduk di Kota Mojokerto. Kinerja indikator utama serta indikator sasaran dari Tujuan 1 disajikan pada **Tabel 4.1** dan **Tabel 4.2**.

**Tabel 4.1** menunjukkan tren capaian kinerja Angka Kemiskinan dan Indeks Gini di Kota Mojokerto selama empat tahun terakhir sejak 2020. Pada tahun 2024, hasil performa evaluasi kinerja Angka Kemiskinan tercatat sebesar 100,00 persen yang berarti realisasi kinerjanya sudah sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Performa evaluasi kinerja Indeks Gini selama periode yang sama sebesar 98,88 persen, yang berarti capaian ini masih belum melampaui target yang direncanakan.



Tabel 4. 1 Performa Indikator Kinerja Utama (IKU) terhadap Tujuan 1  
Pemerintah Daerah Kota Mojokerto

TUJUAN 1	Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Menuju Taraf Hidup Yang Lebih Baik										
	INDIKATOR TUJUAN : Angka Kemiskinan dan Indeks Gini										
	Kondisi Awal	2021		2022		2023		2024		Evaluasi Tahun 2024	
Indikator Tujuan	2020	T	R	T	R	T	R	T	R	%	Keterangan
Angka Kemiskinan	6,240	5,840-6,040	6,390	5,630-5,830	5,980	5,420-5,620	5,770	5,570	5,570	100,00	<div></div>
Indeks Gini	0,355	0,353	0,334	0,35	0,381	0,348	0,353	0,353-0,343	0,357	98,88	<div></div>

Keterangan :

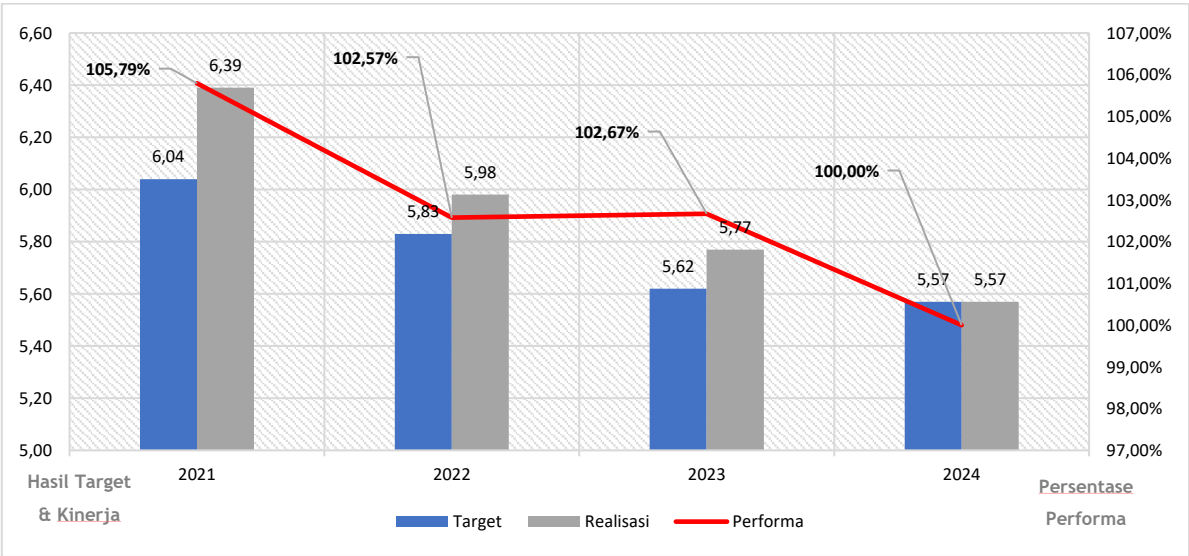
: Melampaui

: Tercapai

: Belum Tercapai

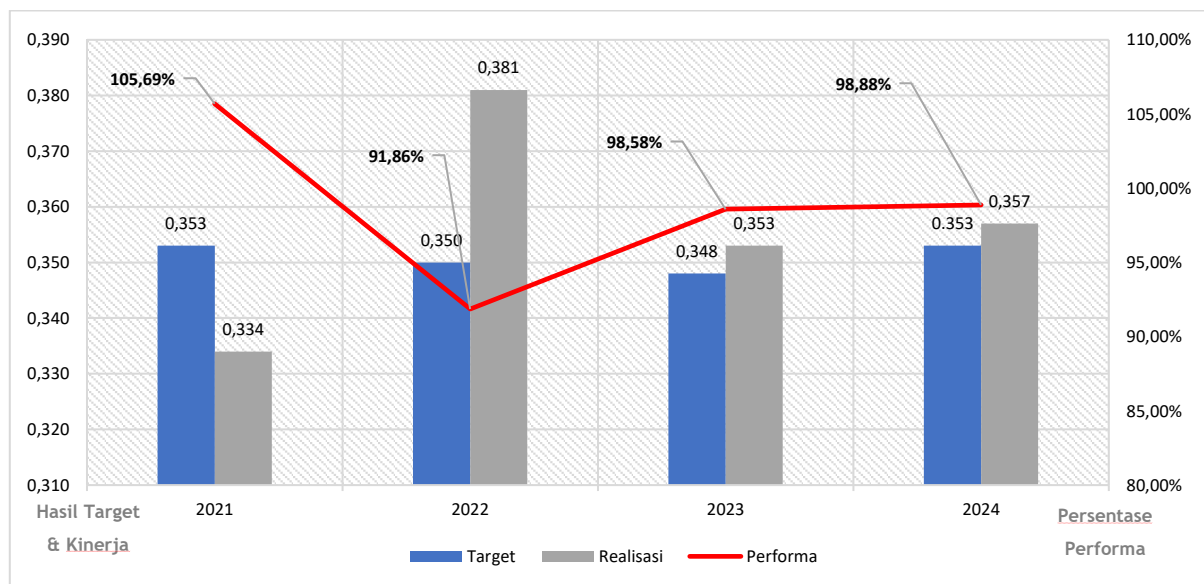
Sumber: P-RKPD Kota Mojokerto Tahun 2024 (diolah)

Selama periode 2020 hingga 2024, meskipun sempat mengalami kenaikan pada tahun 2021, secara umum Angka Kemiskinan di Kota Mojokerto menunjukkan tren turun hingga tahun 2024 yang menandakan keberhasilan dalam pengentasan kemiskinan. Pada **Gambar 4.1**, hasil performa evaluasi persentase capaian di tahun 2024 tercatat 100,00 persen, yang berarti realisasi telah mencapai target yang direncanakan. Tercapainya target kinerja Angka Kemiskinan merupakan buah hasil Pemerintah Kota Mojokerto menerapkan tiga strategi untuk menurunkan kemiskinan, terutama rumah tangga yang tergolong miskin ekstrem, yaitu: (1) mengurangi beban pengeluaran, (2) melakukan peningkatan pendapatan, dan (3) menghapus kantong kemiskinan.



Gambar 4. 1 Evaluasi performa Angka Kemiskinan Pemerintah Daerah Kota Mojokerto.  
Sumber : P-RKPD Kota Mojokerto Tahun 2024 (diolah)

Pada indikator Indeks Gini, sebagaimana terlihat pada **Gambar 4.2** terdapat penurunan realisasi kinerja pada tahun 2022 dimana awalnya sebesar 0,334 menjadi 0,381 di tahun 2022. Namun demikian, hasil evaluasi capaian Indeks Gini di tahun 2024 tercatat 98,88 persen, terdapat tren meningkat capaian kinerja sejak 2022, meskipun belum sepenuhnya mencapai target yang telah ditetapkan. Belum tercapainya Indeks Gini disebabkan oleh beberapa permasalahan diantaranya: faktor kesenjangan akses pekerjaan layak dan berkelanjutan, khususnya penduduk dengan pendidikan rendah dan masih banyak penduduk yang bekerja pada lapangan kerja sektor informal dengan pendapatan yang tidak menentu. Penurunan Indeks Gini dari tahun sebelumnya menandakan bahwa ketimpangan pendapatan masyarakat daerah sudah mampu ditekan, meskipun masih berada di bawah target.





**Gambar 4. 2** Performa Evaluasi Indeks Gini Pemerintah Daerah Kota Mojokerto.

*Sumber : P-RKPD Kota Mojokerto Tahun 2024 (diolah)*

**Tabel 4. 2** Performa IKS terhadap Indikator Tujuan Angka Kemiskinan Kota Mojokerto

INDIKATOR TUJUAN	ANGKA KEMISKINAN
SASARAN	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menurunnya Tingkat Pengangguran Masyarakat</li> <li>2. Terhindarnya Masyarakat dari Kerentanan Ekonomi</li> </ol>

Indikator Sasaran	Kondisi Awal	2021		2022		2023		2024		Evaluasi Tahun 2024	
	2020	T	R	T	R	T	R	T	R	%	Keterangan
Tingkat Pengangguran Terbuka	6,74	6,10-6,40	6,87	5,60-6,00	5,05	5,00-5,50	4,71	4,60	3,76	122,34	
Indeks Kedalaman Kemiskinan	0,64	n.a	0,84	n.a	0,87	n.a	0,78	0,74	0,74	100,00	

**Keterangan :**



: Melampaui



: Tercapai



: Belum Tercapai

Sumber: P-RKPD Kota Mojokerto Tahun 2024 (diolah)

Capaian kinerja indikator sasaran Angka Kemiskinan, yaitu Indeks Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) dan Indeks Kedalaman Kemiskinan Kota Mojokerto selama periode 2020 hingga 2024 disajikan pada **Tabel 4.2**. Penjelasan mengenai kinerja setiap indikator sasaran dijelaskan sebagai berikut.

- Realisasi kinerja pada Tingkat Pengangguran Terbuka konsisten mengalami penurunan dari tahun 2021 hingga 2024. Performa evaluasi Tingkat Pengangguran Terbuka pada tahun 2024, yaitu sebesar 122,34 persen, sehingga kinerja pada Tingkat Pengangguran Terbuka telah melampaui target. Menurunnya TPT di Kota Mojokerto ditandai dengan banyaknya warga Kota Mojokerto yang sudah memiliki pekerjaan. Dalam upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang ada, Pemerintah Kota 2025 Mojokerto berusaha meningkatkan kemampuan dan keterampilan angkatan kerja. Hal ini dilakukan dengan memberikan pelatihan yang melibatkan dinas terkait, terutama Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan. Pelatihan yang diberikan mencakup pelatihan keterampilan produksi makanan dan minuman hingga ekonomi kreatif.
- Realisasi kinerja pada Indeks Kedalaman Kemiskinan pada tahun 2020-2022 menunjukkan adanya kenaikan, sedangkan pada tahun 2023-2024 menunjukkan adanya penurunan. Pada tahun 2024 terjadi peningkatan performa evaluasi, yakni mencapai 100,00 persen yang menandakan ketercapaian dalam kinerja indikator sesuai target. Ketercapaian kinerja indikator juga dipengaruhi program yang telah dilakukan Pemerintah, meliputi: penyaluran bantuan sosial rutin, seperti BNPT APBD; memberikan layanan Kesehatan gratis melalui JKN/PBID; kegiatan bakti sosial dengan menyediakan bantuan bahan pokok; tambahan makanan untuk anak stunting; dan bantuan biaya pendidikan untuk anak yatim. Penurunan angka Indeks Kedalaman Kemiskinan di Kota Mojokerto ini

menunjukkan bahwa rata-rata pengeluaran per kapita penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan setiap bulannya, semakin mendekati garis kemiskinan.

Tabel 4. 3 Performa IKS terhadap Indikator Tujuan Indeks Gini Kota Mojokerto

INDIKATOR TUJUAN		ANGKA KEMISKINAN									
SASARAN		1. Tercukupinya Kebutuhan Pokok 2. Meningkatnya Kesenjangan Gender Dalam Pembangunan									
Indikator Sasaran	Kondisi Awal	2021		2022		2023		2024		Evaluasi Tahun 2024	
	2020	T	R	T	R	T	R	T	R	%	Keterangan
Pendapatan Perkapita/ PDRB Perkapita	49,84	n.a	52,04	n.a	56,84	n.a	59,06	59,50	62,68	105,35	<div></div>
Indeks Pemberdayaan Gender	70,87	91,00	70,86	91,50	70,86	92,00	76,15	76,50	72,91	95,31	<div></div>

Keterangan :

- : Melampaui
- : Tercapai
- : Belum Tercapai

Sumber: BPS Kota Mojokerto Tahun 2025 dan P-RKPD Kota Mojokerto Tahun 2024 (diolah)

Capaian kinerja indikator sasaran Indeks Gini, yaitu Pendapatan Perkapita/PDRB Perkapita dan Indeks Pemberdayaan Gender Kota Mojokerto selama periode 2020 hingga 2024 disajikan pada Tabel 4.3. Penjelasan mengenai kinerja setiap indikator sasaran dijelaskan sebagai berikut.


- Realisasi kinerja pada PDRB Perkapita mengalami kenaikan dari tahun 2020 hingga 2024. Kenaikan realisasi kinerja tertinggi terjadi pada tahun 2022, yaitu sebesar 4,80 poin. Hal tersebut juga meningkatkan performa evaluasi PDRB Perkapita pada tahun 2024, yaitu sebesar 105,35 persen dimana berstatus telah melampaui target.
- Realisasi kinerja pada Indeks Pemberdayaan Gender pada tahun 2022-2023 menunjukkan adanya kenaikan sedangkan pada tahun 2023-2024 menunjukkan adanya penurunan. Pada tahun 2024, performa evaluasi kinerja sebesar 95,31 persen yang menandakan status belum tercapai (dari target sebesar 76,50). Salah satu komponen penyusun Indeks Pemberdayaan Gender adalah proporsi perempuan di Parlemen, pada tahun 2024 proporsi perempuan yang menjadi anggota DPRD di Kota Mojokerto mengalami penurunan menjadi 16 persen (sebelumnya pada tahun 2023 mencapai 20 persen).

Penurunan proporsi tersebut adalah salah satu penyebab turunnya Indeks Pemberdayaan Gender pada tahun 2024.

4.1.2 Tujuan 2

Tolok ukur keberhasilan tujuan 2 Kota Mojokerto dapat direpresentasikan oleh indeks tunggal, yaitu Indeks Pembangunan Manusia. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) adalah indikator yang digunakan untuk menilai pencapaian pembangunan kualitas hidup manusia. Indeks ini dikembangkan oleh *United Nations Development Programme* (UNDP) pada tahun 1990 guna menyoroti peran penting manusia dan potensi yang dimilikinya dalam proses pembangunan. IPM dihitung berdasarkan rata-rata capaian dari tiga dimensi utama pembangunan manusia, yaitu: kesehatan dan umur Panjang; tingkat Pendidikan; dan standar hidup yang layak. Performa indikator utama dan indikator sasaran dari tujuan 2 disajikan pada Tabel 4.4 dan Tabel 4.5.

Tabel 4. 4 Performa IKU terhadap Tujuan 2 Pemerintah Daerah Kota Mojokerto

TUJUAN 2	Mewujudkan Sumber Daya Manusia Unggul, Bermartabat Dan Berdaya Saing										
	INDIKATOR TUJUAN : Indeks Pembangunan Manusia										
Indikator Tujuan	Kondisi Awal	2021		2022		2023		2024		Evaluasi Tahun 2024	
	2020	T	R	T	R	T	R	T	R	%	Keterangan
Indeks Pembangunan Manusia	78,95	78,20	79,34	78,4	80,19	78,6	80,90	80,93	81,76	101,03	

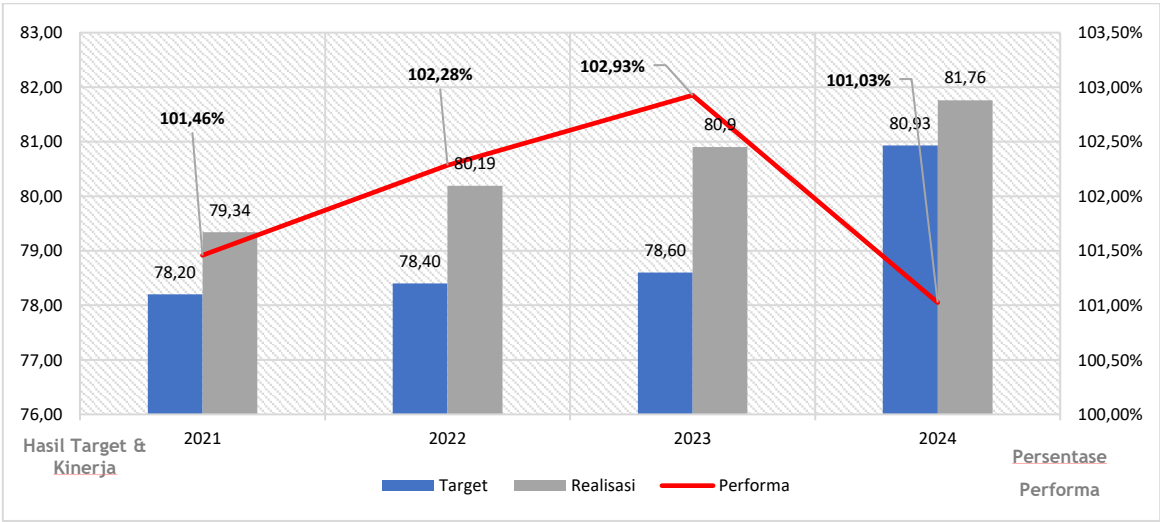
Keterangan :

-  : Melampaui
-  : Tercapai
-  : Belum Tercapai

Sumber: P-RKPD Kota Mojokerto Tahun 2024 (diolah)

Tabel 4.4 menyajikan capaian kinerja Indeks Pembangunan Manusia Kota Mojokerto pada tahun 2021-2024. Pada tahun 2024, IPM Kota Mojokerto telah mampu melampaui target yang ditentukan dengan performa evaluasi sebesar 101,03 persen. Hasil evaluasi kinerja, indeks ini telah melampaui target selama empat tahun terakhir (**Gambar 4.3**). Ketercapaian indikator IPM dipengaruhi oleh peningkatan seluruh dimensi pembentuk IPM, seperti: umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan, dan standar hidup layak. Dimensi umur panjang dan hidup sehat, bayi yang lahir pada tahun 2024 memiliki harapan untuk hidup hingga 75,99 tahun. Angka tersebut meningkat 0,19 tahun dibandingkan dengan mereka yang lahir pada

tahun sebelumnya. Dimensi pengetahuan, harapan lama sekolah (HLS) penduduk umur 7 tahun meningkat 0,09 tahun dari 14,04 tahun pada 2023 menjadi 14,13 tahun pada 2024. Sedangkan rata-rata lama sekolah (RLS) penduduk umur 25 tahun ke atas meningkat 0,33 tahun dari 11,05 tahun pada 2023 menjadi 11,38 tahun pada 2024. Terakhir, dimensi standar hidup layak yang diukur berdasarkan rata-rata pengeluaran riil per kapita per tahun (yang disesuaikan) meningkat 420 ribu rupiah (2,91 persen) dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Dengan adanya peningkatan dari ketiga dimensi tersebut, pembangunan manusia di Kota Mojokerto juga turut mengalami kemajuan




Gambar 4. 3 Performa Evaluasi Indeks Pembangunan Manusia Kota Mojokerto.

Sumber: P-RKPD Kota Mojokerto Tahun 2024 (diolah)

Tabel 4. 5 Performa IKS terhadap IPM Kota Mojokerto

INDIKATOR TUJUAN		INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA									
SASARAN		<div>1. Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat</div> <div>2. Meningkatnya Kualitas Pendidikan Masyarakat</div> <div>3. Meningkatnya Peran Pemuda dalam Pembangunan</div> <div>4. Mewujudkan Masyarakat Bermartabat dan Berbudaya</div>									
Indikator Sasaran	Kondisi Awal	2021		2022		2023		2024		Evaluasi Tahun 2024	
	2020	T	R	T	R	T	R	T	R	%	Keterangan
Indeks Kesehatan	0,82	0,821	0,821	0,821	0,827	0,737	0,760	0,865	0,861	99,54%	<div></div>
Indeks Pendidikan	0,731	0,732	0,738	0,735	0,749	0,737	0,760	0,763	0,772	101,18%	<div></div>

Indikator Sasaran	Kondisi Awal	2021		2022		2023		2024		Evaluasi Tahun 2024	
	2020	T	R	T	R	T	R	T	R	%	Keterangan
Indeks Pembangunan Pemuda	n.a	n.a	n.a	n.a	n.a	n.a	n.a	54,20	n.a	-	-
Indeks Kesalehan Sosial	76,2	76,23	91,90	76,25	91,96	76,27	95,08	95,10	91,67	96,39%	

Keterangan :



: Melampaui



: Tercapai



: Belum Tercapai

Sumber: P-RKPD Kota Mojokerto Tahun 2024 (diolah)

Capaian kinerja indikator sasaran Indeks Pembangunan Manusia, yaitu Indeks Kesehatan, Indeks Pendidikan, Indeks Pembangunan Pemuda, dan Indeks Kesalehan Sosial selama tahun 2020 hingga 2024 terdapat dalam **Tabel 4.5**. Penjelasan mengenai kinerja setiap indikator sasaran dijelaskan sebagai berikut.

- Angka realisasi pada indikator kesehatan mengalami peningkatan sejak tahun 2021 sampai tahun 2022. Namun dari tahun 2022 hingga 2023 mengalami penurunan sebesar 0,067. Di tahun 2024, performa evaluasi pada Indeks kesehatan mencapai 99,54 persen, meskipun belum pada status tercapai namun terjadi peningkatan realisasi sebesar 0,101 poin dari tahun 2023. Hal ini menunjukkan perlu evaluasi dan peningkatan efektivitas program yang sudah dijalankan. Meskipun program telah dilaksanakan dengan capaian yang baik, beberapa juga menghadapi hambatan, seperti resistensi masyarakat terhadap perubahan atau kurangnya koordinasi antar sektor. Perubahan dinamika Kesehatan juga dapat menjadi masalah, adanya perubahan epidemiologi penyakit, kondisi lingkungan dan faktor sosial ekonomi dapat mempengaruhi efektivitas program kesehatan yang telah direncanakan.
- Pada indikator sasaran kedua, yaitu Indeks Pendidikan dapat diketahui bahwa sejak tahun 2020 realisasi kinerja pada indikator ini mengalami peningkatan hingga tahun 2024. Di tahun 2024, performa evaluasi pada indikator ini berhasil mencapai target dengan persentase sebesar 101,18 persen. Tercapainya Indeks Pendidikan Kota Mojokerto didukung pula dengan adanya sosialisasi kepada masyarakat akan pentingnya pendidikan bagi putra/putrinya untuk dapat menuntaskan wajib belajar 12 tahun serta bagi masyarakat yang memiliki putra/putri usia 3-6 tahun untuk menyekolahkan di Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD). Sedangkan dari sisi sarana dan prasarana, Pemerintah

Kota Mojokerto melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan melakukan rehabilitasi ruang kelas, sarana prasarana dan utilitas ke sekolah-sekolah.

- Indikator sasaran ketiga, yakni Indeks Pembangunan Pemuda belum tersedia data realisasi mulai 2021 hingga tahun 2024, karena belum dilakukan perhitungan dan merupakan indikator baru digunakan. Indeks Pembangunan Pemuda (IPP) merupakan indikator yang digunakan untuk mengevaluasi kemajuan pemuda di suatu daerah. IPP menyajikan gambaran menyeluruh mengenai situasi pemuda, mencakup berbagai aspek seperti pendidikan, kesehatan, kondisi ekonomi, keterlibatan dalam masyarakat, serta kemampuan kepemimpinan. Target Indeks Pembangunan Pemuda di tahun 2024 sebesar 54,20. Pemerintah Kota Mojokerto melalui Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata mengadakan pelatihan kewirausahaan untuk meningkatkan daya saing dan produktivitas pemuda untuk menunjang ketercapaian Indeks Pembangunan Pemuda Kota Mojokerto.
- Indikator sasaran Indeks Kesalehan Sosial menunjukkan capaian kinerja yang baik mulai tahun 2021-2023. Realisasi indikator ini meningkat selama 3 tahun terakhir dengan peningkatan tertinggi terjadi pada tahun 2021 sebesar 15,7 poin dibandingkan tahun sebelumnya. Peningkatan tersebut juga terjadi hingga tahun 2023 dimana realisasi kinerja mencapai 95,08. Namun pada tahun 2024 realisasi kinerja menurun dimana IKS memiliki performa evaluasi sebesar 96,39 persen yang berarti belum melampaui dari target yang ada. Adanya penurunan IKS di Kota Mojokerto dipengaruhi oleh tahun politik (pada tahun 2024), yakni adanya pemilihan presiden, legislatif, pemilihan pimpinan daerah, sehingga situasi politik meningkat, salah satunya terjadi gesekan antar masyarakat yang disebabkan oleh perbedaan pilihan.

### 4.1.3 Tujuan 3

Tolok ukur keberhasilan dari tujuan 3 dapat ditinjau dari Pertumbuhan Ekonomi. Indikator ini kemudian dijabarkan menjadi lima indikator sasaran, yaitu: (1) Pertumbuhan PDRB Sektor Industri Pengolahan, (2) Pertumbuhan PDRB Sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi, (3) Persentase Pertumbuhan Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil, (4) Pertumbuhan PDRB Sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum, dan (5) Nilai Realisasi Investasi. Performa indikator utama dan indikator sasaran dari tujuan 3 selengkapnya disajikan pada **Tabel 4.6** dan **Tabel 4.7**.

Berdasarkan **Tabel 4.6** dan **Gambar 4.4**, capaian kinerja Pertumbuhan Ekonomi Kota Mojokerto dalam kurun waktu empat tahun terakhir (2021-2024) menunjukkan pola yang fluktuasi. Pada tahun 2022, indikator ini mencatatkan realisasi tertinggi, yakni sebesar 5,56 persen yang disertai dengan performa evaluasi sebesar 154,44 persen. Namun, di tahun 2023 terjadi penurunan realisasi kinerja yang cukup tajam menjadi 2,77 persen dari tahun 2022



dengan penurunan performa evaluasi hingga 62,00 persen. Memasuki tahun 2024, indikator Pertumbuhan Ekonomi kembali mengalami peningkatan baik dari sisi realisasi kinerja yang mencapai 5,32 persen, maupun dari sisi performa evaluasi yang naik menjadi 113,19 persen. Capaian di tahun 2024 ini menunjukkan bahwa target yang telah ditetapkan berhasil melampaui target. Adanya peningkatan ini juga diimbangi dengan Pemerintah Kota Mojokerto yang berkomitmen untuk menciptakan usaha yang kondusif mengenai pemberian insentif kepada investor dengan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda).

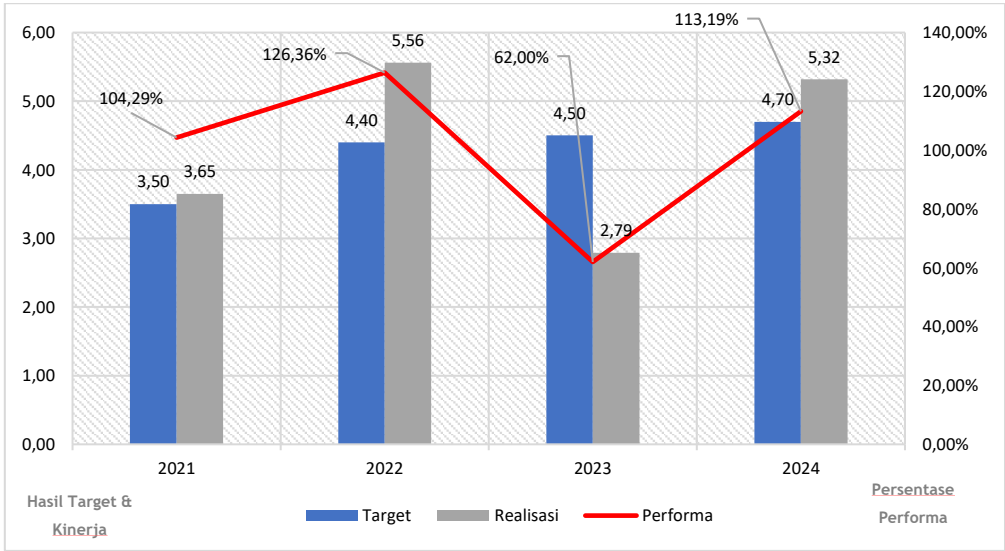
Tabel 4. 6 Performa Indikator Kinerja Utama (IKU) terhadap Tujuan 3 Pemerintah Daerah Kota Mojokerto

TUJUAN 3	Meningkatkan Penguatan Ekonomi Berbasis Potensi Daerah dan Investasi										
	INDIKATOR TUJUAN : Pertumbuhan Ekonomi										
	Kondisi Awal	2021		2022		2023		2024		Evaluasi Tahun 2024	
Indikator Tujuan	2020	T	R	T	R	T	R	T	R	%	Keterangan
Pertumbuhan Ekonomi	-3,69	2,50-3,50	3,65	3,60-4,40	5,56	4,50-5,00	2,79	4,50 - 4,70	5,32	113,19	<div></div>

Keterangan:

- : Melampaui
- : Tercapai
- : Belum Tercapai

Sumber: P-RKPD Kota Mojokerto Tahun 2024 (diolah)








Gambar 4. 4 Performa Evaluasi Pertumbuhan Ekonomi Kota Mojokerto.

Sumber: P-RKPD Kota Mojokerto Tahun 2024 (diolah)

Langkah ini bertujuan untuk menarik lebih banyak investor, baik lokal maupun internasional. Pemerintah Kota Mojokerto juga memperkuat pengembangan sektor pariwisata sebagai upaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui peningkatan kunjungan wisatawan.

**Tabel 4. 7** Performa IKS terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kota Mojokerto

INDIKATOR TUJUAN		INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA									
SASARAN		1. Meningkatnya Produktivitas Sektor Potensial 2. Meningkatnya Daya Saing UMKM 3. Meningkatnya Daya Saing Pariwisata 4. Meningkatnya Daya Tarik Investasi Daerah									
Indikator Sasaran	Kondisi Awal	2021		2022		2023		2024		Evaluasi Tahun 2024	
	2020	T	R	T	R	T	R	T	R	%	Keterangan
Pertumbuhan PDRB Sektor Industri Pengolahan	-3,55	0,7-1,4	2,98	1,5-1,9	6,06	2,0-2,5	-13,91	6,08	3,44	56,58	
Pertumbuhan PDRB Sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi	-9,2	1,5-2,4	6,54	2,5 - 3,4	6,42	6,42	6,42	6,44	3,54	54,97	
Persentase Pertumbuhan Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil	n.a	n.a	n.a	n.a	3,15	n.a	3,15	3,5	3,52	100,57	
Pertumbuhan PDRB Sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	-8,16	n.a	1,45	n.a	7,75	n.a	8,99	9,00	5,51	61,22	
Nilai Realisasi Investasi	9.107.960.333,68	360.000.000.000	680.904.174.000	365.000.000.000	3.500.939.922.928	370.000.000.000	391.323.684.800	426.000.000.000	360.969.890.005	84,73	

**Keterangan :**



: Melampaui



: Tercapai



: Belum Tercapai

Sumber: P-RKPD Kota Mojokerto Tahun 2024 (diolah)

Capaian kinerja indikator sasaran Pertumbuhan Ekonomi, yaitu Pertumbuhan PDRB Sektor Industri Pengolahan, Pertumbuhan PDRB Sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi, Persentase Pertumbuhan Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil, Pertumbuhan PDRB Sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum, Nilai Realisasi Investasi selama tahun 2020 hingga 2024 terdapat dalam **Tabel 4.7**. Penjelasan mengenai kinerja setiap indikator sasaran dijelaskan sebagai berikut.


- Pada indikator Pertumbuhan PDRB Sektor Industri Pengolahan, tahun 2021 hingga 2022 terjadi peningkatan realisasi kinerja sebesar 3,08 persen. Sedangkan pada tahun 2023 terjadi perlambatan hingga realisasi kinerja menjadi -13,91 persen. Adanya perlambatan tersebut dipengaruhi ada penutupan Pabrik Bokor Mas. Kemudian di tahun 2024 mengalami peningkatan hingga realisasinya mencapai 3,44 persen, meskipun meningkat realisasi kinerjanya, performa evaluasinya masih mencapai angka 56,58 persen dengan status belum tercapai. Oleh karena itu, perlu adanya kontribusi dan kerjasama untuk seluruh *stakeholder* untuk meningkatkan Industri Pengolahan di Kota Mojokerto. Sektor Industri Pengolahan Kota Mojokerto berupa industri kulit, barang dari kulit, dan alas kaki menjadi hal yang disorot dan menunjang pertumbuhan ekonomi daerah terutama pada sektor industri. Kinerja industri alas kaki bukan hanya dari industri besar melainkan juga ada kontribusi para pelaku industri kecil dan menengah (IKM).
- Indikator sasaran Pertumbuhan PDRB Sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi dari tahun 2021 hingga 2024 terindikasi adanya penurunan realisasi kinerja. Hingga di tahun 2024 performa evaluasi kinerja indikator sebesar 54,97 persen. Ketidaktercapaian pada indikator dipengaruhi oleh pelayanan tera/tera ulang. Dimana Pemerintah Kota Mojokerto mengalami kendala, terkait tenaga penera yang belum tersedia. Hal ini juga diatasi dengan melakukan kerja sama dengan Pemerintah Kabupaten Mojokerto melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan untuk mendukung penyelenggaraan tera/tera ulang.
- Pada indikator Persentase Pertumbuhan Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil performa evaluasi kinerja di tahun 2024 sebesar 100,57 persen dengan status melampaui target. Status melampaui tersebut dipengaruhi adanya upaya dari Pemerintah Kota Mojokerto untuk melakukan pendampingan kepada para pelaku usaha mikro.
- Pada Pertumbuhan PDRB Sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum realisasi kinerja indikator di tahun 2020 hingga 2024 terus mengalami peningkatan. Namun pada tahun 2024 terjadi perlambatan realisasi kinerja sebesar 3,48 persen dimana performa evaluasi hanya sebesar 61,22 persen. Belum berhasilnya indikator ini dalam mencapai target yang telah ditetapkan tentunya diperlukan perhatian khusus untuk bisa mencapai target di tahun selanjutnya. Pertumbuhan PDRB Sektor Akomodasi dan Makan Minum perlu dukungan dari UMKM Kuliner yang telah menjadi penyumbang utama pertumbuhan ekonomi Kota Mojokerto.
- Indikator Nilai Realisasi Investasi di tahun 2024 memiliki performa evaluasi kinerja sebesar 84,73 persen dengan status belum melampaui target. Tidak tercapainya nilai realisasi investasi di Kota Mojokerto pada 2024 disebabkan oleh beberapa faktor, yakni sebagian besar pelaku usaha yang ada di Kota Mojokerto telah menyampaikan Laporan

Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) di tahun sebelumnya, sehingga pada 2024 belum ada penambahan modal yang dapat dilaporkan kembali melalui aplikasi OSS RBA oleh pelaku usaha serta bagi pelaku usaha baru belum bisa menyampaikan LKPM dikarenakan keterbatasan waktu pelaporan LKPM yang hanya 10 (sepuluh) hari serta masih dalam proses perbaikan administrasi perizinan dan perbaikan administrasi pelaporan asetnya.

4.1.4 Tujuan 4

Tolok ukur keberhasilan tujuan 4 Kota Mojokerto yang dapat dilihat pada indikator tujuan Indeks Reformasi Birokrasi. Indeks Reformasi Birokrasi menunjukkan tingkat penerapan perbaikan dalam tata kelola pemerintahan oleh suatu instansi, dengan tujuan mewujudkan pemerintahan yang efisien dan efektif, bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) serta mampu memberikan pelayanan publik yang bermutu. Indikator tujuan ini direpresentasikan oleh delapan indikator sasaran, yaitu Indeks Kepuasan Masyarakat, Kepatuhan Standar Pelayanan Publik, Indeks Inovasi Daerah, Nilai SPBE, Nilai SAKIP, Opini BPK, Maturitas SPIP, dan Sistem Merit. Performa indikator utama dan indikator sasaran dari tujuan 4 disajikan pada **Tabel 4.8** hingga **Tabel 4.9**.

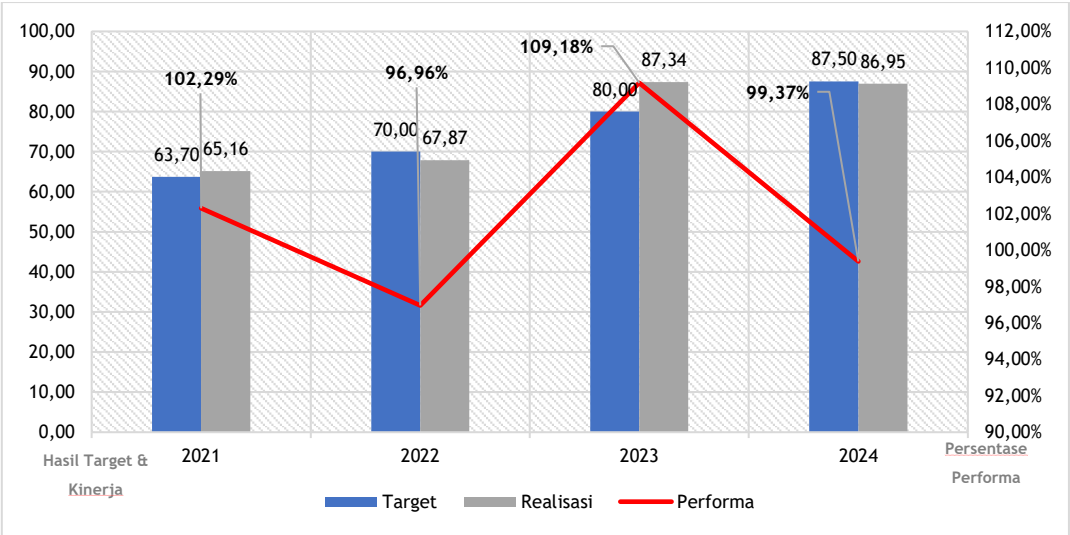
Tabel 4. 8 Performa IKU terhadap Tujuan 4 Pemerintah Daerah Kota Mojokerto

TUJUAN 4	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang Dinamis dan Akuntabel										
	INDIKATOR TUJUAN : Indeks Reformasi Birokrasi										
Indikator Tujuan	Kondisi Awal	2021		2022		2023		2024		Evaluasi Tahun 2024	
	2020	T	R	T	R	T	R	T	R	%	Keterangan
Indeks Reformasi Birokrasi	B	B	B	BB	B	A	A	A	A	99,37	
	62,45	63,7-70	65,16	>70-80	67,87	>80-90	87,34	87,50	86,95		

Keterangan :

-  : Melampaui
-  : Tercapai
-  : Belum Tercapai

Sumber: P-RKPD Kota Mojokerto Tahun 2024 dan Peraturan Menteri PANRB Nomor 9 Tahun 2023 tentang Evaluasi Reformasi Birokrasi dan Keputusan Menteri PANRB Nomor 182 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Evaluasi Reformasi Birokrasi Tahun 2024 (diolah).




Gambar 4. 5 Performa Evaluasi Indeks Reformasi Birokrasi Kota Mojokerto.

Sumber: P-RKPD Kota Mojokerto Tahun 2024 dan Peraturan Menteri PANRB Nomor 9 Tahun 2023 tentang Evaluasi Reformasi Birokrasi dan Keputusan Menteri PANRB Nomor 182 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Evaluasi Reformasi Birokrasi Tahun 2024 (diolah).

Tabel 4. 8 dan Gambar 4. 5 menyajikan capaian kinerja Indeks Reformasi Birokrasi Kota Mojokerto selama empat tahun sejak 2020. Realisasi indeks ini mengalami peningkatan realisasi hingga mencapai titik tertinggi di tahun 2023 yaitu sebesar 87,34. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa pada tahun 2023 indikator ini sudah mampu mencapai target yaitu dengan hasil evaluasi sebesar 109,18 persen. Namun di tahun 2024 Indeks Reformasi Birokrasi belum mencapai target dengan performa evaluasi sebesar 99,37 persen. Ketidaktercapaian indikator ini dipengaruhi oleh belum seluruh kegiatan utama pada Road Map RB nasional dikawal pada Road Map Instansional dan masih ditemukan target tahun 2024 yang sama besarnya dengan realisasi tahun 2023 (target tidak progresif).

Tabel 4. 9 Performa IKS terhadap Tujuan 4 Pemerintah Daerah Kota Mojokerto

Indikator Sasaran	Kondisi Awal	2021		2022		2023		2024		Evaluasi Tahunn 2024	
	2020	T	R	T	R	T	R	T	R	%	Keterangan
Indeks Kepuasan Masyarakat	83,87	76,61-88,30	84,35	81,2388,30	84,44	81,23-88,30	88,79	90,3	91,95	101,83	<div></div>
Kepatuhan Standard Pelayanan Publik	n.a	n.a	n.a	n.a	n.a	n.a	n.a	88,4	92,12	104,21	<div></div>
Indeks Inovasi Daerah	n.a	n.a	n.a	n.a	n.a	n.a	n.a	84,75	92,25	108,85	<div></div>
Nilai SPBE	3,38	3,3	2,92	3,42	3,32	3,5	4,26	4,28	4,32	100,93	<div></div>
Nilai SAKIP	BB	BB	B	BB	B	A	BB	BB	BB	104,35	<div></div>
	67,42	70-75	67,64	76-88	68,1	80-85	70,96	72,00	75,13		

Indikator Sasaran	Kondisi Awal	2021		2022		2023		2024		Evaluasi Tahunn 2024	
	2020	T	R	T	R	T	R	T	R	%	Keterangan
Opini BPK	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	100,00	
Maturitas SPIP	level 3	level 3	level 3	level 3	level 3	level 3	level 3	level 3	level 3	100,00	
Sistem Merit	163	175-249 (Kurang)	288 (Baik)	250-285 (Baik)	288 (Baik)	286-324 (Baik)	310 (Baik)	315 (Baik)	n.a	-	-

Keterangan :

-  : Melampaui
-  : Tercapai
-  : Belum Tercapai

Sumber: P-RKPD Kota Mojokerto Tahun 2024 (diolah)

Capaian kinerja indikator sasaran Indeks Reformasi Birokrasi, yaitu Indeks Kepuasan Masyarakat, Kepatuhan Standar Pelayanan Publik. Indeks Inovasi Daerah, Nilai SPBE, Nilai SAKIP, Opini BPK, Maturitas SPIP, dan Sistem Merit selama tahun 2020 hingga 2024 disajikan pada Tabel 4.9. Berdasarkan hasil evaluasi tahun 2024 terhadap indikator sasaran dalam Indeks Reformasi Birokrasi, seluruh indikator menunjukkan status tercapai bahkan melampaui target, kecuali indikator Sistem Merit yang belum tersedia data realisasi pada tahun 2024. Capaian positif ini mencerminkan keberhasilan Pemerintah Kota Mojokerto dalam menerapkan reformasi birokrasi secara konsisten dan terarah. Penjelasan mengenai kinerja setiap indikator sasaran dijelaskan sebagai berikut.

- Indeks Kepuasan Masyarakat mencapai performa evaluasi sebesar 101,83 persen yang memiliki status melampaui. Tercapainya performa evaluasi yang melampaui target mencerminkan adanya perbaikan di berbagai unsur pelayanan publik. Hal ini didukung oleh komitmen tinggi Pemerintah Kota Mojokerto dalam meningkatkan kualitas pelayanan melalui transparansi, akuntabilitas, dan pelatihan ASN untuk memahami kebutuhan masyarakat. Selain itu, respon cepat terhadap keluhan, peningkatan aksesibilitas layanan, dan kerja sama lintas sektor juga menjadi faktor pendukung utama.
- Indikator Kepatuhan terhadap Standar Pelayanan Publik mencatat performa evaluasi 104,21 persen, sehingga memiliki status melampaui target. Ketercapaian tersebut didukung dengan pelaksanaan forum pembinaan dan fasilitasi peningkatan pelayanan oleh pemerintah daerah.
- Indeks Inovasi Daerah juga memiliki performa evaluasi kinerja sebesar 108,85 persen, didorong oleh berbagai kegiatan seperti penjangkaran inovasi melalui Mojo Indah, peluncuran Klinik Inovasi Daerah, serta pengisian data untuk penghargaan IGA.

- Sementara itu, nilai SPBE mencapai predikat Memuaskan (4,32) dengan performa evaluasi kinerja sebesar 100,93 persen. Hal ini menunjukkan adanya peningkatan signifikan berkat peraturan internal yang mendukung tata kelola digital dan koordinasi antar perangkat daerah.
- Nilai SAKIP memiliki performa evaluasi kinerja sebesar 104,35 persen dengan predikat BB. Hal tersebut didukung dengan adanya efisiensi anggaran dan penerapan sistem manajemen kinerja berbasis teknologi.
- Opini BPK tetap mempertahankan predikat WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) didukung dengan adanya penyusunan laporan keuangan yang transparan dan akuntabel serta kerja sama dan dukungan pelaksanaan penganggaran, pengelolaan, serta pelaporan keuangan di pelaksana teknis pada masing-masing OPD di lingkungan Pemkot Mojokerto yang selalu berpedoman pada arahan dan petunjuk baik dari BPKP maupun dari BPK.
- Maturitas SPIP tetap stabil di level 3, dengan peningkatan nilai SPIP dan IMR berkat adanya asistensi dan evaluasi berbasis digital yang melibatkan seluruh perangkat daerah. Selain itu juga dipengaruhi adanya pelaksanaan kegiatan Manajemen Risiko (MR) meliputi, asistensi, reviu dokumen MR atas perencanaan tahun 2024, dan evaluasi implementasi MR. Kegiatan ini melibatkan seluruh Perangkat Daerah di Kota Mojokerto. Kegiatan ini mendorong nilai IMR Kota Mojokerto dari 3,094 meningkat menjadi 3,117. Sehingga nilai SPIP juga meningkat dari 3,178 menjadi 3,217 atau tetap pada level 3.
- Indikator Sistem Merit belum tersedia data realisasi tahun 2024, sehingga tidak dapat dievaluasi, meskipun target telah ditetapkan (target 315 dengan keterangan Baik). Pada tahun 2023 sendiri indikator ini telah melampaui target yang ditentukan dengan realisasi kinerja sebesar 310 (keterangan Baik).

#### 4.1.5 Tujuan 5

Keberhasilan pada misi 5 dapat diukur melalui Indeks Kualitas Lingkungan Hidup. Indeks ini diturunkan menjadi empat indikator sasaran, yaitu Indeks Kualitas Air, Indeks Kualitas Udara, Indeks Infrastruktur Permukiman, dan Indeks Risiko Bencana. Performa indikator utama dan indikator sasaran dari tujuan 5 selengkapnya disajikan pada **Tabel 4.10** dan **Tabel 4.11**.

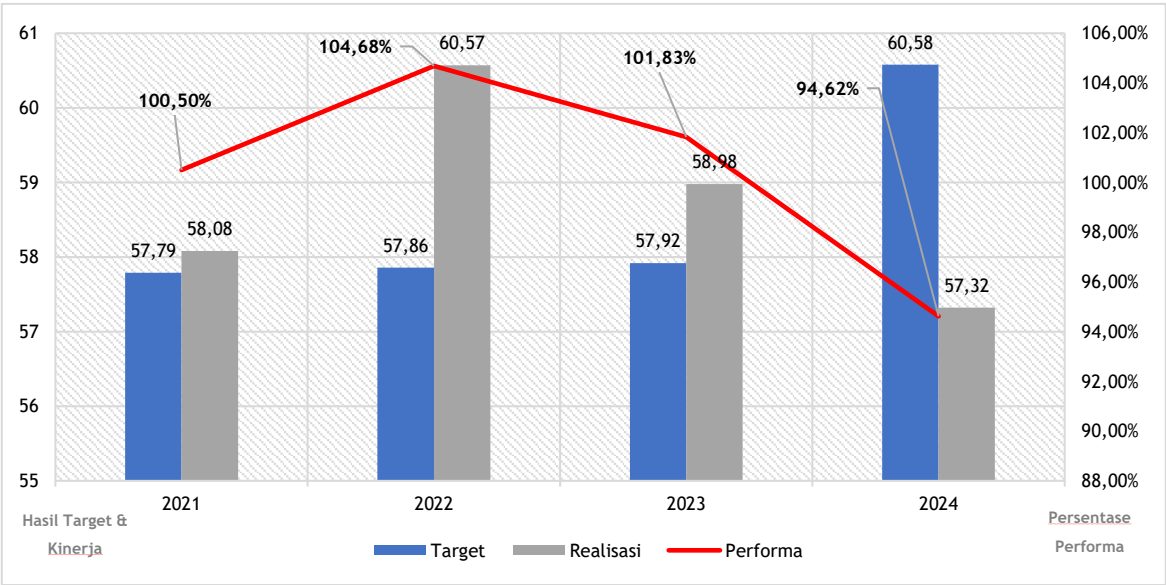
Tabel 4. 10 Performa IKU terhadap Tujuan 5 Pemerintah Daerah Kota Mojokerto

TUJUAN 5	Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup yang Layak										
	INDIKATOR TUJUAN : Indeks Kualitas Lingkungan Hidup										
Indikator Tujuan	Kondisi Awal	2021		2022		2023		2024		Evaluasi Tahun 2024	
	2020	T	R	T	R	T	R	T	R	%	Keterangan
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	57,72	57,79	58,08	57,86	60,57	57,92	58,98	60,58	57,32	94,62	<div></div>

Keterangan :

- : Melampaui
- : Tercapai
- : Belum Tercapai

Sumber: P-RKPD Kota Mojokerto Tahun 2024 (diolah)



Gambar 4. 6 Performa Evaluasi Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kota Mojokerto.

Sumber: P-RKPD Kota Mojokerto Tahun 2024 (diolah)

Tabel 4.10 menyajikan kinerja Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kota Mojokerto dari tahun 2020 hingga 2024. Selama periode tersebut, capaian IKLH mengalami fluktuasi dan belum menunjukkan peningkatan yang konsisten. Nilai tertinggi tercapai pada tahun 2022 sebesar 60,57 namun mengalami penurunan hingga pada tahun 2024 menjadi 57,32. Pada tahun 2024, performa evaluasi kinerja IKLH sebesar 94,62 persen. Berdasarkan hasil evaluasi, capaian ini dikategorikan belum tercapai. Ketidakmampuan dalam memenuhi target IKLH ini disebabkan oleh berbagai faktor yang mempengaruhi indikator penyusunnya.



Pada Indeks Kualitas Air (IKA), nilai yang rendah disebabkan oleh pencemaran sungai yang cukup signifikan, terutama dari limbah domestik. Kandungan bakteri *Fecal Coliform* yang tinggi, keberadaan fosfat dari deterjen, dan peningkatan padatan tersuspensi (TSS) akibat erosi serta sampah sungai menjadi penyumbang utama turunnya kualitas air. Meskipun Indeks Kualitas Udara (IKU) menunjukkan hasil yang baik berkat penanaman pohon di sempadan jalan, namun distribusinya belum merata, sementara emisi dari kendaraan dan industri masih menjadi sumber pencemar yang dominan. Sementara itu, pada Indeks Kualitas Lahan (IKL), praktik pemotongan pohon yang tidak disertai dengan reboisasi secara memadai turut memperburuk kualitas lingkungan. Hal ini berdampak pada meningkatnya suhu perkotaan dan menurunnya daya dukung lingkungan terhadap ekosistem yang ada. Kombinasi dari berbagai permasalahan ini menunjukkan perlunya intervensi yang lebih serius, terintegrasi, dan berkelanjutan dalam pengelolaan lingkungan hidup di Kota Mojokerto guna mencapai target IKLH yang telah ditetapkan.

Tabel 4. 11 IKS terhadap Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kota Mojokerto

INDIKATOR TUJUAN		INDEKS KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP									
SASARAN		1. Menurunnya Tingkat Pencemaran Lingkungan 2. Tersedianya Kawasan Permukiman Dengan Layak 3. Meningkatnya Kesiapsiagaan Menghadapi Bencana									

Indikator Sasaran	Kondisi Awal	2021		2022		2023		2024		Evaluasi Tahun 2024	
	2020	T	R	T	R	T	R	T	R	%	Keterangan
Indeks Kualitas Air	0,82	n.a	51	n.a	58,95	n.a	52,63	58,96	51,58	87,48	
Indeks Kualitas Udara	0,731	n.a	81,38	n.a	81,09	n.a	82,52	82,75	79,22	95,73	
Indeks Infrastruktur Permukiman	n.a	n.a	96,7	n.a	96,65	97,46	98,31	98,35	98,45	100,10	
Indeks Resiko Bencana	76,2	n.a	135,88	n.a	135,88	n.a	135,88	134,9	98,69	136,69	

Keterangan :

 : Melampaui

 : Tercapai

 : Belum Tercapai

Sumber: P-RKPD Kota Mojokerto Tahun 2024 (diolah)

Capaian kinerja indikator sasaran terhadap Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kota Mojokerto selama tahun 2020 hingga 2024 ditampilkan pada **Tabel 4.11**. Penjelasan mengenai performa tiap indikator sasaran dijabarkan sebagai berikut.

- Pada indikator Indeks Kualitas Air (IKA), realisasi tahun 2024 hanya mencapai nilai 0,58 dari target 0,66 dimana performa evaluasi kinerja sebesar 87,48 persen. Capaian ini termasuk kategori belum tercapai. Belum tercapainya indikator ini disebabkan oleh beberapa pencemar utama di perairan Kota Mojokerto, seperti banyaknya tangki septik yang belum diolah dan langsung dibuang ke saluran atau sungai, tingginya kandungan fosfat dari detergen dan limbah rumah tangga, serta meningkatnya padatan tersuspensi (TSS) akibat limpasan tanah saat musim hujan dan penumpukan sampah saat kemarau. Kondisi ini menunjukkan perlunya penguatan pengelolaan limbah domestik dan peningkatan infrastruktur sanitasi yang lebih baik.
- Indikator Indeks Kualitas Udara (IKU) juga belum mencapai target, dengan performa evaluasi kinerja sebesar 95,13 persen. Belum tercapainya indikator tersebut dipengaruhi upaya penanaman pohon di sempadan jalan telah dilakukan melalui kolaborasi dengan Saka Kalpataru dimana pelaksanaannya belum merata di seluruh wilayah Kota Mojokerto. Selain itu, emisi dari kendaraan bermotor dan aktivitas industri tetap menjadi penyumbang utama pencemaran udara. Oleh karena itu, intervensi yang lebih luas dan pengendalian sumber pencemar perlu diperkuat untuk mencapai target kualitas udara yang lebih baik.
- Berbeda dengan dua indikator sebelumnya, Indeks Infrastruktur Permukiman menunjukkan hasil yang sangat baik dengan performa evaluasi kinerja mencapai 100,00 persen sehingga statusnya tercapai. Capaian ini menunjukkan keberhasilan pemerintah daerah dalam menyediakan infrastruktur dasar permukiman yang layak, seperti akses air bersih, sanitasi, dan sistem drainase yang memadai.
- Sementara itu, Indeks Risiko Bencana juga mencatatkan performa evaluasi kinerja yang melampaui target, yakni sebesar 136,69 persen. Hasil ini mencerminkan peningkatan signifikan dalam kesiapsiagaan dan mitigasi bencana di Kota Mojokerto, yang tidak hanya menunjukkan penguatan kelembagaan dan sistem peringatan dini, tetapi juga pelibatan aktif masyarakat dalam kegiatan pengurangan risiko bencana.

Secara keseluruhan, dari empat indikator sasaran terhadap Indeks Kualitas Lingkungan Hidup, dua indikator belum tercapai, satu tercapai, dan satu berhasil melampaui target. Hal ini menandakan perlunya fokus yang lebih besar pada pengelolaan pencemaran lingkungan, terutama air dan udara, untuk mendukung terciptanya lingkungan hidup yang lebih sehat dan berkelanjutan di Kota Mojokerto.

## 4.2 Evaluasi Kinerja dan Serapan Anggaran Program

Selain berdasarkan ketercapaian IKU dan IKS. Pemerintah Daerah memiliki peran krusial dalam pelaksanaan program dan kegiatan tahunan, serta dalam mengoptimalkan pengelolaan keuangan daerah guna mendukung tercapainya tujuan yang tercantum dalam dokumen perencanaan strategis (P-RKPD). Salah satu tantangan yang sering dihadapi adalah kurang sinkronnya antara pelaksanaan program dan tingkat penyerapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). **Tabel 4.13** menyajikan hasil evaluasi terhadap anggaran dan kinerja program di Kota Mojokerto, yang mengacu pada ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 mengenai tata cara perencanaan, pengendalian, dan evaluasi pembangunan daerah, serta mekanisme evaluasi dan perubahan dokumen perencanaan pembangunan. Di Kota Mojokerto sendiri, hasil evaluasi ini diklasifikasikan dalam empat kategori, yaitu Sangat Baik (SB), Baik (B), Cukup (C), dan Kurang Baik (KB), sebagaimana tercantum pada **Tabel 4.12**.

		Penyerapan Anggaran				
		Sangat Tinggi ≥ 91%	Tinggi 76%-90%	Sedang 66%-75%	Rendah 51%-65%	Sangat Rendah ≤ 50%
Capaian Kinerja	Sangat Tinggi ≥ 91%	SB	B	C	C	KB
	Tinggi 76%-90%	B	B	C	C	KB
	Sedang 66%-75%	C	C	C	KB	KB
	Rendah 51%-65%	C	C	KB	KB	SKB
	Sangat Rendah ≤ 50%	KB	KB	KB	SKB	SKB

o **SB** : Sangat Baik

o **B** : Baik

o **C** : Cukup

o **KB** : Kurang Baik

o **SKB** : Sangat Kurang Baik

**Tabel 4. 12** Tabel Kategorisasi Evaluasi Capaian Kinerja Program-Penyerapan Anggaran

Sumber : Diadopsi dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017

### • Evaluasi Capaian Kinerja dan Keterserapan Anggaran Kategori Sangat Baik

Pada kategori sangat baik sendiri memiliki capaian kinerja yang tergolong sangat tinggi ( $\geq 91\%$ ) dan keterserapan anggaran yang juga tergolong sangat tinggi ( $\geq 91\%$ ). Berdasarkan hasil evaluasi tahun 2024, terdapat 80 program atau 77,7 persen dari total keseluruhan program yang masuk dalam kategori ini (**Gambar 4.7**). Hal ini menunjukkan efektivitas pelaksanaan program yang tinggi baik dari sisi pencapaian output maupun efisiensi penggunaan anggaran. Adapun program-program yang termasuk dalam kategori *Sangat Baik* antara lain adalah:

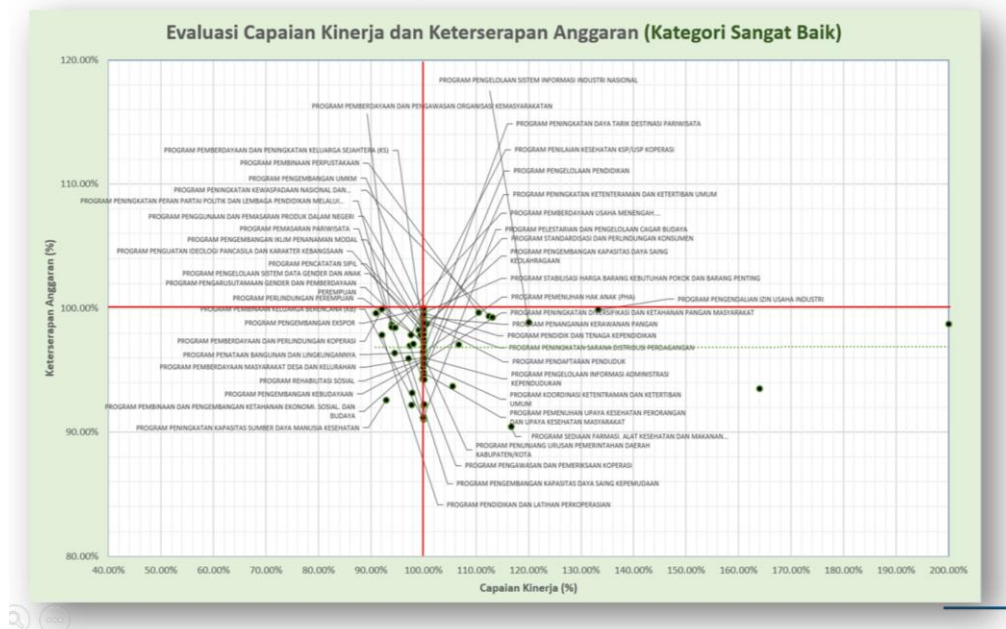
- 1) Program Rehabilitasi Sosial,
- 2) Program Perlindungan dan Jaminan Sosial,
- 3) Program Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum,

- 4) Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik,
- 5) Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan,
- 6) Program Stabilitas Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting,
- 7) Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat,
- 8) Program Penanganan Kerawanan Pangan,
- 9) Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan,
- 10) Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan,
- 11) Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak,
- 12) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota,
- 13) Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat,
- 14) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan,
- 15) Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman,
- 16) Program Perlindungan Perempuan,
- 17) Program Pemenuhan Hak Anak (PHA),
- 18) Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB),
- 19) Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS),
- 20) Program Pengelolaan Pendidikan,
- 21) Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan,
- 22) Program Pembinaan Perpustakaan,
- 23) Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan,
- 24) Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan,
- 25) Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum,
- 26) Program Pengembangan Kebudayaan,
- 27) Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya,
- 28) Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Bangsa,
- 29) Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya,
- 30) Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial,
- 31) Program Perencanaan dan Pembangunan Industri,
- 32) Program Pengendalian Izin Usaha Industri,
- 33) Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional,
- 34) Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan,
- 35) Program Pengembangan Ekspor,
- 36) Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen,

- 37) Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri,
- 38) Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi,
- 39) Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi,
- 40) Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian,
- 41) Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi,
- 42) Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM),
- 43) Program Pengembangan UMKM,
- 44) Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya,
- 45) Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata,
- 46) Program Pemasaran Pariwisata,
- 47) Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal,
- 48) Program Promosi Penanaman Modal,
- 49) Program Pendaftaran Penduduk,
- 50) Program Pencatatan Sipil,
- 51) Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan,
- 52) Program Pengelolaan Profil Kependudukan,
- 53) Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik,
- 54) Program Pengelolaan Aplikasi Informatika,
- 55) Program Penelitian dan Pengembangan Daerah,
- 56) Program Penyelenggaraan Statistik Sektorial,
- 57) Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi,
- 58) Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat,
- 59) Program Perekonomian dan Pembangunan,
- 60) Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah,
- 61) Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah,
- 62) Program Pengelolaan Barang Milik Daerah,
- 63) Program Pengelolaan Pendapatan Daerah,
- 64) Program Penyelenggaraan Pengawasan,
- 65) Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi,
- 66) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota,
- 67) Program Kepegawaian Daerah,
- 68) Program Pengembangan Sumber Daya Manusia,
- 69) Program Perencanaan Lingkungan Hidup,
- 70) Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI),
- 71) Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah B3,

- 72) Program Pembinaan dan Pengawasan terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH),
- 73) Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup,
- 74) Program Pengelolaan Persampahan,
- 75) Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ),
- 76) Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum,
- 77) Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah,
- 78) Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase,
- 79) Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh,
- 80) Program Penanganan Bencana.

Berdasarkan hasil kategorisasi yang sudah berstatus sangat baik, maka program yang sudah ada pada kategori tersebut hendaknya dipertahankan baik secara kinerja maupun keterserapan anggarannya.



**Gambar 4. 7** Program dengan Kategori Sangat Baik

*Sumber : LKPJ dan LPPD Kota Mojokerto Tahun 2024 (diolah)*

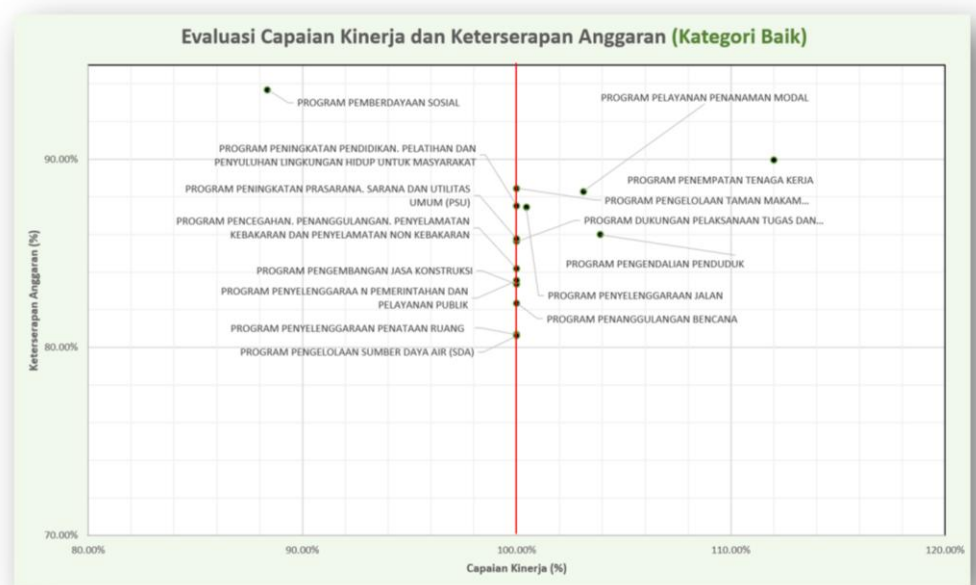
#### ● Evaluasi Capaian Kinerja dan Keterserapan Anggaran Kategori Baik

Pada kategori baik sendiri memiliki program yang termasuk pada salah satu ketentuan tergolong tinggi (76%-90%) dan capaian kinerja sangat tinggi ( $\geq 91\%$ ); keterserapan anggaran tinggi (76%-90%) dan capaian kinerja tinggi (76%-90%); dan keterserapan anggaran sangat tinggi ( $\geq 91\%$ ) dan capaian kinerja tinggi (76%-90%). Pada tahun 2024, terdapat 16 program atau 15,5 persen dari keseluruhan program yang masuk dalam kategori Baik (**Gambar 4.8**). Program-program tersebut antara lain:

- 1) Program Penempatan Tenaga Kerja,

- 2) Program Pemberdayaan Sosial,
- 3) Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan,
- 4) Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan,
- 5) Program Pengendalian Penduduk,
- 6) Program Pelayanan Penanaman Modal,
- 7) Program Pengembangan Jasa Konstruksi,
- 8) Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik,
- 9) Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD,
- 10) Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat,
- 11) Program Penyelenggaraan Jalan,
- 12) Program Penyelenggaraan Penataan Ruang,
- 13) Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU),
- 14) Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA),
- 15) Program Penanggulangan Bencana, dan
- 16) Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran.

Kategori program yang sudah tergolong baik dapat dipertahankan baik secara kinerja ataupun keterserapan anggaran agar nantinya pada pelaksanaan kedepan dapat menjadi lebih baik.



**Gambar 4. 8 Program dengan Kategori Baik**

*Sumber : LKPJ dan LPPD Kota Mojokerto Tahun 2024 (diolah)*



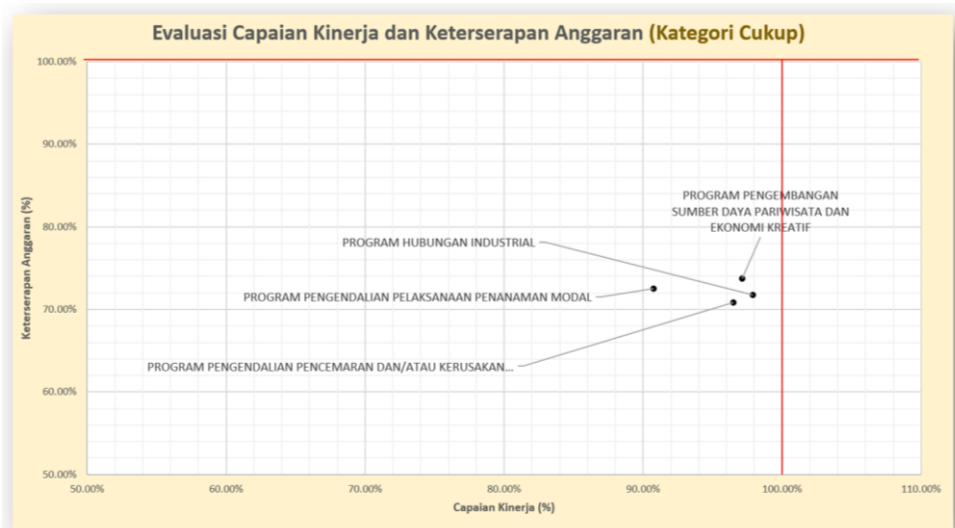
- **Evaluasi Capaian Kinerja dan Keterserapan Anggaran Kategori Cukup**

Pada kategori baik sendiri memiliki program yang termasuk pada salah satu ketentuan yakni ketersediaan anggaran sedang (66%-75%) dan capaian kinerja sangat tinggi ( $\geq 91\%$ ); ketersediaan anggaran rendah (51%-65%) dan capaian kinerja tinggi ( $\geq 91\%$ ); ketersediaan anggaran sedang (66%-75%) dan capaian kinerja tinggi (76%-90%); ketersediaan anggaran rendah (66%-75%) dan capaian kinerja tinggi (76%-90%); ketersediaan anggaran sangat tinggi ( $\geq 91\%$ ) dan capaian kinerja anggaran sedang (66%-75%); ketersediaan anggaran tinggi (76%-90%) dan capaian kinerja anggaran sedang (66%-75%); ketersediaan anggaran sedang (66%-75%) dan capaian kinerja anggaran sedang (66%-75%); %); ketersediaan anggaran sangat tinggi ( $\geq 91\%$ ) dan capaian kinerja anggaran rendah (66%-75%); ketersediaan anggaran tinggi (76%-90%) dan capaian kinerja anggaran rendah (66%-75%).

Berdasarkan hasil evaluasi tahun 2024, terdapat 4 program atau 3,9 persen dari total program yang dikategorikan dalam kelompok Cukup (**Gambar 4.9**). Program-program tersebut meliputi:

- 1) Program Hubungan Industrial,
- 2) Program Pengembangan Sumberdaya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif,
- 3) Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal, dan
- 4) Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup.

Melihat kondisi ini, program dalam kategori Cukup memerlukan perhatian lebih dalam perencanaan, pelaksanaan, serta pengendalian kegiatan dan anggarannya. Diperlukan upaya peningkatan baik dari sisi efisiensi penggunaan anggaran maupun pencapaian kinerja program agar pada periode evaluasi berikutnya dapat meningkat ke kategori yang lebih tinggi dan memberikan manfaat yang lebih optimal bagi pembangunan daerah.



**Gambar 4. 9** Program dengan Kategori Cukup  
 Sumber : LKPJ dan LPPD Kota Mojokerto Tahun 2024 (diolah)



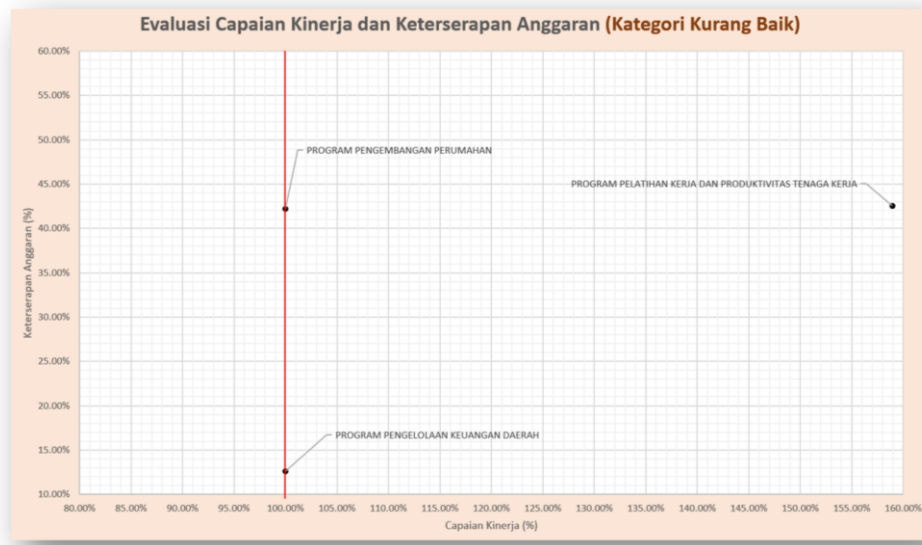
- **Evaluasi Capaian Kinerja dan Keterserapan Anggaran Kategori Kurang Baik**

Pada kategori baik sendiri memiliki program yang termasuk pada salah satu ketentuan yakni keterserapan anggaran sangat rendah ( $\leq 50\%$ ) dan capaian kinerja sangat tinggi ( $\geq 91\%$ ); keterserapan anggaran sangat rendah ( $\leq 50\%$ ) dan capaian kinerja tinggi (76-90%); keterserapan anggaran sangat rendah ( $\leq 50\%$ ) dan capaian kinerja sedang (66%-75%); penyerapan anggaran rendah (51%-65%) dan capaian kinerja sedang (66%-75%); keterserapan anggaran sedang (66%-75%) dan capaian kinerja rendah (51%-65%); penyerapan anggaran sangat tinggi ( $\geq 91\%$ ) dan capaian kinerja sangat rendah ( $\leq 50\%$ ); penyerapan anggaran tinggi (76-90%) dan capaian kinerja sangat rendah ( $\leq 50\%$ ); penyerapan anggaran sedang (66%-75%) dan capaian kinerja sangat rendah ( $\leq 50\%$ ). Berdasarkan hasil evaluasi tahun 2024, terdapat 3 program atau 2,9 persen dari total program yang masuk dalam kategori Kurang Baik (**Gambar 4.10**). Program-program tersebut meliputi: Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja, Program Pengelolaan Keuangan Daerah, dan Program Pengembangan Perumahan. Berikut merupakan penjelasan mengapa ketiga program tersebut memiliki serapan anggaran yang belum optimal:

1. Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja memiliki evaluasi program kategori Kurang Baik, dengan tingkat penyerapan anggaran yang sangat rendah, yaitu hanya sebesar 42,53 persen. Rendahnya serapan ini dipengaruhi oleh menurunnya jumlah peserta pelatihan, seiring dengan meningkatnya tingkat penyerapan tenaga kerja di Kota Mojokerto sehingga kebutuhan masyarakat untuk mengikuti pelatihan kerja semakin berkurang. Selain itu, persyaratan keikutsertaan yang hanya terbuka untuk angkatan kerja. Dari sisi regulasi, adanya penambahan anggaran dari sumber DBHCHT untuk kegiatan pelatihan belum sepenuhnya dapat dimanfaatkan secara optimal karena keterbatasan waktu implementasi dan keterbatasan jumlah peserta.
2. Program Pengelolaan Keuangan Daerah juga termasuk dalam kategori evaluasi program Kurang Baik, dengan tingkat penyerapan anggaran yang sangat rendah yaitu hanya sebesar 12,59 persen. Rendahnya serapan terutama disebabkan oleh tidak terealisasinya anggaran pada pos Belanja Tidak Terduga (BTT), yang secara prinsip memang hanya digunakan untuk kondisi darurat dan bersifat situasional. Sepanjang tahun berjalan, tidak terdapat kejadian atau kebutuhan yang memerlukan penggunaan BTT, sehingga secara alami anggaran pada pos tersebut tidak terserap. Selain itu, penggunaan BTT juga memerlukan persetujuan dari DPRD dan disesuaikan dengan perkembangan kondisi lapangan.

3. Program Pengembangan Perumahan juga dievaluasi dalam kategori Kurang Baik, dengan serapan anggaran sebesar 42,21 persen. Rendahnya serapan dipengaruhi oleh kondisi aktual di lapangan, dimana kegiatan yang direncanakan, khususnya yang terkait dengan fasilitasi pengelolaan kelembagaan dan pemeliharaan gedung Rusunawa, tidak dapat terealisasi penuh. Hal ini disebabkan karena selama periode anggaran berjalan, kondisi bangunan Rusunawa masih dalam keadaan baik dan tidak memerlukan pemeliharaan besar, sehingga anggaran yang telah dialokasikan untuk kegiatan tersebut tidak terserap secara maksimal.

Ketiga program ini memerlukan perhatian khusus, terutama dalam perbaikan aspek perencanaan, implementasi, serta pengelolaan anggaran. Evaluasi menyeluruh terhadap hambatan teknis maupun non-teknis perlu dilakukan agar program-program ini dapat ditingkatkan kualitas pelaksanaannya dan tidak kembali masuk dalam kategori yang sama pada evaluasi tahun berikutnya. Peningkatan koordinasi lintas perangkat daerah, penguatan manajemen program, dan pemantauan berkala menjadi langkah strategis yang perlu segera diambil.



**Gambar 4. 10** Program dengan Kategori Kurang Baik  
*Sumber : LKPJ dan LPPD Kota Mojokerto Tahun 2024 (diolah)*

**Tabel 4.13** menyajikan urutan program dengan kategorisasi sangat baik terdapat 80 program, kategori baik 16 program, kategori cukup terdapat 4 program, dan kategori kurang baik terdapat 3 program yang juga disertakan Perangkat Daerah pengampu masing-masing program.

**Tabel 4. 13 Evaluasi Kinerja Program dan Serapan Anggaran Daerah Tahun 2024**

No	Program	Evaluasi Program Kinerja	Keterangan	Evaluasi Anggaran	Keterangan	Kode Evaluasi Program	OPD Pengampu
		%		%			
1	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	100,00%	Sangat Tinggi	95,90%	Sangat Tinggi	SB	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	300,00%	Sangat Tinggi	96,08%	Sangat Tinggi	SB	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
3	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	100,00%	Sangat Tinggi	95,48%	Sangat Tinggi	SB	Kecamatan Magersari
4	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	93,92%	Sangat Tinggi	98,69%	Sangat Tinggi	SB	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
5	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	93,92%	Sangat Tinggi	98,49%	Sangat Tinggi	SB	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
6	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	100,00%	Sangat Tinggi	99,61%	Sangat Tinggi	SB	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
7	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	100,00%	Sangat Tinggi	95,72%	Sangat Tinggi	SB	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
8	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	100,00%	Sangat Tinggi	99,28%	Sangat Tinggi	SB	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
9	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	100,00%	Sangat Tinggi	96,02%	Sangat Tinggi	SB	Kecamatan Magersari
10	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	100,00%	Sangat Tinggi	97,16%	Sangat Tinggi	SB	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
11	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	100,00%	Sangat Tinggi	98,39%	Sangat Tinggi	SB	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
12	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	99,98%	Sangat Tinggi	96,22%	Sangat Tinggi	SB	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
13	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	100,00%	Sangat Tinggi	94,82%	Sangat Tinggi	SB	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
14	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	92,86%	Sangat Tinggi	92,57%	Sangat Tinggi	SB	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
15	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	116,67%	Sangat Tinggi	90,43%	Sangat Tinggi	SB	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
16	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	100,00%	Sangat Tinggi	97,32%	Sangat Tinggi	SB	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

No	Program	Evaluasi Program Kinerja	Keterangan	Evaluasi Anggaran	Keterangan	Kode Evaluasi Program	OPD Pengampu
		%		%			
17	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	100,00%	Sangat Tinggi	96,43%	Sangat Tinggi	SB	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
18	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	100,00%	Sangat Tinggi	91,04%	Sangat Tinggi	SB	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
19	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	100,00%	Sangat Tinggi	97,88%	Sangat Tinggi	SB	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
20	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	99,87%	Sangat Tinggi	95,21%	Sangat Tinggi	SB	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
21	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	100,00%	Sangat Tinggi	99,63%	Sangat Tinggi	SB	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
22	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	110,53%	Sangat Tinggi	99,63%	Sangat Tinggi	SB	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
23	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	97,09%	Sangat Tinggi	95,93%	Sangat Tinggi	SB	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata
24	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	99,15%	Sangat Tinggi	98,22%	Sangat Tinggi	SB	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata
25	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	100,00%	Sangat Tinggi	94,81%	Sangat Tinggi	SB	Satpol PP
26	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	100,00%	Sangat Tinggi	95,79%	Sangat Tinggi	SB	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
27	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	100,00%	Sangat Tinggi	91,17%	Sangat Tinggi	SB	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
28	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	100,00%	Sangat Tinggi	97,91%	Sangat Tinggi	SB	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
29	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	100,00%	Sangat Tinggi	95,86%	Sangat Tinggi	SB	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
30	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	112,50%	Sangat Tinggi	99,37%	Sangat Tinggi	SB	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
31	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	300,00%	Sangat Tinggi	97,79%	Sangat Tinggi	SB	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
32	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	133,33%	Sangat Tinggi	99,87%	Sangat Tinggi	SB	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
33	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	120,00%	Sangat Tinggi	98,89%	Sangat Tinggi	SB	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
34	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	100,00%	Sangat Tinggi	99,08%	Sangat Tinggi	SB	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan

No	Program	Evaluasi Program Kinerja	Keterangan	Evaluasi Anggaran	Keterangan	Kode Evaluasi Program	OPD Pengampu
		%		%			
35	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	100,00%	Sangat Tinggi	99,98%	Sangat Tinggi	SB	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
36	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	100,00%	Sangat Tinggi	98,19%	Sangat Tinggi	SB	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
37	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	100,00%	Sangat Tinggi	98,75%	Sangat Tinggi	SB	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
38	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	97,33%	Sangat Tinggi	96,98%	Sangat Tinggi	SB	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
39	PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	97,56%	Sangat Tinggi	97,84%	Sangat Tinggi	SB	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
40	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	92,11%	Sangat Tinggi	97,84%	Sangat Tinggi	SB	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
41	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	92,11%	Sangat Tinggi	99,92%	Sangat Tinggi	SB	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
42	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	94,58%	Sangat Tinggi	98,43%	Sangat Tinggi	SB	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
43	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	100,00%	Sangat Tinggi	99,65%	Sangat Tinggi	SB	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
44	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	100,10%	Sangat Tinggi	96,48%	Sangat Tinggi	SB	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
45	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	99,92%	Sangat Tinggi	96,48%	Sangat Tinggi	SB	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata
46	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	99,85%	Sangat Tinggi	91,17%	Sangat Tinggi	SB	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata
47	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	100,00%	Sangat Tinggi	98,13%	Sangat Tinggi	SB	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu
48	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	1180,00%	Sangat Tinggi	97,58%	Sangat Tinggi	SB	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu
49	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	100,00%	Sangat Tinggi	98,97%	Sangat Tinggi	SB	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
50	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	100,00%	Sangat Tinggi	98,71%	Sangat Tinggi	SB	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

No	Program	Evaluasi Program Kinerja	Keterangan	Evaluasi Anggaran	Keterangan	Kode Evaluasi Program	OPD Pengampu
		%		%			
51	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	100,00%	Sangat Tinggi	96,01%	Sangat Tinggi	SB	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
52	PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	100,00%	Sangat Tinggi	98,59%	Sangat Tinggi	SB	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
53	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	200,00%	Sangat Tinggi	98,73%	Sangat Tinggi	SB	Dinas Komunikasi dan Informatika
54	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	90,91%	Sangat Tinggi	99,61%	Sangat Tinggi	SB	Dinas Komunikasi dan Informatika
55	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	113,16%	Sangat Tinggi	99,25%	Sangat Tinggi	SB	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah
56	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	100,00%	Sangat Tinggi	99,96%	Sangat Tinggi	SB	Dinas Komunikasi dan Informatika
57	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	100,00%	Sangat Tinggi	97,54%	Sangat Tinggi	SB	Sekretariat Daerah
58	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	99,45%	Sangat Tinggi	97,87%	Sangat Tinggi	SB	Sekretariat Daerah
59	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	100,00%	Sangat Tinggi	92,16%	Sangat Tinggi	SB	Sekretariat Daerah
60	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	100,58%	Sangat Tinggi	98,71%	Sangat Tinggi	SB	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah
61	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	100,00%	Sangat Tinggi	97,88%	Sangat Tinggi	SB	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah
62	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	97,78%	Sangat Tinggi	93,18%	Sangat Tinggi	SB	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah
63	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	100,00%	Sangat Tinggi	98,26%	Sangat Tinggi	SB	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah
64	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	164,00%	Sangat Tinggi	93,49%	Sangat Tinggi	SB	Inspektorat
65	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	300,00%	Sangat Tinggi	96,38%	Sangat Tinggi	SB	Inspektorat
66	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	99,73%	Sangat Tinggi	98,83%	Sangat Tinggi	SB	Semua Perangkat Daerah
67	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	105,56%	Sangat Tinggi	93,71%	Sangat Tinggi	SB	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM
68	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	94,53%	Sangat Tinggi	96,37%	Sangat Tinggi	SB	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM

No	Program	Evaluasi Program Kinerja	Keterangan	Evaluasi Anggaran	Keterangan	Kode Evaluasi Program	OPD Pengampu
		%		%			
69	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	100,00%	Sangat Tinggi	99,34%	Sangat Tinggi	SB	Dinas Lingkungan Hidup
70	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	106,69%	Sangat Tinggi	97,05%	Sangat Tinggi	SB	Dinas Lingkungan Hidup
71	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	100,00%	Sangat Tinggi	94,56%	Sangat Tinggi	SB	Dinas Lingkungan Hidup
72	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	100,00%	Sangat Tinggi	95,49%	Sangat Tinggi	SB	Dinas Lingkungan Hidup
73	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	100,00%	Sangat Tinggi	96,88%	Sangat Tinggi	SB	Dinas Lingkungan Hidup
74	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	98,11%	Sangat Tinggi	97,14%	Sangat Tinggi	SB	Dinas Lingkungan Hidup
75	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	97,70%	Sangat Tinggi	92,20%	Sangat Tinggi	SB	Dinas Perhubungan
76	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	99,84%	Sangat Tinggi	94,30%	Sangat Tinggi	SB	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
77	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	100,14%	Sangat Tinggi	92,24%	Sangat Tinggi	SB	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
78	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	100,08%	Sangat Tinggi	94,26%	Sangat Tinggi	SB	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
79	PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	100,00%	Sangat Tinggi	98,84%	Sangat Tinggi	SB	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
80	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	100,00%	Sangat Tinggi	99,48%	Sangat Tinggi	SB	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
81	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	112,00%	Sangat Tinggi	89,97%	Tinggi	B	Sekretariat Daerah
82	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	88,37%	Tinggi	93,69%	Sangat Tinggi	B	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
83	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	100,00%	Sangat Tinggi	88,45%	Tinggi	B	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak



No	Program	Evaluasi Program Kinerja	Keterangan	Evaluasi Anggaran	Keterangan	Kode Evaluasi Program	OPD Pengampu
		%		%			
84	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	90,00%	Tinggi	98,22%	Sangat Tinggi	B	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
85	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	103,89%	Sangat Tinggi	86,00%	Tinggi	B	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
86	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	103,11%	Sangat Tinggi	88,28%	Tinggi	B	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu
87	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	100,00%	Sangat Tinggi	83,36%	Tinggi	B	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
88	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	100,00%	Sangat Tinggi	83,56%	Tinggi	B	Kecamatan Magersari
89	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	100,00%	Sangat Tinggi	85,64%	Tinggi	B	Sekretariat DPRD
90	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	100,00%	Sangat Tinggi	87,53%	Tinggi	B	Dinas Lingkungan Hidup
91	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	100,45%	Sangat Tinggi	87,44%	Tinggi	B	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
92	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	100,00%	Sangat Tinggi	80,68%	Tinggi	B	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
93	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	100,00%	Sangat Tinggi	85,76%	Tinggi	B	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
94	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	100,00%	Sangat Tinggi	80,63%	Tinggi	B	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
95	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	100,00%	Sangat Tinggi	82,36%	Tinggi	B	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
96	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	100,00%	Sangat Tinggi	84,19%	Tinggi	B	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
97	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	97,88%	Sangat Tinggi	71,74%	Sedang	C	Sekretariat Daerah



No	Program	Evaluasi Program Kinerja	Keterangan	Evaluasi Anggaran	Keterangan	Kode Evaluasi Program	OPD Pengampu
		%		%			
98	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	97,14%	Sangat Tinggi	73,77%	Sedang	C	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata
99	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	90,77%	Sangat Tinggi	72,55%	Sedang	C	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu
100	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	96,51%	Sangat Tinggi	70,83%	Sedang	C	Dinas Lingkungan Hidup
101	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	158,93%	Sangat Tinggi	42,53%	Sangat Rendah	KB	Sekretariat Daerah
102	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	100,00%	Sangat Tinggi	42,21%	Sangat Rendah	KB	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
103	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	100,00%	Sangat Tinggi	12,59%	Sangat Rendah	KB	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah

Sumber : LKPJ dan LPPD Kota Mojokerto Tahun 2024 (diolah)

### 4.3 Faktor Penghambat dan Pendorong Kinerja Pemerintah Daerah Kota Mojokerto Tahun 2024

Selama proses kajian performa kinerja Pemerintah Daerah Kota Mojokerto Tahun 2023 ditemukan beragam faktor yang menghambat capaian target pada program maupun indikator program dari 6 indikator tujuan serta 25 indikator sasaran. Pada Indeks Kinerja Utama (IKU), terdapat 3 dari 6 indikator yang belum tercapai diantaranya adalah Indeks Gini, Indeks Reformasi Birokrasi, dan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup. Pada Indeks Gini, ketimpangan masih terjadi akibat terbatasnya akses pekerjaan layak bagi kelompok berpendidikan rendah, dominasi sektor informal, serta pemulihan ekonomi pascapandemi yang hanya dirasakan kelompok menengah ke atas. Di sisi lain, kemiskinan kronis menyulitkan penurunan angka kemiskinan secara signifikan. Untuk Indeks Reformasi Birokrasi, kendala utama meliputi belum maksimalnya pengawalan Road Map nasional ke tingkat instansi, target yang tidak progresif, aksi konkret yang terbatas, serta indikator output dan alokasi anggaran yang belum mencerminkan dampak substantif. Sementara itu, pencapaian IKLH terhambat oleh pencemaran sungai akibat limbah domestik, penyebaran fosfat, dan peningkatan TSS. Penghijauan yang belum merata serta tingginya polusi kendaraan dan industri juga menjadi hambatan, ditambah kurangnya reboisasi yang berdampak pada penurunan daya dukung lingkungan. Selengkapnya untuk faktor penghambat dan pendorong pada IKU terdapat pada **Tabel 4.14**. Pada IKS terdapat 11 dari 25 Indikator yang belum mencapai target yang tentunya perlu tindakan lebih untuk mencapai target. Indikator yang belum tercapai antara lain Indeks Pemberdayaan Gender, Indeks Kesehatan, Indeks Kesalehan Sosial, Pertumbuhan PDRB Sektor Industri Pengolahan, Pertumbuhan PDRB Sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi, Pertumbuhan PDRB Sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum, Nilai Realisasi Investasi, Indeks Kualitas Air, dan Indeks Kualitas Udara. Sementara itu, untuk Sistem Merit dan Indeks Pembangunan Pemuda belum terdapat realisasi data di tahun 2024. Selengkapnya untuk faktor penghambat dan pendorong pada IKS terdapat pada **Tabel 4.15**

**Tabel 4. 14** Faktor Penghambat dan Pendukung IKU Kota Mojokerto

Tujuan	Indikator Tujuan	Faktor Pendorong	Faktor Penghambat
1 Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Menuju Taraf Hidup yang Lebih Baik	Angka Kemiskinan	Pemerintah Kota Mojokerto menerapkan tiga strategi untuk menurunkan kemiskinan, terutama yang tergolong ekstrem, yaitu dengan mengurangi beban pengeluaran, melakukan peningkatan pendapatan, dan menghapus kantong kemiskinan. Selain itu, Pemerintah Kota Mojokerto juga memberikan berbagai bantuan, khususnya kepada masyarakat miskin, untuk mengurangi beban kemiskinan yang harus mereka panggul. Hal ini dilakukan melalui penyaluran bantuan rutin seperti BNPT (Bantuan Pangan Non-Tunai) APBD kepada 3.500 keluarga penerima manfaat (KPM), Bantuan Langsung Tunai Buruh Rokok dan Masyarakat Lainnya kepada 129 jiwa, Program Keluarga Harapan (PKH) kepada 3.334 KK, layanan kesehatan gratis melalui JKN (Jaminan Kesehatan Nasional) PBID (Penerima Bantuan luran) dan melakukan kolaborasi dengan Baznas Kota Mojokerto dalam menjalankan program bakti sosial. Program tersebut dilaksanakan dengan memberikan bantuan secara langsung berupa bahan pokok untuk warga kurang mampu, tambahan makanan untuk anak <i>stunting</i> , dan bantuan biaya pendidikan untuk anak yatim.	
	Indeks Gini		Beberapa permasalahan yang muncul dapat disebabkan dari faktor kesenjangan akses pekerjaan layak dan berkelanjutan, terutama bagi masyarakat dengan pendidikan rendah, serta dominasi lapangan kerja informal dengan pendapatan tidak menentu masih ada. Penurunan Indeks Gini dari tahun sebelumnya menandakan bahwa

Tujuan	Indikator Tujuan	Faktor Pendorong	Faktor Penghambat
			<p>ketimpangan pendapatan masyarakat daerah sudah mampu ditekan meskipun masih berada di bawah target. Hal yang mempengaruhi adalah masih adanya penduduk miskin yang mencapai 7,43 ribu jiwa di Kota Mojokerto. Meskipun jumlah penduduk miskin di Kota Mojokerto telah mengalami penurunan, namun kemungkinan yang tersisa adalah mereka yang termasuk dalam kategori kemiskinan kronis, sehingga menyulitkan upaya untuk menekan angka kemiskinan kepada target yang telah ditentukan. Selain itu, terjadinya pemulihan pasca pandemi Covid-19 tak hanya memulihkan perekonomian masyarakat, tetapi turut meningkatkan ketimpangan di masyarakat. Hal ini dikarenakan, pemulihan ekonomi hanya dirasakan oleh sebagian kelompok masyarakat saja, seperti kelompok berpenghasilan tinggi, kelompok dengan pendidikan tinggi, penduduk dengan pekerjaan di sektor jasa dan perdagangan, serta kelompok pengusaha.</p> <p>Peningkatan ketimpangan atau kenaikan Gini Ratio tahun ini disebabkan oleh adanya peningkatan pengeluaran per kapita yang lebih besar pada kelompok penduduk dengan pengeluaran menengah dan atas. Berdasarkan hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS) 2024, kelompok 40 persen penduduk dengan pengeluaran menengah mengalami kenaikan pengeluaran sebesar 5,52 persen, sementara kelompok 20 persen teratas mengalami kenaikan sebesar 3,23 persen. Namun, kenaikan pengeluaran ini tidak diimbangi dengan peningkatan yang signifikan pada kelompok 40 persen terbawah, yang hanya mengalami kenaikan sebesar 0,88 persen. Artinya, meskipun kelompok penduduk dengan pengeluaran menengah dan atas semakin</p>

Tujuan		Indikator Tujuan	Faktor Pendorong	Faktor Penghambat
				sejahtera, kelompok penduduk miskin dan rentan miskin tidak merasakan perbaikan yang cukup berarti dalam kesejahteraan mereka
2	Mewujudkan Sumber Daya Manusia Unggul, Bermartabat dan Berdaya Saing	Indeks Pembangunan Manusia	Pertumbuhan IPM Kota Mojokerto mengalami percepatan dari tahun sebelumnya. Hal ini dipengaruhi oleh peningkatan seluruh dimensi pembentuk IPM, seperti umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan dan standar hidup layak. Dimensi umur panjang dan hidup sehat, bayi yang lahir pada tahun 2024 memiliki harapan untuk hidup hingga 75,99 tahun. Angka tersebut meningkat 0,19 tahun dibandingkan dengan mereka yang lahir pada tahun sebelumnya. Dimensi pengetahuan, harapan lama sekolah (HLS) penduduk umur 7 tahun meningkat 0,09 tahun dari 14,04 tahun pada 2023 menjadi 14,13 tahun pada 2024. Sedangkan rata-rata lama sekolah (RLS) penduduk umur 25 tahun ke atas meningkat 0,33 tahun dari 11,05 tahun pada 2023 menjadi 11,38 tahun pada 2024. Terakhir, dimensi standar hidup layak yang diukur berdasarkan rata-rata pengeluaran riil per kapita per tahun (yang disesuaikan) meningkat 420 ribu rupiah (2,91%) dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Dengan adanya peningkatan dari ketiga dimensi tersebut, pembangunan manusia di Kota Mojokerto telah mengalami kemajuan dan telah berhasil mencapai level sangat tinggi.	
3	Meningkatkan Penguatan Ekonomi Berbasis Potensi Daerah dan Investasi	Pertumbuhan Ekonomi	Pertumbuhan ekonomi Kota Mojokerto dipengaruhi oleh penurunan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), yang menurun menjadi 3,76%. Angka tersebut lebih rendah dibandingkan dengan TPT Nasional yang	

Tujuan		Indikator Tujuan	Faktor Pendorong	Faktor Penghambat
			sebesar 4,91% dan TPT Provinsi Jawa Timur yang sebesar 4,19%. Penurunan ini menunjukkan adanya peningkatan serapan tenaga kerja yang berkontribusi positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Pemerintah Kota Mojokerto berkomitmen untuk menciptakan usaha yang kondusif mengenai pemberian insentif kepada investor dengan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda). Langkah ini bertujuan untuk menarik lebih banyak investor, baik lokal maupun internasional. Pemerintah Kota Mojokerto juga memperkuat pengembangan sektor pariwisata sebagai upaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui peningkatan kunjungan wisatawan	
4	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang Dinamis dan Akuntabel	Indeks Reformasi Birokrasi		<p>Pada penilaian Rencana Aksi Pembangunan RB General antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Belum seluruh KU pada Road Map RB nasional dikawal pada Road Map Instansional;</li><li>2. Masih ditemukan target tahun 2024 yang sama besarnya dengan realisasi tahun 2023 (target tidak progresif);</li><li>3. Masih ditemukan sebagian kecil KU yang belum didukung oleh aksi-aksi konkret yang cukup;</li><li>4. Masih ditemukan cukup banyak indikator output yang belum secara utuh; cukup untuk mengukur ketercapaian substansi rencana aksi; dan</li><li>5. Alokasi anggaran belum sepenuhnya mempertimbangkan tingkatan dampak yang dihasilkan oleh sebuah rencana aksi terhadap pencapaian target KU, sehingga berpotensi menyebabkan inefisiensi penggunaan anggaran.</li></ol>
5	Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup yang Layak	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup		Hasil pencapaian IKLH masih di bawah target yang ditetapkan, akibat berbagai faktor pada indikator penunjang nilai IKLH. Pada indikator Indeks Kualitas Air

Tujuan	Indikator Tujuan	Faktor Pendorong	Faktor Penghambat
			(IKA), rendahnya nilai indikator dipengaruhi oleh pencemaran sungai akibat rendahnya pengolahan limbah domestik, sehingga menyebabkan tingginya bakteri <i>Fecal coliform</i> ; adanya kandungan fosfat dari detergen dan limbah rumah tangga ke badan air; serta peningkatan TSS/padatan tersuspensi akibat erosi dan sampah yang ada di sungai. Analisis Indikator Indeks Kualitas Udara (IKU) menunjukkan hasil yang termasuk dalam kategori baik. Hal ini akibat dilakukannya penanaman pohon di sempadan jalan, meski belum merata di seluruh wilayah di Kota Mojokerto. Kontribusi sumber pencemar seperti emisi kendaraan bermotor dan aktivitas industri masih cukup tinggi. Sedangkan pada Indikator Indeks Kualitas Lahan (IKL) masih terjadi pemotongan pohon yang tidak diimbangi dengan reboisasi yang cukup, sehingga menyebabkan peningkatan suhu kota dan berkurangnya daya dukung lingkungan terhadap ekosistem.

Tabel 4. 15 Faktor Penghambat dan Pendukung IKS Kota Mojokerto

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Faktor Pendorong	Faktor Penghambat
1 Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Menuju Taraf Hidup yang Lebih Baik	Menurunnya Tingkat Pengangguran Masyarakat	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	Menurunnya TPT di Kota Mojokerto ditandai dengan banyaknya warga Kota Mojokerto yang sudah memiliki pekerjaan. Dalam upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang ada, Pemerintah Kota 2025 Mojokerto berusaha meningkatkan kemampuan dan keterampilan angkatan kerja. Hal ini dilakukan dengan memberikan pelatihan yang melibatkan dinas terkait, terutama Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan. Pelatihan yang diberikan mencakup pelatihan keterampilan produksi makanan dan minuman hingga ekonomi kreatif. Pemerintah Kota Mojokerto telah berkolaborasi dengan Balai Latihan Kerja (BLK) Mojokerto, untuk meningkatkan kemampuan warga dengan memberikan pelatihan bersertifikasi kompetensi kerja. Pemerintah Kota Mojokerto juga secara rutin menggelar bursa kerja yang menyediakan ratusan lowongan pekerjaan dari berbagai perusahaan yang ada di Provinsi Jawa Timur.	
	Terhidarnya Masyarakat dari Kerentanan Ekonomi	Indeks Kedalaman Kemiskinan	Pemerintah Kota Mojokerto telah mengimplementasikan strategi pengentasan kemiskinan ekstrem dengan tiga pendekatan utama, yaitu mengurangi beban pengeluaran, meningkatkan pendapatan, dan menghapus kantong kemiskinan. Program-program yang telah dilakukan meliputi penyaluran bantuan sosial rutin seperti BNPT APBD, memberikan layanan Kesehatan gratis melalui JKN/PBID, kegiatan bakti sosial dengan menyediakan bantuan bahan pokok, tambahan makanan untuk anak stunting, dan bantuan biaya pendidikan untuk anak yatim. Penurunan angka	



Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Faktor Pendorong	Faktor Penghambat
			Indeks Kedalaman Kemiskinan di Kota Mojokerto ini menunjukkan bahwa, rata-rata pengeluaran per kapita penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan setiap bulannya semakin mendekati garis kemiskinan. Menurunnya kedalaman kemiskinan di Kota Mojokerto semakin menguntungkan pemerintah karena upaya pengentasan kemiskinan bisa lebih terarah dan tidak terlalu bervariasi mengingat kesenjangan/gap di antara penduduk miskin juga semakin berkurang.	
	Tercukupinya Kebutuhan Pokok	Pendapatan Perkapita/ PDRB Perkapita (Juta Rp)	Peningkatan PAD ini menunjukkan efektivitas pengelolaan sumber daya lokal dan optimalisasi penerimaan daerah. Pada November 2024, Pemerintah Kota Mojokerto tengah mempersiapkan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) pemberian insentif dan kemudahan berinvestasi sebagai salah satu cara untuk memperkuat pertumbuhan ekonomi.	
	Meningkatnya Kesetaraan Gender dalam Pembangunan	Indeks Pemberdayaan Gender		Salah satu komponen penyusun Indeks Pemberdayaan Gender adalah proporsi perempuan di Parlemen. pada tahun 2024, proporsi perempuan yang menjadi anggota DPRD di Kota Mojokerto mengalami penurunan menjadi 16 persen saja, padahal pada tahun 2023 mencapai 20 persen. penurunan proporsi tersebut adalah salah satu penyebab turunnya angka IDG pada tahun 2024. Upaya pemberdayaan gender di Kota Mojokerto pada tahun 2024 menunjukkan inisiatif positif melalui program-program yang melibatkan berbagai pihak, termasuk pemerintah daerah dan organi-

	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Faktor Pendorong	Faktor Penghambat
					sasi wanita. Faktor-faktor keberhasilan pencapaian indikator tersebut dapat dilihat dari adanya inovasi yang dilakukan oleh Dinas Sosial, Pember-dayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DinsosP3A), dengan diadakannya program Obrolan Seputar Perempuan dan Anak (OPerA). Program ini dilaksanakan sebagai upaya promotif, preventif, dan kuratif terhadap permasalahan pember-dayaan perempuan dan perlindungan anak. Tujuan dari inovasi ini untuk membantu perempuan dan anak di Kota Mojokerto untuk lebih memahami hak-hak mereka, sehingga menjadi lebih berdaya, serta mampu menjadi pelopor dan pelindung bagi diri mereka sendiri. Peran aktif Gerakan Organisasi Wanita (GOW) juga menjadi salah satu pendukung dalam menyusun dan melaksanakan program kerja yang mendukung pemberdayaan perempuan Pada tahun 2024, GOW mengadakan berbagai kegiatan, termasuk seminar kesehatan kulit.
2	Mewujudkan Sumber Daya Manusia Unggul, Bermartabat dan Berdaya Saing	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	Indeks Kesehatan		Realisasi kinerja indeks kesehatan tahun 2024 sebesar 0,861 masih sedikit di bawah target 0,865 dengan selisih 0,004. Hal ini menunjukkan perlunya evaluasi dan peningkatan efektivitas program yang ada. Meskipun program telah dilaksanakan dengan capaian yang baik,

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Faktor Pendorong	Faktor Penghambat
				beberapa mungkin menghadapi hambatan seperti resistensi masyarakat terhadap perubahan atau kurangnya koordinasi antar sektor. Perubahan dinamika Kesehatan juga dapat menjadi masalah, adanya perubahan epidemiologi penyakit, kondisi lingkungan dan faktor sosial ekonomi dapat mempengaruhi efektivitas program Kesehatan yang telah direncanakan. Adaptasi dan respons cepat terhadap perubahan menjadi kunci keberhasilan.
	Meningkatnya Kualitas Pendidikan Masyarakat	Indeks Pendidikan	Peningkatan Indeks Pendidikan Kota Mojokerto didukung pula dengan adanya sosialisasi kepada masyarakat akan pentingnya pendidikan bagi putra/putrinya untuk dapat menuntaskan wajib belajar 12 tahun serta bagi masyarakat yang memiliki putra/putri usia 3-6 tahun untuk menyekolahkan di Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD). Sedangkan dari sisi sarana dan prasarana, Pemerintah Kota Mojokerto melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan melakukan rehabilitasi ruang kelas, sarana prasarana dan utilitas ke sekolah-sekolah.	
	Meningkatnya Peran Pemuda Dalam Pembangunan	Indeks Pembangunan Pemuda		Pembangunan Pemuda merupakan gambaran kondisi pemuda yang ada di suatu daerah. Pemerintah Kota Mojokerto terus mempersiapkan generasi muda agar dapat berdaya saing di era saat ini. Pembangunan pemuda tidak terlepas dari pembangunan manusia yang didukung oleh adanya perbaikan dalam kualitas pendidikan, kesehatan dan standar

Tujuan		Sasaran	Indikator Sasaran	Faktor Pendorong	Faktor Penghambat
					hidup. Adanya perbaikan dalam tiga dimensi tersebut secara langsung berkontribusi pada peningkatan kualitas pemuda dan mendukung pengembangan potensi mereka. Pemerintah Kota Mojokerto melalui Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata mengadakan pelatihan kewirausahaan untuk meningkatkan daya saing dan produktivitas pemuda.
		Mewujudkan Masyarakat Bermartabat dan Berbudaya	Indeks Kesalehan Sosial		Penurunan Indeks Kesalehan Sosial Kota Mojokerto tahun 2024 diduga karena 2024 merupakan tahun politik, yaitu adanya pemilihan presiden, legislatif, pemilihan pimpinan daerah sehingga situasi politik meningkat, salah satunya terjadi gesekan antar masyarakat yang disebabkan oleh perbedaan pilihan.
3	Meningkatkan Penguatan Ekonomi Berbasis Potensi Daerah dan Investasi	Meningkatnya Produktivitas Sektor Potensial	Pertumbuhan PDRB Sektor Industri Pengolahan		Capaian kinerja tahun 2024 pada indikator Pertumbuhan PDRB Sektor Industri Pengolahan Kota Mojokerto jauh di bawah target yang telah ditetapkan dan realisasi 3,44 dari target 6,08. Hal ini menunjukkan perlu adanya kontribusi dan kerjasama untuk seluruh stakeholder untuk meningkatkan Industri Pengolahan di Kota Mojokerto. Sektor Industri Pengolahan Kota Mojokerto berupa industri kulit, barang dari kulit, dan alas kaki menjadi hal yang disorot dan menunjang pertumbuhan ekonomi daerah terutama pada sektor industri. Kinerja

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Faktor Pendorong	Faktor Penghambat
				industri alas kaki bukan hanya dari industri besar melainkan juga ada kontribusi para pelaku industri kecil dan menengah (IKM). Selain itu juga dipengaruhi oleh penutupan pabrik Bokormas di Mojokerto
		Pertumbuhan PDRB Sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi		Sektor Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi dan Perawatan Mobil serta Sepeda Motor Kota Mojokerto pun mendapatkan realisasi yang jauh di bawah target. Ketidaktercapaian pada indikator tersebut terjadi pada pelayanan tera/tera ulang, Pemerintah Kota Mojokerto mengalami kendala, terkait tenaga penera yang belum tersedia. Hal ini diatasi dengan mela-kukan kerja sama dengan Pemerintah Kabupaten Mojokerto melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan untuk mendukung penyelenggaraan tera/tera ulang.
	Meningkatnya Daya Saing UMKM	Persentase Pertumbuhan Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil	Persentase Pertumbuhan Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil pada tahun 2025 telah melebihi target yang ditetapkan. Hal tersebut dikarenakan adanya pendampingan dari Pemerintah Kota Mojokerto kepada para pelaku usaha mikro.	
	Meningkatnya Daya Saing Pariwisata	Pertumbuhan PDRB Sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum		Sektor pariwisata di Kota Mojokerto menunjukkan hasil yang kurang dengan pertumbuhan PDRB Sektor Akomodasi dan Makan Minum yang telah melampaui target dengan capaian 61,22%. Belum berhasilnya indikator ini dalam mencapai target yang telah ditetapkan diperlukan

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Faktor Pendorong	Faktor Penghambat
				perhatian khusus untuk bisa mencapai target di tahun selanjutnya. Pertumbuhan PDRB Sektor Akomodasi dan Makan Minum perlu dukungan dari UMKM Kuliner yang telah menjadi penyumbang utama pertumbuhan ekonomi Kota Mojokerto.
	Meningkatnya Daya Tarik Investasi Daerah	Nilai Realisasi Investasi		Nilai realisasi investasi tahun 2024 tercatat sebesar Rp 360.969.890.005 menurun apabila dibandingkandengan nilai realisasi investasi tahun sebelumnya yang sebesar Rp 425.904.411.032. Nilai realisasi investasi pada tahun 2024 juga tidak mencapai target yang telah ditentukan, yakni sebesar Rp 426.000.000.000. Menurunnya nilai realisasi investasi di Kota Mojokerto pada 2024 disebabkan oleh beberapa faktor sebagai berikut: 1. Sebagian besar pelaku usaha yang ada di Kota Mojokerto telah menyampaikan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) di tahun sebelumnya, sehingga pada 2024 belum ada penambahan modal yang dapat dilaporkan kembali melalui aplikasi OSS RBA oleh pelaku usaha; 2. Bagi pelaku usaha baru belum bisa menyampaikan LKPM dikarenakan keterbatasan waktu pelaporan LKPM yang hanya 10 (sepuluh) hari serta masih dalam proses perbaikan

Tujuan		Sasaran	Indikator Sasaran	Faktor Pendorong	Faktor Penghambat
					administrasi perizinan dan perbaikan administrasi pelaporan asetnya.
4	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang Dinamis dan Akuntabel	Meningkatnya Pelayanan Publik yang Inovatif dan Integratif	Indeks Kepuasan Masyarakat	Peningkatan nilai kepuasan masyarakat menunjukkan adanya perbaikan di setiap unsur pelayanan, berdasarkan hasil penilaian masing masing unsur yang mendapatkan nilai terendah.	
			Kepatuhan Standard Pelayanan Publik	<p>Pencapaian tersebut didukung berbagai hal sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pemerintah Kota Mojokerto memiliki komitmen yang kuat dalam melaksanakan reformasi birokrasi, khususnya di bidang pelayanan publik, dengan meningkatkan transparansi, akuntabilitas, serta efisiensi dalam proses pelayanan kepada masyarakat;</li> <li>2. Melaksanakan pembinaan dan pelatihan Aparatur Sipil Negara (ASN) sesuai yang diselenggarakan oleh Pj Wali Kota Mojokerto, Moh Ali Kuncoro, dengan mengadakan forum Fasilitasi Pembinaan Kepatuhan terhadap Standar Pelayanan Publik yang menekankan pentingnya peningkatan kualitas pelayanan publik dan mendorong ASN untuk memahami kebutuhan masyarakat, serta terus berinovasi dalam pelayanan;</li> <li>3. Pemerintah Kota Mojokerto fokus pada peningkatan transparansi informasi, respons terhadap keluhan, aksesibilitas layanan, serta kecepatan dan ketepatan layanan. Upaya ini untuk memastikan masyarakat dapat dengan mudah mengakses informasi dan layanan yang dibutuhkan, serta mendapatkan respons yang cepat terhadap permasalahan yang dihadapi;</li> </ol>	

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Faktor Pendorong	Faktor Penghambat
			4. Koordinasi dan kerja sama yang baik antara Pemerintah Kota Mojokerto dengan Perangkat Daerah, stakeholder serta masyarakat dalam mewujudkan pemerintahan yang baik dan transparan.	
		Indeks Inovasi Daerah	Hal-hal yang telah dilakukan untuk menyandang predikat tersebut adalah sebagai berikut: 1. Adanya kegiatan penjangkaran inovasi, salah satunya melalui event lomba Inovasi Daerah (Mojo Indah), dalam rangka menggali inovasiinovasi baru, baik yang berasal dari Perangkat Daerah maupun masyarakat; 2. Adanya inovasi Klik.Id (Klinik Inovasi Daerah); 3. Melaksanakan monitoring dan evaluasi Indeks Inovasi Daerah (IID) Tahun 2023; 4. <i>Mapping</i> Inovasi Daerah untuk persiapan input Innovative Government Award (IGA) Tahun 2024; 5. Melaksanakan asistensi/pendampingan kelengkapan data dukung inovasi untuk persiapan input Innovative Government Award (IGA) Tahun 2024; 6. Melaksanakan sosialisasi pengisian Indeks Inovasi Daerah (IID) Tahun 2024; dan 7. Melaksanakan pengisian Indeks Inovasi Daerah (IID) Tahun 2024 dengan meng-input inovasi dan data dukungnya secara lengkap.	
		Nilai SPBE	Hasil evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Kota Mojokerto tahun 2024 sebesar 4,32 dengan predikat Memuaskan. Pencapaian nilai SPBE tersebut didukung oleh berbagai hal sebagai berikut: 1. Kebijakan Internal Tata Kelola SPBE (Kebijakan Internal terkait Tata Kelola SPBE dibuktikan dengan	



Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Faktor Pendorong	Faktor Penghambat
			adanya Peraturan Walikota Mojokerto Nomor 35 Tahun 2022 sebagai dasar hukum pengaturan penerapan Arsitektur SPBE); 2. Perencanaan Strategis SPBE (Perencanaan Strategis SPBE dibuktikan dengan adanya SK Walikota Mojokerto Nomor 100.3.3.3/249/417.101.3/2023 sebagai dasar hukum pengaturan Arsitektur SPBE); 3. Teknologi Informasi dan Komunikasi (Teknologi Informasi dan Komunikasi dibuktikan dengan adanya Peraturan Walikota Mojokerto Nomor 35 Tahun 2022 sebagai dasar hukum Pengembangan Aplikasi SPBE); 4. Penyelenggara SPBE dibuktikan dengan adanya SK Walikota Mojokerto Nomor 100.3.3.3/156/417.101.3/2024 sebagai dasar hukum Tim Koordinasi SPBE dan di dalam kebijakan tersebut juga sudah mengatur program kerja.	
	Meningkatnya Akuntabilitas Dalam Manajemen Pemerintahan	Nilai SAKIP	Hasil evaluasi atas akuntabilitas kinerja menunjukkan nilai sebesar 75,13 dengan predikat BB. Pemerintah Kota Mojokerto dalam meningkatkan nilai SAKIP didukung dengan implementasi SAKIP yang sudah sangat baik pada pemerintah daerah dan sebagian besar unit kerja. Hal ini ditandai dengan mulai terwujudnya efisiensi penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja, serta memiliki sistem manajemen kinerja yang andal dan berbasis teknologi informasi.	
		Opini BPK	Faktor keberhasilan pencapaian indikator Opini BPK sebagai berikut: 1. Penyusunan laporan keuangan yang sesuai dengan standar akuntansi pemerintah dan penyajian informasi keuangan yang terbuka kepada publik;	

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Faktor Pendorong	Faktor Penghambat
			<p>2. Belanja daerah diarahkan untuk mendukung upaya peningkatan kualitas birokrasi dan pelayanan publik, peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan serta pemberdayaan ekonomi. Fokus ini menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan daerah tidak hanya memenuhi aspek administratif tetapi juga memberikan manfaat nyata bagi masyarakat;</p> <p>3. Melaksanakan penganggaran, pengelolaan serta pelaporan keuangan APBD pada setiap tahun telah tepat waktu, tepat saji, akuntabel dan sesuai dengan kaidah yang diprasyaratkan; dan</p> <p>4. Kerja sama dan dukungan pelaksanaan penganggaran, pengelolaan, serta pelaporan keuangan di pelaksana teknis pada masing-masing OPD di lingkungan Pemkot Mojokerto, yang selalu berpedoman pada arahan dan petunjuk baik dari BPKP maupun dari BPK.</p>	
		Maturitas SPIP	<p>Hasil evaluasi menunjukkan bahwa proses penilaian mandiri dan penjaminan kualitas maturitas penyelenggaraan SPIP secara terintegrasi pada Pemerintah Kota Mojokerto. Faktor keberhasilan pencapaian indikator Maturitas SPIP sebagai berikut:</p> <p>1. Tahun 2024 dilaksanakan asistensi penilaian mandiri dan evaluasi (penjaminan kualitas) SPIP. Asistensi dilaksanakan kepada semua Perangkat Daerah (PD). Sedangkan penjaminan kualitas hanya dilaksanakan pada beberapa PD yang terkait program prioritas. Keberhasilan dalam pemenuhan data SPIP dilakukan dengan strategi pemenuhan data SPIP secara online, menggunakan media Google Drive. Kelebihan langkah ini adalah pemantauan dapat dilaksanakan secara real time</p>	

Tujuan		Sasaran	Indikator Sasaran	Faktor Pendorong	Faktor Penghambat
				sehingga pemenuhan data dapat berjalan lebih cepat. 2. IMR (Indeks Manajemen Risiko) merupakan bagian dari SPIP terintegrasi. Pelaksanaan kegiatan Manajemen Risiko (MR) meliputi, asistensi, reviu dokumen MR atas perencanaan tahun 2024, dan evaluasi implementasi MR. Kegiatan ini melibatkan seluruh Perangkat Daerah di Kota Mojokerto. Kegiatan ini mendorong nilai IMR Kota Mojokerto dari 3,094 meningkat menjadi 3,117. Sehingga nilai SPIP juga meningkat dari 3,178 menjadi 3,217 atau tetap pada level 3.	
		Meningkatnya Manajemen dan Kapasitas Kepegawaian	Sistem Merit		Terdapat beberapa faktor kegagalan tidak tercapainya target tersebut: 1. Belum dituangkannya data verifikasi hasil kuesioner evaluasi pasca latsar ke dalam laporan; 2. Belum adanya kebijakan internal terkait pengisian JPTsecara terbuka serta tata cara promosi dan mutasi, yang mengacu pada <i>talent pool</i> dan rencana aksi; dan 3. Keterbatasan implementasi teknologi informasi dalam manajemen SDM, seperti belum terintegrasinya e-kinerja dengan perhitungan TPP dan pengembangan karierpegawai.
5	Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup yang Layak	Menurunnya Tingkat Pencemaran Lingkungan	Indeks Kualitas Air		Pada indikator Indeks Kualitas Air (IKA) diperoleh gambaran pencemar sungai di Kota Mojokerto diindikasikan berasal dari:

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Faktor Pendorong	Faktor Penghambat
				<p>1. Banyaknya wilayah dengan tangki septik yang belum terolah dan dimasukkan ke saluran/anak sungai/sungai, sehingga menyebabkan tingginya bakteri <i>Fecal Coliform</i> di dalam badan air;</p> <p>2. Tingginya kandungan Fosfat yang masuk ke sungai yang utamanya berasal dari detergen dan air buangan rumah; dan</p> <p>3. Tingginya TSS/padatan tersuspensi yang berasal dari lumpur/tanah liat yang terbawa ke badan air (saat musim penghujan) serta endapan sampah dan limbah (di musim kemarau).</p>
		Indeks Kualitas Udara		<p>Pada indikator Indeks Kualitas Udara terdapat beberapa hal yang telah dilaksanakan untuk meningkatkan IKU. Salah satunya dengan melakukan penanaman pohon di sempadan jalan untuk meningkatkan penyerapan karbon. Kegiatan ini dilakukan dengan berkolaborasi dengan Saka Kalpataru/Gerakan Pramuka. Akan tetapi pelaksanaan penghijauan tersebut belum merata di seluruh daerah di Kota Mojokerto. Di sisi lain, faktor penghambat tercapainya IKU sesuai target adalah kontribusi sumber pencemar seperti emisi kendaraan bermotor dan aktivitas industri masih cukup tinggi.</p>

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Faktor Pendorong	Faktor Penghambat
	Tersedianya Kawasan Permukiman dengan Layak	Indeks Infrastruktur Permukiman	<p>Keberhasilan tersebut dipengaruhi beberapa faktor sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Sepanjang tahun 2024, Pemerintah Kota Mojokerto berhasil menuntaskan 10 proyek strategis yang mencakup berbagai sektor infrastruktur, seperti revitalisasi Sentra Alas Kaki Prajuritkulon, pembangunan Taman Bahari Majapahit (TBM), pembangunan kantor Kecamatan Kranggan dan Kelurahan Sentanan, peningkatan Jalan Cencer, pembangunan Gedung penunjang Galeri Soekarno di SDN Purwotengah, pemba-ngunan Gedung Gayatri;</li><li>2. Telah dibangunnya 7 unit Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) yang tersebar di 7 kelurahan dan 12 unit sanitasi septik;</li><li>3. Telah dilakukan penyambungan perpipaan PDAM untuk warga sebanyak 58 SR terdiri dari Kecamatan Kranggan 21 SR, Kecamatan Magersari 21 SR, dan Kecamatan Prajurit Kulon 16 SR;</li><li>4. Berkurangnya wilayah kumuh dengan adanya bantuan rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) sebanyak 133 unit; dan</li><li>5. Telah dibangunnya 94 gapura dan melakukan pemeliharaan rusunawa.</li></ol>	
	Meningkatnya Kesiapsiagaan Menghadapi Bencana	Indeks Risiko Bencana	<p>Pencapaian tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor keberhasilan, sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Pembentukan Satuan Karya (SAKA) Penanggulangan Bencana yang melibatkan generasi muda Pramuka dalam pelatihan keterampilan dan kesiapsiagaan menghadapi bencana;</li></ol>	

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Faktor Pendorong	Faktor Penghambat
			<div>2. Kolaborasi yang efektif antara pemerintah, lembaga bantuan, organisasi non-pemerintah dan masyarakat lokal, yang dapat memastikan respons cepat dan terkoordinasi terhadap bencana;</div> <div>3. Peningkatan kapasitas SDM dalam penanggulangan bencana dilakukan melalui pelatihan dan sosialisasi kepada masyarakat yang termasuk dalam relawa, tagana, linmas serta lainnya;</div> <div>4. Pemerintah secara proaktif melakukan rehabilitasi dan pembangunan prasarana penanggulangan bencana; dan</div> <div>5. Penggunaan inovasi berbasis elektronik sehingga membuat masyarakat mudah dalam mendapatkan informasi.</div>	













## 4.4 Prediksi Capaian Indikator Kota Mojokerto

Selain penilaian dan evaluasi capaian IKU Kota Mojokerto, turut dilakukan perhitungan prediksi terhadap capaian IKU berdasarkan P-RKPD Kota Mojokerto Tahun 2024. Prediksi ini disusun dengan mengacu pada tiga asumsi utama dimana penjelasan teknisnya dijabarkan lebih lanjut pada subbab metodologi kajian di Bab 1 yang mencakup:

- Angka capaian IKU diperkirakan akan terus meningkat hingga tahun 2025;
- Prediksi dihitung berdasarkan tren kinerja Kota Mojokerto selama periode 2020 hingga 2024, baik peningkatan maupun penurunan; dan
- Hasil proyeksi dibagi ke dalam tiga skenario, yaitu pesimis, moderat, dan optimis.

Perkiraan capaian IKU dan IKS Kota Mojokerto untuk tahun 2025 disajikan pada Tabel 4.16 dan Tabel 4.17.

**Tabel 4. 16** Prediksi Capaian IKU Kota Mojokerto Tahun 2025

Indikator Tujuan	Keterangan	Prediksi 2025			Target 2025	Prediksi di tahun 2025	Upaya yang dilakukan
		Pesimis	Moderate	Optimis			
Angka Kemiskinan	<i>Lower Better</i>	5,37	5,30	5,16	5,42		
Indeks Gini	<i>Lower Better</i>	0,34	0,33	0,31	0,352		
Indeks Pembangunan Manusia	<i>Higher Better</i>	82,15	82,46	82,61	81,38		
Pertumbuhan Ekonomi	<i>Lower Better</i>	4,11	3,41	2,55	2,79		
Indeks Reformasi Birokrasi	<i>Higher Better</i>	87,71	89,62	91,96	87,75		
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	<i>Higher Better</i>	57,68	58,75	59,81	57,56		

**Keterangan :**



: Melampaui



: Tercapai



: Belum Tercapai



: Dipertahankan





























: Perlu Perhatian Lebih

*Sumber : Tim Penyusun, 2025*

Berdasarkan hasil yang ditampilkan dalam **Tabel 4. 16**, seluruh indikator kinerja utama (IKU) Kota Mojokerto tahun 2025 telah memiliki target yang jelas dan dilengkapi dengan





















proyeksi capaian berdasarkan tiga skenario, yaitu pesimis, moderat, dan optimis. Prediksi capaian di tahun 2025 menunjukkan bahwa keenam indikator, yaitu Angka Kemiskinan, Indeks Gini, Indeks Pembangunan Manusia, Pertumbuhan Ekonomi, Indeks Reformasi Birokrasi, dan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup secara umum telah melampaui target yang ditetapkan. Seluruh indikator juga mendapatkan status “Dipertahankan,” yang menandakan bahwa strategi dan program yang telah diterapkan selama ini dinilai efektif. Perlu dicatat bahwa Pertumbuhan Ekonomi (PE) dalam tabel ini masuk dalam kategori *lower better*, yang merupakan penyesuaian dari arah kebijakan Provinsi Jawa Timur dan Nasional, serta diselaraskan dengan strategi daerah lainnya, termasuk kabupaten/kota. Penurunan target PE ini dilakukan dalam rangka penyesuaian terhadap dampak pergeseran ekonomi nasional akibat pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) di Kalimantan, sehingga daerah-daerah seperti Kota Mojokerto diarahkan untuk berfokus pada penguatan sektor ekonomi lokal yang adaptif. Meskipun capaian telah melampaui target, Pemerintah Daerah Kota Mojokerto tetap perlu menjaga stabilitas dan kualitas kinerja guna mengantisipasi kemungkinan fluktuasi performa di masa depan.

Tabel 4. 17 Prediksi Capaian IKS Kota Mojokerto Tahun 2025

Indikator Sasaran	Keterangan	Prediksi 2025			Target 2025	Prediksi di tahun 2025	Upaya yang dilakukan
		Pesimis	Moderate	Optimis			
Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	<i>Lower Better</i>	3,44	2,79	2,26	3,76		
Indeks Kedalaman Kemiskinan	<i>Lower Better</i>	0,72	0,70	0,65	0,82		
Pendapatan Perkapita/ PDRB Perkapita (Juta Rp)	<i>Higher Better</i>	64,88	65,89	67,48	55,35		
Indeks Pemberdayaan Gender	<i>Higher Better</i>	76,85	78,16	80,10	70,75		
Indeks Kesehatan	<i>Higher Better</i>	0,87	0,88	0,89	0,87		
Indeks Pendidikan	<i>Higher Better</i>	0,78	0,79	0,80	0,78		
Indeks Pembangunan Pemuda	<i>Higher Better</i>	n.a	n.a	n.a	54,90	-	-
Indeks Kesalehan Sosial	<i>Higher Better</i>	91,73	94,79	98,37	97,75		
Pertumbuhan PDRB Sektor Industri Pengolahan (%)	<i>Higher Better</i>	5,19	6,52	8,97	6,10		
Pertumbuhan PDRB Sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi (%)	<i>Higher Better</i>	3,66	5,63	7,74	6,46		
Persentase Pertumbuhan Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil (%)	<i>Higher Better</i>	3,89	4,40	5,62	4,00		
Pertumbuhan PDRB Sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum (%)	<i>Higher Better</i>	6,75	8,93	11,81	11,69		
Nilai Realisasi Investasi (Juta Rp)	<i>Higher Better</i>	425.904.411.032,00	124.230.871.365,68	632.881.701.037,00	601.827.815.252,67		
Indeks Kepuasan Masyarakat	<i>Higher Better</i>	92,43	92,66	94,40	90,30		





Indikator Sasaran	Keterangan	Prediksi 2025			Target 2025	Prediksi di tahun 2025	Upaya yang dilakukan
		Pesimis	Moderate	Optimis			
Kepatuhan Standard Pelayanan Publik	Higher Better	95,98	97,09	97,42	68,00		
Indeks Inovasi Daerah	Higher Better	92,27	92,32	93,35	92,55		
Nilai SPBE	Higher Better	4,38	4,56	5,26	4,84		
Nilai SAKIP	Higher Better	75,35	77,06	79,30	78,62		
Opini BPK	Higher Better	WTP	WTP	WTP	WTP		
Maturitas SPIP	Higher Better	level 3	level 3	level 4	level 3		
Sistem Merit	Higher Better	n.a	n.a	n.a	296,00	-	-
Indeks Kualitas Air	Higher Better	51,98	54,98	59,53	58,97		
Indeks Kualitas Udara	Higher Better	79,51	80,65	82,52	81,11		
Indeks Infrastruktur Permukiman	Higher Better	98,59	99,07	99,95	99,63		
Indeks Resiko Bencana	Lower Better	95,73	93,59	90,13	134,15		

**Keterangan :**n.a : *not available* (Indikator Sasaran terdapat realisasi tahun 2024)

: Melampaui



: Tercapai



: Belum Tercapai



: Dipertahankan



: Perlu Perhatian Lebih

Skenario berdasarkan data prediksi capaian tahun 2025 yang ditampilkan pada **Tabel 4.17**. Dari total 25 indikator, sebanyak 23 indikator diprediksi telah melampaui target, baik dalam skenario pesimis, moderat, maupun optimis. Capaian ini mencerminkan bahwa kinerja Pemerintah Kota Mojokerto menunjukkan tren positif dan konsisten dalam mewujudkan target pembangunan daerah. Namun demikian, terdapat 2 indikator sasaran yang belum memiliki data realisasi, yaitu Sistem Merit dan Indeks Pembangunan Pemuda. Meskipun sebagian besar indikator telah menunjukkan capaian yang sangat baik, pemerintah daerah tetap perlu memperhatikan indikator yang nilai prediksinya mendekati ambang batas target agar tidak mengalami penurunan kinerja di masa mendatang. Penguatan pemantauan dan evaluasi secara berkelanjutan menjadi langkah penting untuk memastikan seluruh target pembangunan dapat tercapai secara optimal dan berkelanjutan.



## BAB V

### PENUTUP

#### 5.1 Kesimpulan

Melalui proses dan hasil kajian yang telah dilakukan pada sub bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan beberapa poin berikut.

- **Performa capaian kinerja Pemerintah Kota Mojokerto di tahun 2024 menunjukkan status capaian yang baik** dimana hal tersebut ditunjukkan melalui tercapainya 3 indikator tujuan dari 6 indikator tujuan. Dimana untuk indikator yang belum tercapai ada pada Indikator pada Tujuan 1, yakni Indeks Gini dengan ketercapaian 98,88%. Pada Indikator Tujuan 4, yakni Indeks Reformasi Birokrasi dengan capaian 99,37%. Serta pada Indikator Tujuan 5, yakni Indeks Kualitas Lingkungan Hidup dengan capaian 94,62%
- **Berdasarkan IKS menunjukkan bahwa 25 indikator dari 13 Indikator dengan capaian baik tahun 2024, sedangkan ada 11 Indikator Kinerja Sasaran (IKS) yang belum mencapai target yang tentunya perlu tindakan lebih untuk mencapai target**, yakni Indeks Pemberdayaan Gender (95,31%), Indeks Kesehatan (99,54%), Indeks Kesalehan Sosial (96,39%), Pertumbuhan PDRB Sektor Industri Pengolahan (56,58%), Pertumbuhan PDRB Sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi (54,97%), Pertumbuhan PDRB Sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum (61,22%), Nilai Realisasi Investasi (84,73%), Indeks Kualitas Air (87,48%), dan Indeks Kualitas Udara (95,73%). Sementara itu, untuk Sistem Merit dan Indeks Pembangunan Pemuda belum terdapat realisasi data di tahun 2024.
- **Berdasarkan analisis pada faktor penghambat dan pendorong pelaksanaan kinerja Pemerintah Daerah terdapat 6 faktor yang terdefinisi dari total 6 indikator kinerja utama (IKU).** Secara umum, faktor pendorong dalam pelaksanaan indikator baik IKU dan IKS diperlukan kerjasama dengan *stakeholder* terkait. **Belum tercapainya Indeks Gini** dikarenakan faktor kesenjangan akses pekerjaan layak dan berkelanjutan terutama pada masyarakat berpenghasilan rendah. **Belum tercapainya Indeks Reformasi Birokrasi** dikarenakan belum seluruh Kegiatan Utama pada *Road Map* RB nasional dikawal pada *Road Map* Instansional. **Belum tercapainya IKLH** dikarenakan berbagai faktor pada indikator penunjang nilai IKLH. (Indeks Kualitas Air (IKA), rendahnya nilai indikator dipengaruhi oleh pencemaran sungai akibat rendahnya pengolahan limbah domestik dan pada Indikator Indeks Kualitas



Lahan (IKL) masih terjadi pemotongan pohon yang tidak diimbangi dengan reboisasi yang cukup, sehingga menyebabkan peningkatan suhu kota).

- Berdasarkan hasil evaluasi Kinerja Program dan Serapan Anggaran yang pengaturannya terdapat pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 terlihat bahwa ada 80 Program yang termasuk kategori sangat baik (77,70%), 16 program masuk kategori baik (15,50%), 4 program yang masuk kategori cukup (3,90%), dan 3 program masuk kategori kurang baik (2,90%). Program yang termasuk dalam Kategori kurang baik, antara lain Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja, Program Pengelolaan Keuangan Daerah, dan Program Pengembangan Perumahan
- Berdasarkan hasil prediksi capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Sasaran (IKS) tahun 2025 dengan tiga skenario (pesimis, moderat dan optimis), terdapat beberapa indikator yang belum tersedia data untuk target di tahun 2024, yakni Indeks Pembangunan Pemuda dan Sistem Merit. Selain itu prediksi pada Tahun 2025 dimana baik untuk IKU dan IKS sudah mampu melewati target.

## 5.2 Rekomendasi

Dalam rangka pencapaian IKUPD Kota Mojokerto pada akhir periode, yaitu tahun 2025 maka dibutuhkan upaya-upaya berikut:

**Tabel 5. 1** Rekomendasi untuk Organisasi Perangkat Daerah

No	Rekomendasi	OPD Pengampu
1	Perlu adanya upaya yang dilakukan untuk meningkatkan capaian kinerja, utamanya pada Indikator yang belum memenuhi target, diantaranya	
	- Pada Indikator Kinerja Utama Indeks Gini, beberapa hal yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kinerja antara lain: pemerataan distribusi pendapatan melalui upaya pengentasan kemiskinan dan pengurangan tingkat pengangguran, sehingga pengeluaran masyarakat dapat lebih merata, mendorong pertumbuhan pusat-pusat ekonomi berbasis potensi unggulan di tiap wilayah guna meningkatkan produktivitas sektor unggulan, serta mengoptimalkan kolaborasi dan sinergi antar perangkat daerah dalam upaya penanggulangan kemiskinan dan pengangguran untuk meminimalkan ketimpangan pendapatan.	Perangkat Daerah yang memiliki wewenang dalam pencapaian Indeks Gini



No	Rekomendasi	OPD Pengampu
	- Pada Indikator Kinerja Utama Indeks Reformasi Birokrasi, beberapa hal yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kinerja antara lain: pengawalan KU yang terdapat dalam <i>Road Map</i> RB nasional, dengan penetapan target yang bersifat progresif atau lebih tinggi dibandingkan capaian tahun sebelumnya, serta memastikan bahwa tiap KU ditopang oleh rencana aksi yang konkret dan berdampak nyata terhadap target, memperkuat dukungan pimpinan dalam pengelolaan kualitas kebijakan, meningkatkan sinergi antar unit kerja dalam pengumpulan data dan informasi terkait tata kelola kebijakan, serta menerapkan manajemen risiko di setiap proses bisnis dan menjadikan hasil penilaian risiko sebagai acuan dalam pengambilan keputusan.	Perangkat Daerah yang memiliki wewenang dalam pencapaian Indeks Reformasi Birokrasi
	- Pada Indikator Kinerja Utama Indeks Kualitas Lingkungan Hidup, beberapa langkah yang dapat dilakukan dalam meningkatkan kualitas lingkungan hidup, antara lain: penerapan teknologi daur ulang air limbah dari kegiatan usaha agar tidak dibuang secara langsung ke saluran atau sungai, sosialisasi pemeliharaan dan pengoperasian instalasi pengolahan air limbah (IPAL) di tingkat usaha dan kegiatan, serta perluasan akses IPAL komunal bagi rumah tangga dan pelaku UMKM, sosialisasi kepada warga di sekitar bantaran sungai untuk tidak membuang sampah ke sungai, pemasangan tanda larangan/ <i>signage</i> pembuangan sampah di sungai dan saluran, publikasi edukatif melalui media sosial untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam menjaga sungai, pemutakhiran data ruang terbuka hijau (RTH), serta penanaman pohon lindung.	Perangkat Daerah yang memiliki wewenang dalam pencapaian Indeks Kualitas Lingkungan Hidup
2	<b>Perlu adanya identifikasi dan langkah mitigasi untuk Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Sasaran (IKS) yang memiliki nilai evaluasi capaian kinerja sedikit diatas 100%, seperti 100,01% s.d 105,00%, mengingat penurunan performa seringkali terjadi dibandingkan tren peningkatannya.</b>	Seluruh Perangkat Daerah
3	<b>Adanya sinergitas antar OPD perlu ditingkatkan lagi dalam merencanakan dan pelaksanaan program/kegiatan dalam mencapai Indikator Kinerja Utama Pemerintah Daerah (IKUPD). Bila perlu dibentuk pula tim <i>ad-hoc</i> untuk penanganan percepatan capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) tersebut.</b>	Seluruh Perangkat Daerah
4	<b>Optimalisasi sistem <i>Integrated database</i> layanan masyarakat dan sistem <i>database</i> target program dan capaian program oleh OPD perlu ditingkatkan agar</b>	Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Mojokerto; Badan Perencanaan Pempa-



No	Rekomendasi	OPD Pengampu
	kedepannya lebih mudah terkontrol dan terpantau. Upaya ini juga bagian dari dukungan penwujudan satu data Indonesia di Kota Mojokerto. Disamping itu Upaya pemenuhan data capaian Indeks Pembangunan Pemuda dan Sistem Merit segera direalisasikan	ngunan, Riset dan Inovasi Daerah Kota Mojokerto
5	<i>Output</i> kegiatan ini bisa sebagai upaya mendukung dalam mewujudkan <b>Program Satu Data Untuk Indonesia di Kota Mojokerto.</b>	Dinas Komunikasi dan Informa- tika Kota Mojokerto
6	Upaya linierisasi dalam penyusunan <i>Program/ Kegiatan/Sub kegiatan</i> harus benar - benar mendukung indikator sasaran dan indikator tujuan. Khususnya bentuk program/kegiatan/subkegiatan serta indikator harus disesuaikan agar ketercapaian indikator utama dan sasaran bisa terealisasikan.	Badan Perencanaan Pemba- ngunan, Riset dan Inovasi Daerah Kota Mojokerto
7	Meskipun nama Program/Kegiatan/SubKegiatan secara nomenklatur sudah tersedia sesuai regulasi, maka <b>bentuk Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (deskripsinya) juga harus tepat</b> , sehingga perlu validasi dan <i>movev</i> secara periodik.	Seluruh Perangkat Daerah;  <i>Monitoring</i> dan Evaluasi oleh Badan Perencanaan Pemba- ngunan, Riset dan Inovasi Daerah Kota Mojokerto
8	Dalam penentuan target indikator IKU dan IKS ke <b>depan lebih rasional</b> , khususnya indikator yang sulit untuk diprediksi dan disesuaikan dengan kondisi sebelumnya.	Seluruh Perangkat Daerah
9	<b>Perlunya tindak lanjut dalam pembahasan Indeks yang masih belum tercapai</b> dengan stakeholder berwenang. Koordinasi dan pembahasan teknis diperlukan dengan stakeholder terkait agar indikator yang belum tercapai bisa segera ditindaklanjuti sehingga pada tahun 2025 indikator dapat tercapai bahkan melampaui.	Seluruh Perangkat Daerah
10	<b>Melakukan <i>Benchmarking</i> ke stakeholder/OPD lain baik dalam maupun luar daerah</b> pada indikator yang belum tercapai. Upaya <i>benchmarking</i> diperlukan agar pada indikator yang belum tercapai agar mendapat upaya lebih dan penanganan lebih lanjut.	Seluruh Perangkat Daerah





## DAFTAR PUSTAKA

Ferlia, K. P. (2017). *Universitas Komputer Indonesia Juru*. 1-15.

Kota Mojokerto Dalam Angka Tahun 2019

Kota Mojokerto Dalam Angka Tahun 2020

Kota Mojokerto Dalam Angka Tahun 2021

Kota Mojokerto Dalam Angka Tahun 2022

Kota Mojokerto Dalam Angka Tahun 2023

Kota Mojokerto Dalam Angka Tahun 2024

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Pemerintah Kota Mojokerto Tahun 2023 - 2024.

Laporan Pertanggungjawaban (LPKJ) Walikota Mojokerto Tahun 2024

Lorenza, N. (2019). Analisis Kinerja Pemerintah Daerah Kota Medan Dalam Pemungutan Pajak Daerah Dengan Konsep Value for Money. *Scholar*, 1-60.

Mata Kinerja Pemerintah Daerah A. (2016). 1-23.

Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Mojokerto Tahun 2018-2023 Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Mojokerto Tahun 2018-2023.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Peraturan Walikota Mojokerto Nomor 13 Tahun 2023 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Mojokerto Tahun 2024-2026.



Peraturan Walikota Mojokerto Nomor 16 Tahun 2024 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Mojokerto Tahun 2024.

Wemben, O. N. L. P. (2010). Kinerja pelayanan pada kantor badan pertanahan nasional. *Jurnal Legalitas*, 3(2), 123-133.





LAMPIRAN

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program & Indikator Kinerja Program		Satuan	Target		Realisasi		Evaluasi Kinerja*		Evaluasi Program Kinerja*		Anggaran	Realisasi	Evaluasi Anggaran*		Kode Evaluasi Program*	OPD Pengampu	
								2024	2025	2023	2024	%	Keterangan	%	Keterangan			2024				%
1	Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Menuju Taraf Hidup Yang Lebih Baik	1.1 Angka Kemiskinan (%)	1.1.1 Menurunnya Tingkat Pengangguran Masyarakat	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	1	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Persentase tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi	%	60	60	33	95,36	158,93%	Sangat Tinggi	158,93%	Sangat Tinggi	Rp6.818.309.537,00	Rp2.899.927.280,00	42,53%	Sangat Rendah	KB	Sekretariat Daerah
					2	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Persentase pencari kerja yang ditempatkan	%	87,5	87,5	95,75	98	112,00%	Sangat Tinggi	112,00%	Sangat Tinggi	Rp102.076.900,00	Rp91.833.500,00	89,97%	Tinggi	B	Sekretariat Daerah
			1.1.2 Terhidarnya Masyarakat Dari Kerentanan Ekonomi	Indeks Kedalaman Kemiskinan	1	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Persentase Peningkatan Pemberdayaan Sosial	%	0,43	0,48	0,38	88,37%	Tinggi	88,37%	Tinggi	Rp1.067.427.690,00	Rp1.000.063.150,00	93,69%	Sangat Tinggi	B	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
					1	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase PMKS yang direhabilitas	%	100	100	100	100,00%	Sangat Tinggi	100,00%	Sangat Tinggi	Rp2.067.354.226,00	Rp1.982.586.378,00	95,90%	Sangat Tinggi	SB	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
					2	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Meningkatnya derajat perekonomian PMKS/PPKS	%	1	2	3	300,00%	Sangat Tinggi	300,00%	Sangat Tinggi	Rp8.939.435.413,00	Rp8.588.984.804,00	96,08%	Sangat Tinggi	SB	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
					3	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	Persentase Pelaksanaan Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	%	100	100	100	100,00%	Sangat Tinggi	100,00%	Sangat Tinggi	Rp245.182.400,00	Rp216.853.400,00	88,45%	Tinggi	B	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
					4	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang dilaksanakan	%	100	100	100	100,00%	Sangat Tinggi	100,00%	Sangat Tinggi	Rp906.373.622,00	Rp865.367.600,00	95,48%	Sangat Tinggi	SB	Kecamatan Magersari	
							Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang dilaksanakan	%	100	100	100	100,00%	Sangat Tinggi								Kecamatan Prajurit Kulon	
							Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan	%	100	100	100	100,00%	Sangat Tinggi								Kecamatan Kranggan	

No	Tujuan	Indikator Tujuan		Sasaran	Indikator Sasaran	Program & Indikator Kinerja Program			Satuan	Target		Realisasi		Evaluasi Kinerja*		Evaluasi Program Kinerja*		Anggaran	Realisasi	Evaluasi Anggaran*		Kode Evaluasi Program*	OPD Pengampu
										2024	2025	2023	2024	%	Keterangan	%	Keterangan	2024		%	Keterangan		
								Ketertiban Umum yang dilaksanakan															
						5	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Persentase Partai Politik dan Lembaga Pendidikan yang berperan aktif dalam pembangunan bidang politik	%	75	80		70,44	93,92%	Sangat Tinggi	93,92%	Sangat Tinggi	Rp28.124.606.025,00	Rp27.755.895.410,00	98,69%	Sangat Tinggi	SB	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
						6	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Persentase LSM / Organisasi Kemasyarakatan terdaftar, yang berpartisipasi aktif dalam pembangunan	%	75	80		70,44	93,92%	Sangat Tinggi	93,92%	Sangat Tinggi	Rp166.008.000,00	Rp163.502.400,00	98,49%	Sangat Tinggi	SB	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
		1.2	Indeks Gini	1.2.1	Tercukupinya Kebutuhan Pokok	1	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Prosentase Inflasi	%	5	5		5	100,00%	Sangat Tinggi	100,00%	Sangat Tinggi	Rp147.633.475,00	Rp147.060.336,00	99,61%	Sangat Tinggi	SB	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
						2	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Persentase perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja	%	67	69		65,58	97,88%	Sangat Tinggi	97,88%	Sangat Tinggi	Rp1.384.122.250,00	Rp993.029.230,00	71,74%	Sedang	C	Sekretariat Daerah
						3	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Persentase Terpenuhinya konsumsi pangan yang beragam (BZSA)	%	90	90		90	100,00%	Sangat Tinggi	100,00%	Sangat Tinggi	Rp135.999.850,00	Rp130.174.100,00	95,72%	Sangat Tinggi	SB	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
						4	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Persentase Penurunan Kerawanan Pangan	%	16	11		16	100,00%	Sangat Tinggi	100,00%	Sangat Tinggi	Rp46.943.100,00	Rp46.605.000,00	99,28%	Sangat Tinggi	SB	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
							PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan (LKK) Aktif	%	100	100		100	100,00%	Sangat Tinggi	100,00%	Sangat Tinggi	Rp24.844.787.927,00	Rp23.856.966.623,00	96,02%	Sangat Tinggi	SB	Kecamatan Magersari
								Persentase Lembaga Kemasyarakatan	%	100	100		100	100,00%	Sangat Tinggi								Kecamatan Prajurit Kulon



No	Tujuan	Indikator Tujuan		Sasaran		Indikator Sasaran	Program & Indikator Kinerja Program		Satuan	Target		Realisasi		Evaluasi Kinerja*		Evaluasi Program Kinerja*		Anggaran	Realisasi	Evaluasi Anggaran*		Kode Evaluasi Program*	OPD Pengampu					
										2024	2025	2023	2024	%	Keterangan	%	Keterangan	2024		%	Keterangan							
				1.2.2	Meningkatnya Kesetaraan Gender Dalam Pembangunan	Indeks Pemberdayaan Gender	1	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Persentase Pelaksanaan Pengarusutamaam Gender Dan Pemberdayaan Perempuan	%	100	100		100	100,00%	Sangat Tinggi	100,00%	Sangat Tinggi	Rp579.488.100,00	Rp563.033.500,00	97,16%	Sangat Tinggi	SB	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak				
							2	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	Persentase Pengelolaan Sistem Data Gender Dan Anak	%	100	100		100	100,00%	Sangat Tinggi	100,00%	Sangat Tinggi	Rp55.126.300,00	Rp54.240.950,00	98,39%	Sangat Tinggi	SB	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak				
2	Mewujudkan Sumber Daya Manusia Unggul, Bermartabat Dan Berdaya Saing	2.1	Indeks Pembangunan Manusia	2.1.1	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	Indeks Kesehatan	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP PD	Nilai	81,6	81,7		81,3	99,63%	Sangat Tinggi	99,98%	Sangat Tinggi	Rp637.224.451.442,00	Rp613.117.079.008,00	96,22%	Sangat Tinggi	SB	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana				
									Indeks Manajemen Risiko PD	Poin	2	2		2	100,00%	Sangat Tinggi												
									Indeks Kepuasan Masyarakat PD	Poin	85,7	85,9		85,94	100,28%	Sangat Tinggi												
									Persentase Kegiatan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dilaksanakan tepat waktu	%	100	100		100	100,00%	Sangat Tinggi												
									2	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan Terakreditasi	%	70	80		70	100,00%	Sangat Tinggi							100,00%	Sangat Tinggi	Rp63.389.792.053,00	Rp60.107.054.313,00
							Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan dengan Sarana Prasarana Sesuai Standar	%	70		72		73,32	104,74%	Sangat Tinggi	106,09%	Sangat Tinggi											
							Indeks Keluarga Sehat	Poin	0,58		0,60		0,56	96,55%	Sangat Tinggi													
							AKI per 100.000 KH		< 94.60		< 94.60		94,6	100,00%														



No	Tujuan	Indikator Tujuan		Sasaran	Indikator Sasaran	Program & Indikator Kinerja Program		Satuan	Target		Realisasi		Evaluasi Kinerja*		Evaluasi Program Kinerja*		Anggaran	Realisasi	Evaluasi Anggaran*		Kode Evaluasi Program*	OPD Pengampu
									2024	2025	2023	2024	%	Keterangan	%	Keterangan	2024		%	Keterangan		
								per 100.000 KH (2 ibu)	per 100.000 KH (2 ibu)		per 100.000 KH (1 kasus)		Sangat Tinggi									
								AKB per 1.000 KH (2 ibu)	< 4.22	< 4.22	4,22	100,00%	Sangat Tinggi									
								per 1.000 KH (9 bayi)	per 1.000 KH (9 bayi)		per 1.000 KH (6 bayi)											
								Prevalensi Stunting Balita	3,12	3,1	3,14	100,64%	Sangat Tinggi									
								Persentase Hasil Penilaian Kota Sehat Indikator Tatanan Sehat Mandiri	92	93	94	102,17%	Sangat Tinggi									
								Persentase Kelurahan yang Menerapkan Kebijakan GERMAS Sesuai Standar	80	80	90	112,50%	Sangat Tinggi									
								Angka Kesakitan TB Paru BTA (All Cases) per 100.000 Penduduk	327,06	327,07	524,82	160,47%	Sangat Tinggi									
								per 100.000 penduduk (437 kasus)	per 100.000 penduduk (437 kasus)		per 100.000 penduduk (963 kasus)											
								Angka Kesakitan Penemuan Penyakit Hipertensi per 1.000 Penduduk = 15 tahun	320.92 per 1.000 penduduk (33.244 kasus)		320.92 per 1.000 penduduk (33.244 kasus)	100,00%	Sangat Tinggi									
								Persentase Cakupan Imunisasi Rutin Lengkap (Usia 18 s/d 24 Bulan)	97	98	99	102,06%	Sangat Tinggi									
								Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Menggunakan Sistem Pelayanan Berbasis IT dan Terintegrasi Sesuai Standar	100	100	100	100,00%	Sangat Tinggi									
								Persentase layanan rumah sakit yang memenuhi standar akreditasi	100	100	100	100,00%	Sangat Tinggi									RSU dr. Wahidin Sudiro Husodo



No	Tujuan	Indikator Tujuan		Sasaran		Indikator Sasaran	Program & Indikator Kinerja Program		Satuan	Target		Realisasi		Evaluasi Kinerja*		Evaluasi Program Kinerja*		Anggaran		Realisasi		Evaluasi Anggaran*		Kode Evaluasi Program*	OPD Pengampu
										2024	2025	2023	2024	%	Keterangan	%	Keterangan	2024		%	Keterangan				
						3	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Persentase SDM Kesehatan yang Memenuhi Standar Kompetensi	%	70	75		65	92,86%	Sangat Tinggi	92,86%	Sangat Tinggi	Rp1.115.700.300,00	Rp1.032.837.801,00	92,57%	Sangat Tinggi	SB	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		
						4	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Jumlah Sarana Pelayanan Kefarmasian, Alat Kesehatan, dan Makanan Minuman yang Memenuhi Standar	Sarana	60	65		70	116,67%	Sangat Tinggi	116,67%	Sangat Tinggi	Rp429.011.367,00	Rp387.952.850,00	90,43%	Sangat Tinggi	SB	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		
						5	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase Indikator SPM yang Dilakukan Upaya Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat	%	100	100		90	90,00%	Tinggi	90,00%	Tinggi	Rp1.139.378.400,00	Rp1.119.076.500,00	98,22%	Sangat Tinggi	B	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		
						6	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Persentase pelaksanaan perlindungan perempuan	%	100	100		100	100,00%	Sangat Tinggi	100,00%	Sangat Tinggi	Rp21.177.150,00	Rp20.609.500,00	97,32%	Sangat Tinggi	SB	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak		
						7	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Persentase Pelaksanaan Pemenuhan Hak Anak (PHA)	%	100	100		100	100,00%	Sangat Tinggi	100,00%	Sangat Tinggi	Rp234.169.450,00	Rp225.819.500,00	96,43%	Sangat Tinggi	SB	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak		
						8	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Angka Kelahiran Total	%	1,8	1,8		1,87	103,89%	Sangat Tinggi	103,89%	Sangat Tinggi	Rp128.501.150,00	Rp110.505.500,00	86,00%	Tinggi	B	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak		
						9	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Persentase Akseptor KB Aktif	%	72	72,5		72	100,00%	Sangat Tinggi	100,00%	Sangat Tinggi	Rp3.960.391.000,00	Rp3.605.658.275,00	91,04%	Sangat Tinggi	SB	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak		
						10	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Persentase UPPKA dengan Strata Paripurna	%	2	4		2	100,00%	Sangat Tinggi	100,00%	Sangat Tinggi	Rp1.201.205.500,00	Rp1.175.692.750,00	97,88%	Sangat Tinggi	SB	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak		
					2.1.2	Meningkatnya Kualitas Pendidikan Masyarakat	Indeks Pendidikan	1	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Angka Putus Sekolah SD	%	0,01	0,01		0,01	100,00%	Sangat Tinggi	99,87%	Sangat Tinggi	Rp87.681.369.393,00	Rp83.483.893.746,00	95,21%	Sangat Tinggi	SB	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
										Angka Putus Sekolah SMP	%	0,01	0,01		0,01	100,00%	Sangat Tinggi								



No	Tujuan	Indikator Tujuan		Sasaran		Indikator Sasaran	Program & Indikator Kinerja Program		Satuan	Target		Realisasi		Evaluasi Kinerja*		Evaluasi Program Kinerja*		Anggaran	Realisasi	Evaluasi Anggaran*		Kode Evaluasi Program*	OPD Pengampu
										2024	2025	2023	2024	%	Keterangan	%	Keterangan	2024		%	Keterangan		
									%	87,25	87,25		87,25	100,00%	Sangat Tinggi								
										82,97	82,97		82,97	100,00%	Sangat Tinggi								
										100,00	100,00		108,1	108,10%	Sangat Tinggi								
										98,04	98,04		98,04	100,00%	Sangat Tinggi								
										100,00	100,00		100,00	100,00%	Sangat Tinggi								
										100,00	100,00		100,00	100,00%	Sangat Tinggi								
										100,00	100,00		100,00	100,00%	Sangat Tinggi								
										85,61	96,63		84,85	99,11%	Sangat Tinggi								
										100,00	100,00		100,00	100,00%	Sangat Tinggi								
										1	1		1	100,00%	Sangat Tinggi								
										2	2,01		2	100,00%	Sangat Tinggi								
										2,15	2,16		2,14	99,53%	Sangat Tinggi								
										1,72	1,73		1,7	98,84%	Sangat Tinggi								
										1,9	1,91		1,89	99,47%	Sangat Tinggi								
										1	1		1	100,00%	Sangat Tinggi								
										1	1		1	100,00%	Sangat Tinggi								
										100,00	100,00		100,00	100,00%	Sangat Tinggi								
										100,00	100,00		100,00	100,00%	Sangat Tinggi								
										67,77	69,37		66,17	97,64%	Sangat Tinggi								



No	Tujuan	Indikator Tujuan		Sasaran	Indikator Sasaran	Program & Indikator Kinerja Program		Satuan	Target		Realisasi		Evaluasi Kinerja*		Evaluasi Program Kinerja*		Anggaran	Realisasi	Evaluasi Anggaran*		Kode Evaluasi Program*	OPD Pengampu	
									2024	2025	2023	2024	%	Keterangan	%	Keterangan	2024		%	Keterangan			
							Persentase Sarana SMP Berkondisi baik	%	69,57	69,57		65,22	93,75%	Sangat Tinggi									
							Persentase Sarana PAUD Berkondisi baik	%	92,30	92,40		92,30	100,00%	Sangat Tinggi									
							APK PAUD	%	100,00	100,00		100,00	100,00%	Sangat Tinggi									
							Persentase Pendidik PAUD yang memenuhi kualifikasi S1/DIV	%	74,64	74,64		74,64	100,00%	Sangat Tinggi									
							Persentase Pendidik SD yang memenuhi kualifikasi S1/DIV	%	97,31	97,31		97,31	100,00%	Sangat Tinggi									
							Persentase Pendidik SMP yang memenuhi kualifikasi S1/DIV	%	99,61	99,61		99,61	100,00%	Sangat Tinggi									
							Persentase Pendidik Pendidikan Kesetaraan yang memenuhi kualifikasi S1/DIV	%	93,00	93,00		93,00	100,00%	Sangat Tinggi									
						2	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Persentase Pendidik dan Tenaga Pendidik jenjang SMP yang Memenuhi Standart Kompetensi	%	38	40		38	100,00%	Sangat Tinggi	100,00%	Sangat Tinggi	Rp27.847.000,00	Rp27.743.000,00	99,63%	Sangat Tinggi	SB	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
						3	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Jumlah perpustakaan sesuai standar nasional perpustakaan (unit)	Perpustakaan	38	38		42	110,53%	Sangat Tinggi	110,53%	Sangat Tinggi	Rp27.847.000,00	Rp27.743.000,00	99,63%	Sangat Tinggi	SB	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
						2.1.3	Meningkatnya Peran Pemuda Dalam Pembangunan	Indeks Pembangunan Pemuda	1	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Persentase pemuda yang berprestasi	%	35,00	36,00		33,98	97,09%	Sangat Tinggi	97,09%	Sangat Tinggi	Rp1.595.860.504,00	Rp1.530.834.130,00	95,93%
2	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Jumlah Atlet yang Berprestas	Orang	117,00	118,00					116,00	99,15%	Sangat Tinggi	99,15%	Sangat Tinggi	Rp4.304.687.192,00	Rp4.228.130.217,00	98,22%	Sangat Tinggi		Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata			



No	Tujuan	Indikator Tujuan		Sasaran	Indikator Sasaran	Program & Indikator Kinerja Program		Satuan	Target		Realisasi		Evaluasi Kinerja*		Evaluasi Program Kinerja*		Anggaran	Realisasi	Evaluasi Anggaran*		Kode Evaluasi Program*	OPD Pengampu	
									2024	2025	2023	2024	%	Keterangan	%	Keterangan	2024		%	Keterangan			
				2.1.4 Mewujudkan Masyarakat Bermartabat dan Berbudaya	Indeks Kesalehan Sosial	1	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase gangguan Kamtibmas yg terselesaikan melalui patroli wilayah	%	100,00	100,00		100,00	100,00%	Sangat Tinggi	100,00%	Sangat Tinggi	Rp4.268.680.234,00	Rp4.047.261.055,00	94,81%	Sangat Tinggi	SB	Satpol PP
								Persentase pelanggaran Perda dan Perwali yg terselesaikan	%	100,00	100,00		100,00	100,00%	Sangat Tinggi								
								Tingkat kepatuhan masyarakat terhadap peraturan perundang - undangancukai	%	100,00	100,00		100,00	100,00%	Sangat Tinggi								
						2	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Jumlah Warisan Budaya tak benda yang dipelihara	Warisan Budaya	5,00	7,00	5,00	100,00%	Sangat Tinggi	100,00%	Sangat Tinggi	Rp1.717.573.300,00	Rp1.645.273.084,00	95,79%	Sangat Tinggi	SB	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
						3	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	Jumlah Cagar Budaya yang dikembangkan	Objek	2,00	2,00	2,00	100,00%	Sangat Tinggi	100,00%	Sangat Tinggi	Rp3.586.441.716,00	Rp3.269.849.240,00	91,17%	Sangat Tinggi	SB	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
						4	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Jumlah kasus ideologi	Kasus	0,00	0,00	0,00	100,00%	Sangat Tinggi	100,00%	Sangat Tinggi	Rp1.322.420.100,00	Rp1.294.765.350,00	97,91%	Sangat Tinggi	SB	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
						5	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Persentase Menurunnya Kasus Ekonomi, Sosialdan Budaya	%	0,05	0,05	0,05	100,00%	Sangat Tinggi	100,00%	Sangat Tinggi	Rp383.335.300,00	Rp367.481.900,00	95,86%	Sangat Tinggi	SB	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
						6	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Persentase Konflik Ipoleksosbud yang diselesaikan	%	80,00	85,00	90,00	112,50%	Sangat Tinggi	112,50%	Sangat Tinggi	Rp1.724.640.500,00	Rp1.713.751.223,00	99,37%	Sangat Tinggi	SB	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
3	Meningkatkan Penguatan Ekonomi Berbasis	3.1	Pertumbuhan Ekonomi (%)	3.1.1	Meningkatnya Produktivitas Sektor Potensial	Pertumbuhan PDRB Sektor Industri	1	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Prosentase Peningkatan Asset IKM	%	5,00	7,00	15,00	300,00%	Sangat Tinggi	300,00%	Sangat Tinggi	Rp16.306.718.100,00	Rp15.946.545.625,00	97,79%	Sangat Tinggi	SB	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian





No	Tujuan	Indikator Tujuan		Sasaran	Indikator Sasaran	Program & Indikator Kinerja Program		Satuan	Target		Realisasi		Evaluasi Kinerja*		Evaluasi Program Kinerja*		Anggaran	Realisasi	Evaluasi Anggaran*		Kode Evaluasi Program*	OPD Pengampu			
									2024	2025	2023	2024	%	Keterangan	%	Keterangan	2024		%	Keterangan					
Potensi Daerah dan Investasi					Pengolahan (%)																	dan Perdagangan			
						2	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	Prosentase IKM yang Memenuhi Legalitas dan Standarisasi Produk	%	30,00	35,00		40,00	133,33%	Sangat Tinggi	133,33%	Sangat Tinggi	Rp93.313.200,00	Rp93.188.900,00	99,87%	Sangat Tinggi	SB	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan		
						3	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	Prosentase IKM yang Masuk SIINas	%	15,00	16,00		18,00	120,00%	Sangat Tinggi	120,00%	Sangat Tinggi	Rp307.201.700,00	Rp303.803.000,00	98,89%	Sangat Tinggi	SB	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan		
					Pertumbuhan PDRB Sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi (%)	4	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Prosentase Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	%	5,00	5,00		5,00	100,00%	Sangat Tinggi	100,00%	Sangat Tinggi	Rp993.676.722,00	Rp984.511.564,00	99,08%	Sangat Tinggi	SB	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan		
						5	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Prosentase Peningkatan Ekspor	%	15,00	18,00		15,00	100,00%	Sangat Tinggi	100,00%	Sangat Tinggi	Rp3.694.600,00	Rp3.694.000,00	99,98%	Sangat Tinggi	SB	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan		
						6	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Prosentase pelayanan kemetrollogian	%	85,00	85,00		85,00	100,00%	Sangat Tinggi	100,00%	Sangat Tinggi	Rp81.013.796,00	Rp79.550.100,00	98,19%	Sangat Tinggi	SB	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan		
						7	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	Prosentase Peningkatan Omset UMKM yang Difasilitasi Promosi dan Pemasaran	%	74,03	76,00		74,03	100,00%	Sangat Tinggi	100,00%	Sangat Tinggi	Rp521.071.538,00	Rp514.543.400,00	98,75%	Sangat Tinggi	SB	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan		
					3.1.2	Meningkatnya Daya Saing UMKM	Persentase Pertumbuhan Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil (%)	1	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Prosentase Koperasi yang Tertib Legalitas dan Kelembagaannya	%	75,00	77,00		73,00	97,33%	Sangat Tinggi	97,33%	Sangat Tinggi	Rp61.494.850,00	Rp59.634.950,00	96,98%	Sangat Tinggi	SB	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
								2	PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	Prosentase Koperasi yang Sehat	%	82,00	84,00		80,00	97,56%	Sangat Tinggi	97,56%	Sangat Tinggi	Rp17.240.000,00	Rp16.868.400,00	97,84%	Sangat Tinggi	SB	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian



No	Tujuan	Indikator Tujuan		Sasaran		Indikator Sasaran	Program & Indikator Kinerja Program			Satuan	Target		Realisasi		Evaluasi Kinerja*		Evaluasi Program Kinerja*		Anggaran	Realisasi	Evaluasi Anggaran*		Kode Evaluasi Program*	OPD Pengampu
											2024	2025	2023	2024	%	Keterangan	%	Keterangan	2024		%	Keterangan		
							3	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Prosentase SDM Koperasi yang Lulus Uji Kompetensi	%	19,00	21,00		17,50	92,11%	Sangat Tinggi	92,11%	Sangat Tinggi	Rp483.507.150,00	Rp473.039.230,00	97,84%	Sangat Tinggi	SB	dan Perdagangan Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
							4	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Prosentase Peningkatan Asset Koperasi	%	19,00	21,00		17,50	92,11%	Sangat Tinggi	92,11%	Sangat Tinggi	Rp232.461.000,00	Rp232.273.500,00	99,92%	Sangat Tinggi	SB	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
							5	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Prosentase Pertumbuhan Omset UMKM	%	19,00	20,00		17,97	94,58%	Sangat Tinggi	94,58%	Sangat Tinggi	Rp1.038.397.410,00	Rp1.022.115.787,00	98,43%	Sangat Tinggi	SB	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
							6	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Prosentase SDM UMKM yang Kompeten	%	15,80	17,80		15,80	100,00%	Sangat Tinggi	100,00%	Sangat Tinggi	Rp446.473.370,00	Rp444.906.140,00	99,65%	Sangat Tinggi	SB	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
				3.1.3	Meningkatnya Daya Saing Pariwisata	Pertumbuhan PDRB Sektor PeRnyediaan Akomodasi dan Makan Minum (%)	1	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	Persentase fasilitas publik dalam kondisi baik	%	92,68	92,79	92,41	92,77	100,10%	Sangat Tinggi	100,10%	Sangat Tinggi	Rp14.167.553.850,00	Rp13.668.644.745,00	96,48%	Sangat Tinggi	SB	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
							2	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Jumlah Kontribusi PAD	Juta	18.800.000.000	18.900.000.000		18.800.000.000	100,00%	Sangat Tinggi	99,92%	Sangat Tinggi	Rp14.167.553.850,00	Rp13.668.644.745,00	96,48%	Sangat Tinggi	SB	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata
									Jumlah Kunjungan Wisatawan	Wisatawan	2.375.000	2.375.100		2.371.425	99,85%	Sangat Tinggi								
							3	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Jumlah Kunjungan Wisatawan	Wisatawan	2.375.000	2.375.100		2.371.425	99,85%	Sangat Tinggi	99,85%	Sangat Tinggi	Rp233.713.555,00	Rp213.075.849,00	91,17%	Sangat Tinggi	SB	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata
							4	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Jumlah SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar yang	Orang	175,00	180,00		170,00	97,14%	Sangat Tinggi	97,14%	Sangat Tinggi	Rp1.092.676.500,00	Rp806.081.850,00	73,77%	Sedang	C	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata



No	Tujuan	Indikator Tujuan		Sasaran	Indikator Sasaran	Program & Indikator Kinerja Program			Satuan	Target		Realisasi		Evaluasi Kinerja*		Evaluasi Program Kinerja*		Anggaran	Realisasi	Evaluasi Anggaran*		Kode Evaluasi Program*	OPD Pengampu		
										2024	2025	2023	2024	%	Keterangan	%	Keterangan			2024				%	Keterangan
				3.1.4 Meningkatkan Daya Tarik Investasi Daerah	Nilai Realisasi Investasi (Juta Rp)	1	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	dikembangkan potensinya Jumlah dokumen penanaman modal yang tersedia	Dokumen	2,00	2,00	1,00	2,00	100,00%	Sangat Tinggi	100,00%	Sangat Tinggi	Rp82.500.000,00	Rp80.960.000,00	98,13%	Sangat Tinggi	SB	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu		
						2	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Jumlah Investor Baru Yang Berminat	Investor	5,00	5,00		59,00	1180,00%	Sangat Tinggi	1180,00%	Sangat Tinggi	Rp39.014.250,00	Rp38.069.000,00	97,58%	Sangat Tinggi	SB	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu		
						3	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Indeks Kepuasan Masyarakat Pelayanan Perizinan (IKM)	Poin	85,50	86,00	88,17	88,16	103,11%	Sangat Tinggi	103,11%	Sangat Tinggi	Rp277.887.476,00	Rp245.318.970,00	88,28%	Tinggi	B	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu		
						4	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Pertumbuhan Jumlah Pelaku Usaha di Kota Mojokerto yang menyampaikan LKPM	Pelaku usaha	65,00	70,00		59,00	90,77%	Sangat Tinggi	90,77%	Sangat Tinggi	Rp637.176.550,00	Rp462.265.550,00	72,55%	Sedang	C	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu		
4	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang Dinamis dan Akuntabel	4.1	Indeks Reformasi Birokrasi	4.1.1 Meningkatnya Pelayanan Publik yang Inovatif dan Integratif	Indeks Kepuasan Masyarakat	1	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Persentase pengembangan jasa konstruksi	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00%	Sangat Tinggi	100,00%	Sangat Tinggi	Rp319.680.014,00	Rp266.477.700,00	83,36%	Tinggi	B	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman		
						Kepatuhan Standard Pelayanan Publik	2	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Indeks Kepuasan Masyarakat	%	90,00	91,00		90,00	100,00%	Sangat Tinggi	100,00%	Sangat Tinggi	Rp588.527.330,00	Rp582.438.000,00	98,97%	Sangat Tinggi	SB	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
							Indeks Inovasi Daerah			Rasio penduduk ber KTP per satuan penduduk	%	0,98	0,99		0,98	100,00%	Sangat Tinggi	100,00%							Sangat Tinggi
								Nilai SPBE			Cakupan penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP)	%	98,00	99,00		98,00	100,00%	Sangat Tinggi							100,00%
						3	PROGRAM PENCATATAN SIPIL		Rasio Bayi berakte kelahiran	%	1,00	1,00		1,00	100,00%	Sangat Tinggi	100,00%	Sangat Tinggi	Rp183.458.913,00	Rp181.088.000,00	98,71%	Sangat Tinggi	SB	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
									Rasio pasangan berakte nikah	%	0,91	0,91	0,91	0,91	100,00%	Sangat Tinggi	100,00%	Sangat Tinggi							



No	Tujuan	Indikator Tujuan		Sasaran	Indikator Sasaran	Program & Indikator Kinerja Program		Satuan	Target		Realisasi		Evaluasi Kinerja*		Evaluasi Program Kinerja*		Anggaran	Realisasi	Evaluasi Anggaran*		Kode Evaluasi Program*	OPD Pengampu	
									2024	2025	2023	2024	%	Keterangan	%	Keterangan	2024		%	Keterangan			
								Cakupan penerbitan akte kelahiran	%	100,00	100,00		100,00	100,00%	Sangat Tinggi								
						4	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Cakupan penyediaan hak akses kependudukan	%	50,00	50,00		50,00	100,00%	Sangat Tinggi	100,00%	Sangat Tinggi	Rp206.388.583,00	Rp198.159.600,00	96,01%	Sangat Tinggi	SB	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
								Persentase Penggunaan data Konsolidasi Bersih	%	50,00	50,00		50,00	100,00%	Sangat Tinggi	100,00%	Sangat Tinggi						
						5	PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	Jumlah Penduduk yang mengakses media informasi Kependudukan	Penduduk	2000,00	2000,00		2000,00	100,00%	Sangat Tinggi	100,00%	Sangat Tinggi						
								Jumlah Inovasi Pelayanan Adminduk	Inovasi	1,00	1,00		1,00	100,00%	Sangat Tinggi								
								Persentase jenis Informasi yang dimutakhirkan dalam data profil kependudukan	%	100,00	100,00		100,00	100,00%	Sangat Tinggi								
						6	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Persentase cakupan masyarakat usia produktif (19-65 Tahun) yang terjangkau informasi publik	%	25,00	35,00		50,00	200,00%	Sangat Tinggi	200,00%	Sangat Tinggi	Rp2.423.877.050,00	Rp2.393.053.956,00	98,73%	Sangat Tinggi	SB	Dinas Komunikasi dan Informatika
						7	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Persentase Sistem Informasi yang terintegrasi	%	55,00	60,00		50,00	90,91%	Sangat Tinggi	90,91%	Sangat Tinggi	Rp3.919.114.748,00	Rp3.904.021.762,00	99,61%	Sangat Tinggi	SB	Dinas Komunikasi dan Informatika
						8	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Persentase Pertumbuhan Inovasi Daerah	%	38,00	40,00	-	48,00	126,32%	Sangat Tinggi	113,16%	Sangat Tinggi	Rp937.141.202,00	Rp930.102.907,00	99,25%	Sangat Tinggi	SB	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah
								Persentase Hasil Penelitian/ Kajian yang dimanfaatkan	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00%	Sangat Tinggi								
						9	PROGRAM PENYELENGGARAA N PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks Kepuasan Masyarakat	%	96,00	96,00		96,00	100,00%	Sangat Tinggi	100,00%	Sangat Tinggi	Rp14.172.000,00	Rp11.842.000,00	83,56%	Tinggi	B	Kecamatan Magersari
								Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan	%	100,00	100,00		100,00	100,00%	Sangat Tinggi	Kecamatan Prajurit Kulon							



No	Tujuan	Indikator Tujuan		Sasaran	Indikator Sasaran	Program & Indikator Kinerja Program			Satuan	Target		Realisasi		Evaluasi Kinerja*		Evaluasi Program Kinerja*		Anggaran	Realisasi	Evaluasi Anggaran*		Kode Evaluasi Program*	OPD Pengampu					
										2024	2025	2023	2024							%	Keterangan			%	Keterangan	2024	%	Keterangan
				4.1.2	Meningkatnya Akuntabilitas Dalam Manajemen Pemerintahan			Pelayanan Publik yang Dilaksanakan	%	88,10	88,10	88,10	100,00%	Sangat Tinggi					Rp461.808.750,00	Rp461.606.550,00	99,96%	Sangat Tinggi	SB	Kecamatan Kranggan				
								Indeks Kepuasan Masyarakat																				
						1	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	100,00	100,00	100,00	100,00%	Sangat Tinggi	100,00%	Sangat Tinggi	Rp461.808.750,00	Rp461.606.550,00	99,96%	Sangat Tinggi	SB	Dinas Komunikasi dan Informatika								
								PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	100,00	100,00	100,00	100,00%	Sangat Tinggi	100,00%	Sangat Tinggi	Rp377.768.050,00	Rp368.479.800,00	97,54%	Sangat Tinggi	SB	Sekretariat Daerah							
						Opini BPK	1	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	100,00	100,00	100,00	100,00%	Sangat Tinggi	99,45%	Sangat Tinggi	Rp19.844.973.773,00	Rp19.421.310.507,00	97,87%	Sangat Tinggi	SB	Sekretariat Daerah							
						Maturitas SPIP			Indeks Kualitas LPPD	83	84	81,07	97,67%	Sangat Tinggi														
									Indeks Data Profil Kelurahan tingkat Kota	0,77	0,78	0,75	97,40%	Sangat Tinggi														
									Persentase Nama Rupabumi yang Dibakukan	100,00	100,00	100,00	100,00%	Sangat Tinggi														
									Persentase Kerja Sama yang Ditindaklanjuti	100,00	100,00	100,00	100,00%	Sangat Tinggi														
									Persentase Produk Hukum Daerah yang dapat diimplementasikan	100,00	100,00	100,00	100,00%	Sangat Tinggi														
									Persentase Penanganan Permasalahan Hukum yang difasilitasi	100,00	100,00	100,00	100,00%	Sangat Tinggi														
									Persentase Dokumen Pelaporan HAM yang dipenuhi	100,00	100,00	100,00	100,00%	Sangat Tinggi														



No	Tujuan	Indikator Tujuan		Sasaran	Indikator Sasaran	Program & Indikator Kinerja Program		Satuan	Target		Realisasi		Evaluasi Kinerja*		Evaluasi Program Kinerja*		Anggaran	Realisasi	Evaluasi Anggaran*		Kode Evaluasi Program*	OPD Pengampu	
									2024	2025	2023	2024	%	Keterangan	%	Keterangan	2024		%	Keterangan			
								Persentase Digitalisasi Produk hukum yang dilaksanakan	%	100,00	100,00		100,00	100,00%	Sangat Tinggi								
						2	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Persentase Kebijakan Perekonomian yang dilaksanakan	%	100,00	100,00		100,00	100,00%	Sangat Tinggi	100,00%	Sangat Tinggi	Rp878.255.387,00	Rp809.412.450,00	92,16%	Sangat Tinggi	SB	Sekretariat Daerah
								Persentase administrasi Perangkat Daerah yang terpenuhi	%	100,00	100,00		100,00	100,00%	Sangat Tinggi								
						3	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Persentase penyelesaian administrasi yang tepat waktu	%	100,00	100,00		100,00	100,00%	Sangat Tinggi	100,00%	Sangat Tinggi	Rp27.376.453.473,00	Rp23.444.909.347,00	85,64%	Tinggi	B	Sekretariat DPRD
								Persentase Aspirasi Masyarakat Yang Masuk Dalam Usulan	%	100,00	100,00		100,00	100,00%	Sangat Tinggi								
						4	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase Dokumen Perencanaan yang disusun Tepat Waktu dan Sesuai Aturan	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00%	Sangat Tinggi	100,58%	Sangat Tinggi	Rp1.253.810.359,00	Rp1.237.668.150,00	98,71%	Sangat Tinggi	SB	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah
								Persentase Usulan Masyarakat yang Terakomodir dalam APBD	%	79,92	80,12	-	80,84	101,15%	Sangat Tinggi								
						5	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase Dokumen Perencanaan Sektoral yang disusun	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00%	Sangat Tinggi	100,00%	Sangat Tinggi	Rp1.686.477.356,00	Rp1.650.783.200,00	97,88%	Sangat Tinggi	SB	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah
								Persentase Laporan Monitoring dan Evaluasi Perencanaan yang disusun	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00%	Sangat Tinggi								
						6	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Persentase ketepatan waktu penyusunan dokumen anggaran	%	100,00	100,00		100,00	100,00%	Sangat Tinggi	100,00%	Sangat Tinggi	Rp10.926.280.529,00	Rp1.375.939.206,00	12,59%	Sangat Rendah	KB	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah



No	Tujuan	Indikator Tujuan		Sasaran	Indikator Sasaran	Program & Indikator Kinerja Program		Satuan	Target		Realisasi		Evaluasi Kinerja*		Evaluasi Program Kinerja*		Anggaran	Realisasi	Evaluasi Anggaran*		Kode Evaluasi Program*	OPD Pengampu	
									2024	2025	2023	2024	%	Keterangan	%	Keterangan			2024				%
						7	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Persentase Barang bergerak dan tidak bergerak yang digunakan	%	90,00	92,00		88,00	97,78%	Sangat Tinggi	97,78%	Sangat Tinggi	Rp1.429.784.469,00	Rp1.332.265.075,00	93,18%	Sangat Tinggi	SB	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah
						8	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Persentase realisasi Pendapatan Asli Daerah	%	100,00	100,00		100,00	100,00%	Sangat Tinggi	100,00%	Sangat Tinggi	Rp910.690.510,00	Rp894.802.775,00	98,26%	Sangat Tinggi	SB	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah
						9	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Persentase laporan Pengawasan yang sesuai standar	%	100,00	100,00		164	164,00%	Sangat Tinggi	164,00%	Sangat Tinggi	Rp277.887.380,00	Rp259.802.500,00	93,49%	Sangat Tinggi	SB	Inspektorat
						10	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Jumlah unit kerja yang diusulkan mendapatkan predikat WBK/ WBBM	Unit	3,00	3,00		9,00	300,00%	Sangat Tinggi	300,00%	Sangat Tinggi	Rp802.907.863,00	Rp773.868.000,00	96,38%	Sangat Tinggi	SB	Inspektorat
								Persentase Perangkat Daerah dengan Indeks Penerapan Manajemen Risiko (Manajemen Risiko Indeks) min level 3	%	30,00	60,00		64,00	213,33%	Sangat Tinggi	213,33%	Sangat Tinggi						
						11	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP PD	%	70,01	75,00		68,10	97,27%	Sangat Tinggi	99,73%	Sangat Tinggi	Rp9.891.349.009,00	Rp9.775.493.273,00	98,83%	Sangat Tinggi	SB	Semua Perangkat Daerah
								Indeks Manajemen Risiko PD	Level	2,00	3,00		2,00	100,00%	Sangat Tinggi								
								Indeks Kepuasan Masyarakat PD	Poin	85,92	85,94		85,92	100,00%	Sangat Tinggi								
								Persentase peningkatan Akuntabilitas Keuangan, Kinerja dan Pelayanan Bagian Hukum	%	100,00	100,00		100,00	100,00%	Sangat Tinggi								
								Persentase pemenuhan administrasi perkantoran	%	100,00	100,00		100,00	100,00%	Sangat Tinggi								
								Persentase administrasi Perangkat Daerah yang terpenuhi	%	100,00	100,00		100,00	100,00%	Sangat Tinggi								



No	Tujuan	Indikator Tujuan		Sasaran	Indikator Sasaran	Program & Indikator Kinerja Program		Satuan	Target		Realisasi		Evaluasi Kinerja*		Evaluasi Program Kinerja*		Anggaran	Realisasi	Evaluasi Anggaran*		Kode Evaluasi Program*	OPD Pengampu											
									2024	2025	2023	2024	%	Keterangan	%	Keterangan	2024		%	Keterangan													
							Persentase administrasi Perangkat Daerah yang terpenuhi	%	100,00	100,00		100,00	100,00%	Sangat Tinggi																			
							Persentase Tindak lanjut LHP	%	100,00	100,00		100,00	100,00%	Sangat Tinggi																			
							Persentase Penunjang urusan pemerintahan daerah yang terpenuhi	%	100,00	100,00		100,00	100,00%	Sangat Tinggi																			
							Persentase sarana dan prasarana Sekretariat Daerah dalam kondisi baik	%	90,00	90,00		90,00	100,00%	Sangat Tinggi																			
						4.1.3	Meningkatnya Manajemen dan Kapasitas Kepegawaian	Sistem Merit	1	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Persentase Penempatan ASN berdasarkan kompetensi	%	90,00	90,00									90,00	100,00%	Sangat Tinggi	105,56%	Sangat Tinggi	Rp1.176.940.113,00	Rp1.102.934.049,00	93,71%	Sangat Tinggi	SB	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM
										Persentase PNS yang berkinerja minimal BAIK	%	90,00	90,00	100,00									111,11%	Sangat Tinggi									
									2	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Persentase PNS yang mengikuti kegiatan pengembangan kompetensi minimal 20 JP dalam satu tahun	%	17,00	19,00									16,07	94,53%	Sangat Tinggi	94,53%	Sangat Tinggi	Rp1.879.314.352,00	Rp1.811.171.396,00	96,37%	Sangat Tinggi	SB	
5	Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup yang Layak	5.1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	5.1.1	Menurunnya Tingkat Pencemaran Lingkungan	Indeks Kualitas Air	1	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Prosentase dokumen lingkungan hidup yang tersusun sesuai dengan ketentuan	%	100,00	100,00		100,00	100,00%	Sangat Tinggi	100,00%	Sangat Tinggi	Rp149.999.800,00	Rp149.015.400,00	99,34%	Sangat Tinggi	SB	Dinas Lingkungan Hidup									
						Indeks Kualitas Udara	2	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase sungai yang memenuhi baku mutu air sungai	%	43	44		40	93,02%	Sangat Tinggi	96,51%	Sangat Tinggi	Rp559.356.726,00	Rp396.180.100,00	70,83%	Sedang	C										
									Persentase udara ambien dalam kondisi memenuhi baku	%	100,00	100,00		100,00	100,00%	Sangat Tinggi																	
							3	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Indeks Kualitas Lahan (IKL)	Poin	25,41	25,41		27,11	106,69%	Sangat Tinggi	106,69%	Sangat Tinggi	Rp2.345.384.593,00	Rp2.276.203.095,00	97,05%	Sangat Tinggi	SB										





No	Tujuan	Indikator Tujuan		Sasaran		Indikator Sasaran	Program & Indikator Kinerja Program		Satuan	Target		Realisasi		Evaluasi Kinerja*		Evaluasi Program Kinerja*		Anggaran	Realisasi	Evaluasi Anggaran*		Kode Evaluasi Program*	OPD Pengampu	
										2024	2025	2023	2024	%	Keterangan	%	Keterangan	2024		%	Keterangan			
							4	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	Persentase kegiatan/usaha yang menerapkan pengelolaan limbah sesuai standar	%	100,00	100,00		100,00	100,00%	Sangat Tinggi	100,00%	Sangat Tinggi	Rp199.892.756,00	Rp189.012.408,00	94,56%	Sangat Tinggi	SB	Dinas Lingkungan Hidup
							5	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Porsentase dokumen lingkungan yang tersedia	%	100,00	100,00		100,00	100,00%	Sangat Tinggi	100,00%	Sangat Tinggi	Rp271.357.450,00	Rp259.108.000,00	95,49%	Sangat Tinggi	SB	Dinas Lingkungan Hidup
							6	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	prosentase lembaga/sekolah yang memenuhi kriteria penghargaan LH	%	100,00	100,00		100,00	100,00%	Sangat Tinggi	100,00%	Sangat Tinggi	Rp900.000.000,00	Rp787.762.000,00	87,53%	Tinggi	B	Dinas Lingkungan Hidup
							7	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	Prosentase pengaduan yang tertangani tepat waktu	%	100,00	100,00		100,00	100,00%	Sangat Tinggi	100,00%	Sangat Tinggi	Rp24.999.650,00	Rp24.218.600,00	96,88%	Sangat Tinggi	SB	Dinas Lingkungan Hidup
							8	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Prosentase sampah yang dikelola	%	98,91	99		97,04	98,11%	Sangat Tinggi	98,11%	Sangat Tinggi	Rp2.559.596.116,00	Rp2.486.487.656,00	97,14%	Sangat Tinggi	SB	Dinas Lingkungan Hidup
							9	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Load Faktor Angkutan Sekolah Gratis	%	100,00	100,00		100,00	100,00%	Sangat Tinggi	97,70%	Sangat Tinggi	Rp7.588.813.696,00	Rp6.996.932.134,00	92,20%	Sangat Tinggi	SB	Dinas Perhubungan
								Persentase layanan angkutan darat	%	35,2	35,3		35	99,43%	Sangat Tinggi									
								Rasio ijin trayek	%	0,00037	0,00037	0,00037	0,00037	100,00%	Sangat Tinggi									
								Persentase penurunan angka pelanggaran pengguna jalan	%	22	25		22	100,00%	Sangat Tinggi									
								Persentase Kendaraan Bermotor Wajib	%	88,2	88,3		88	99,77%	Sangat Tinggi									



No	Tujuan	Indikator Tujuan		Sasaran	Indikator Sasaran	Program & Indikator Kinerja Program		Satuan	Target		Realisasi		Evaluasi Kinerja*		Evaluasi Program Kinerja*		Anggaran	Realisasi	Evaluasi Anggaran*		Kode Evaluasi Program*	OPD Pengampu				
									2024	2025	2023	2024	%	Keterangan	%	Keterangan	2024		%	Keterangan						
							Uji (KBWU) yang melakukan uji kelaikan kendaraan bermotor																			
							Persentase kepemilikan KIR angkutan umum	%	80,2	80,3		80	99,75%	Sangat Tinggi												
							Persentase Pemenuhan fasilitas perlengkapan jalan	%	96,42	98		95	98,53%	Sangat Tinggi												
							Persentase Peningkatan Kinerja Ruas Jalan pada Jam Sibuk	%	52,38	80,95		42,86	81,83%	Tinggi												
							Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan	%	0,00049	0,00049		0,00049	100,00%	Sangat Tinggi												
						5.1.2	Tersedianya Kawasan Permukiman Dengan Layak	Indeks Infrastruktur Permukiman	1	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Persentase pemenuhan akses layak air minum	%	97,66	97,72	96,00	97,50	99,84%	Sangat Tinggi	99,84%	Sangat Tinggi	Rp458.861.000,00	Rp432.728.850,00	94,30%	Sangat Tinggi	SB	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
									2	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Persentase pemenuhan akses layak sanitasi	%	99,11	99,40	99,00	99,25	100,14%	Sangat Tinggi	100,14%	Sangat Tinggi	Rp5.041.536.000,00	Rp4.650.136.638,00	92,24%	Sangat Tinggi	SB	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
									3	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Persentase saluran drainase dalam kondisi baik	%	97,20	97,30	97,17	97,28	100,08%	Sangat Tinggi	100,08%	Sangat Tinggi	Rp19.997.528.305,00	Rp18.850.143.206,00	94,26%	Sangat Tinggi	SB	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
									4	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Persentase jalan kota dalam kondisi mantab ( > 40km/jam )	%	96,90	97,35	96,87	97,34	100,45%	Sangat Tinggi	100,45%	Sangat Tinggi	Rp21.455.403.287,00	Rp18.760.898.734,00	87,44%	Tinggi	B	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan



No	Tujuan	Indikator Tujuan		Sasaran	Indikator Sasaran	Program & Indikator Kinerja Program			Satuan	Target		Realisasi		Evaluasi Kinerja*		Evaluasi Program Kinerja*		Anggaran	Realisasi	Evaluasi Anggaran*		Kode Evaluasi Program*	OPD Pengampu
										2024	2025	2023	2024	%	Keterangan	%	Keterangan	2024		%	Keterangan		
																							Kawasan Permukiman
						5	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Persentase penyelenggaraan penataan ruang	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00%	Sangat Tinggi	100,00%	Sangat Tinggi	Rp1.458.000.000,00	Rp1.176.331.116,00	80,68%	Tinggi	B	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
						6	PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	Persentase pengurangan kawasan kumuh	%	1,3			1,3	100,00%	Sangat Tinggi	100,00%	Sangat Tinggi	Rp3.142.653.400,00	Rp3.106.104.800,00	98,84%	Sangat Tinggi	SB	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
						7	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Persentase kecukupan sarana dan prasarana utilitas umum	%	100,00	100,00		100,00	100,00%	Sangat Tinggi	100,00%	Sangat Tinggi	Rp3.805.257.299,00	Rp3.263.286.784,00	85,76%	Tinggi	B	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
				5.1.3	Meningkatnya Kesiapsiagaan Menghadapi Bencana																		
					Indeks Resiko Bencana	1	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Persentase Pengelolaan SDA yang baik	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00%	Sangat Tinggi	100,00%	Sangat Tinggi	Rp744.622.859,00	Rp600.358.422,00	80,63%	Tinggi	B	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
						2	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Persentase kecukupan pengembangan perumahan	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00%	Sangat Tinggi	100,00%	Sangat Tinggi	Rp431.404.050,00	Rp182.108.784,00	42,21%	Sangat Rendah	KB	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
						3	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Persentase Penanggulangan Bencana yang ditangani	%	100,00	100,00		100,00	100,00%	Sangat Tinggi	100,00%	Sangat Tinggi	Rp338.219.721,00	Rp278.559.125,00	82,36%	Tinggi	B	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
						4	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN,	Persentase Pelayanan Pencegahan,	%	100,00	100,00		100,00	100,00%	Sangat Tinggi	100,00%	Sangat Tinggi	Rp187.458.268,00	Rp157.812.432,00	84,19%	Tinggi	B	Badan Penanggulangan Bencana Daerah



No	Tujuan	Indikator Tujuan		Sasaran		Indikator Sasaran	Program & Indikator Kinerja Program		Satuan	Target		Realisasi		Evaluasi Kinerja*		Evaluasi Program Kinerja*		Anggaran	Realisasi	Evaluasi Anggaran*		Kode Evaluasi Program*	OPD Pengampu
										2024	2025	2023	2024	%	Keterangan	%	Keterangan	2024		%	Keterangan		
							PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Penanggulangan Penyelamatan Kebakaran dan Non Kebakaran yang ditangani															
						5	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Persentase korban bencana yang tertangani	%	100,00	100,00		100,00	100,00%	Sangat Tinggi	100,00%	Sangat Tinggi	Rp495.988.200,00	Rp493.414.350,00	99,48%	Sangat Tinggi	SB	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak





